

Buku Dana Desa Bu Izza

by Izza Mafruhah

Submission date: 18-Mar-2020 09:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1277557615

File name: Buku_Dana_Desa_Bu_Izza.pdf (5.21M)

Word count: 34847

Character count: 219015



DATA DAN INFORMASI

MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH



PUSAT DATA DAN INFORMASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI

Data dan Informasi
Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah



Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Bekerja Sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret

Jakarta, 2018

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah/
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,
dan Informasi. Jakarta, 2018.

+ hlm ; 14,5 x 21 cm

ISBN 978-623-7129-50-9

Judul:

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah

Penyusun:

Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si; Prof . Sudibyoy, MS;
Dr. Yudi Rinanto, MP; Nurul Istiqomah, SE, M.Si;
Dewi Ismoyowati, SE, M.Si; Ponco Nurhadi, SH;
Desi Windyastuti, S.Sos; Ferlijana , SE;
Agnes Ani Widowati, SE; Sukaryono, S.Pd;
Heru Sigit Riyanto; Yugo Asmoro, SH, MH;
Sri Hesti Noerainingsih, SE; Sambodo, SE;

Copyright © 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama Badan Penelitian
dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya ringkasan eksekutif penelitian kerja sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan LPPM Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengambil judul Penyusunan Data Informasi tentang Pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun data dan informasi tentang pemanfaatan dana desa, terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM, kesejahteraan masyarakat, serta inovasi dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah 1) menganalisis data dan informasi dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM); 2) menganalisis data dan informasi dampak pemanfaatan dana desa terkait dengan status perkembangan desa, kesejahteraan masyarakat, dan lembaga ekonomi desa; 3) menganalisis inovasi desa dalam meningkatkan pemanfaatan dana desa. *Output* penelitian ini adalah rekomendasi penggunaan inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana desa.

Kami menyadari bahwa penelitian bisa berjalan dengan baik karena adanya kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada Balilatfo Kemendesa PDTT, Kepala Dinas Permades Dukcapil Provinsi Jateng dan jajarannya, Bapak Bupati Jepara dan jajarannya, Petinggi desa sampel dan masyarakatnya serta berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu maka kritik dan saran yang membangun kami perlukan demi penyempurnaan hasil penelitian ini.

Surakarta Oktober 2018
Ketua LPPM UNS

Prof Sulistyو Saputro
NIP. 196809041994031001

KATA SAMBUTAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, berbeda dengan sistem sebelumnya yang lebih menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang sifatnya *top down*. Desa merupakan pelaku pembangunan terhadap dirinya sendiri dengan mengurus, mengatur dan mengelola potensinya untuk pembangunan. Asas penting sebagai pengakuan terhadap desa, terdiri atas empat hal, yaitu asas *rekognisi*, asas *subsidiarity*, asas *inklusi* dan asas *partisipatif*. Asas *rekognisi* adalah pengakuan dan penghargaan negara terhadap hak asal-usul desa. Kemudian asas *subsidiarity* merupakan penetapan kewenangan terhadap desa untuk mengatur kepentingan masyarakat desa. Asas *inklusi* artinya terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan saling menghargai. Asas *partisipatif* berarti keikutsertaan setiap unsur dalam pembangunan desa. Sesuai dengan regulasi tersebut di atas, salah satu sumber daya pembangunan desa adalah anggaran. Salah satu perubahan penting dalam penganggaran desa adalah dialokasikannya dana langsung dari APBN ke desa dalam bentuk skema dana desa. Secara substansi keuangan, dana desa sebetulnya peralihan dari dana yang selama ini

dikurcurkan lewat nomenklatur lain, seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Kementerian Dalam Negeri dan anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Penggunaan dana desa perlu dilakukan evaluasi terhadap manfaatnya dari aspek a) Pembangunan Desa; b) Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi ; c) Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat; d) Kontribusi Dana Desa Terhadap Perubahan Status Desa; e) Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa.

Evaluasi yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa dana desa telah menjadi salah satu pendorong dalam perubahan status desa menurut Indeks Desa Membangun. Perubahan bisa meningkat maupun menurun, penurunan terutama terjadi karena adanya faktor eksternal yang berpengaruh secara langsung namun tidak bisa diselesaikan hanya oleh desa tersebut. Namun secara umum peningkatan IDM lebih banyak dibandingkan dengan penurunan.

Salah satu faktor penting dalam pemanfaatan dana desa adalah inovasi yang dibangun di desa, khususnya secara bottom up. Inovasi mengandung tiga tahap utama yaitu Amati, Tiru dan Modifikasi. Amati mempunyai arti bahwa inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi desa baik dari aspek geografis, demografis maupun potensi-potensi yang ada di dalamnya yang kemudian dengan komitmen akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan data provinsi, komitmen yang terbentuk dalam BID berjumlah 5.514 yang menunjukkan

kesadaran dan pemahaman desa akan pentingnya inovasi demi peningkatan pembangunan.

Dengan penelitian ini diharapkan akan mampu memotret secara lebih dalam bagaimana pemanfaatan dana desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, sehingga tujuan perubahan Membangun Desa menjadi Desa Membangun yang mengandung pengertian desa sebagai subyek pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Di akhir, kami berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran	13
C. Manfaat	14
D. Tinjauan Pustaka	14
D.1. Indeks Desa Membangun	14
D.2. Dana Desa	21
D.3. Inovasi	30
E. Metode Penelitian	33
E.1. Ruang Lingkup Penelitian	33
E.2. Jenis dan Sumber Data	34
E.3. Kerangka Konseptual	36
BAB II PERKEMBANGAN STATUS DESA	
A. Perubahan Status Desa 2015 - 2018	38

A.1. Perubahan Status Level Provinsi	38
A.2. Perubahan Status Desa di Desa Sampel .	42
A.3. Perubahan Status Desa di Desa Sasaran	47
B. Dinamika Perubahan Status Desa	51
B.1. Dinamika Perubahan Secara Umum	51
B.2. Perubahan Status tiap Desa Sampel	55
B.2.1. Desa Gemulung	56
B.2.2. Desa Pancur	64
B.2.3. Desa Karimunjawa	74
B.2.4. Desa Tanjung	88
B.2.5. Desa Kelet	97

BAB III PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

DANA DESA	
A. Penggunaan Dana Desa	106
A.1. Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah	108
A.2. Dana Desa di Kabupaten Jepara	109
A.3. Dana Desa di Lima Desa Sampel	111
B. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan	114
C. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi	117
D. Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	119
E. Kontribusi Dana Desa Terhadap Perubahan Status Desa	121

F. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam	
Pemanfaatan Dana Desa	123
F.1. Perencanaan	123
F.2. Pelaksanaan	124
F.3. Evaluasi	126
G. Pemanfaatan Dana Desa per Desa Sampel	127
G.1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa	
Gemulung	127
G.1.1. Pemanfaatan Infrastruktur	127
G.1.2. Pemanfaatan Kesejahteraan	
Masyarakat	130
G.2. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Pancur	132
G.2.1. Pemanfaatan Kesejahteraan /	
Masyarakat	135
G.3. Pemanfaatan Dana Desa di Desa	
Karimunjawa	137
G.3.1. Pemanfaatan Kesejahteraan	
Masyarakat.....	139
G.4. Pemanfaatan Dana Desa di Desa	
Tanjung	141
G.4.1. Pemanfaatan Kesejahteraan	
Masyarakat	143
G.5. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kelet...	145
G.5.1. Pemanfaatan Kesejahteraan	
Masyarakat	147

BAB IV INOVASI DESA DALAM PEMANFAATAN
DANA DESA

A. Implementasi Pemanfaatan Dana Desa	149
B. Kebutuhan Inovasi Desa	182
B.1. Desa Gemulung	187
B.1.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa ...	187
B.1.2. Potensi, Permasalahan dan Kebutuhan Inovasi	189
B.2. Desa Pancur	190
B.2.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa ..	191
B.2.2. Potensi, Permasalahan dan Kebutuhan Inovasi	192
B.3. Desa Karimunjawa	194
B.3.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa ...	196
B.3.2. Potensi, Permasalahan dan Kebutuhan Inovasi	197
B.4. Desa Tanjung	198
B.4.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa ..	198
B.5. Desa Kelet	199
B.5.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa ..	199

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	200
	B. Rekomendasi	201
DAFTAR PUSTAKA	202

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perbandingan Hasil Penilaian IDM tahun 2014 dan 2018	11
Tabel 2.1.	IDM Desa di Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2018	39
Tabel 2.2.	Perubahan IDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2018	46
Tabel 2.3.	Kriteria IDM Kabupaten Jepara tahun 2015 - 2018	46
Tabel 2.4.	Perubahan Status IDM Kabupaten Jepara	47
Tabel 2.5.	Perubahan Status IDM Lima Desa Sampel	48
Tabel 2.6.	Perubahan Status Indeks Desa Membangun pada Desa Sampel	50
Tabel 2.7	IDM Gemulung 2015 - 2018	58
Tabel 2.8.	Perubahan Status IDM Desa Pancur 2015-2018.....	67
Tabel 2.9.	Indeks Desa Membangun di Desa Karimunjawa	81
Tabel 2.10.	Perubahan IDM tahun 2015 dan 2018 di Desa Tanjung	89

Tabel 2.11. Perubahan Indeks Desa Membangun Desa Kelet tahun 2015 - 2018	99
Tabel 3.1. Dana Desa per Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018	108
Tabel 3.2. Jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa per kecamatan	110
Tabel 3.3 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.....	111
Tabel 3.4 Penggunaan Dana Desa di Daerah Sampel	113
Tabel 3.5. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur	114
Tabel 3.6. Infrastruktur yang Terbangun Dengan Menggunakan Dana Desa 2018	115
Tabel 3.7. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat	118
Tabel 3.8. Dana Desa untuk Pembinaan Kesejahteraan Sosial	120
Tabel 3.9. Pemanfaatan Dana Desa Gemulung tahun 2015 - 2018	128
Tabel 3.10. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gemulung Tahun 2015-2018	131
Tabel 3.11. Dana Desa menurut Penggunaan	133
Tabel 3.12. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pancur Tahun 2015-2018	136
Tabel 3.13. Penggunaan Dana Desa Karimunjawa tahun 2015 - 2018	138

Tabel 3.14. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karimunjawa Tahun 2015-2018	140
Tabel 3.15. Penggunaan Dana Desa Tanjung tahun 2015 - 2018	142
Tabel 3.16. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Tahun 2015-2018	144
Tabel 3.17. Penggunaan dana Desa di Desa Kelet	146
Tabel 3.18. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kelet Tahun 2015-2018 ..	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Inovasi	30
Gambar 1.2. Roadmap Penelitian	35
Gambar 1.3. Kerangka Konseptual	37
Gambar 2.1. Typologi Perkembangan Daerah Berdasarkan Pendapatan dan Pembangunan Manusia	38
Gambar 2.2. Potensi Wisata Desa Gemulung	58
Gambar 2.3. Potensi Wisata Desa Gemulung	67
Gambar 2.4. Potensi Wisata Krimun Jawa	80
Gambar 2.5. Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Tanjung	95
Gambar 2.6. Potensi Wisata Desa Kelet	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Bab 1 tentang ketentuan umum menyatakan, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian desa adalah suatu kawasan yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

organisasi pemerintahan terendah dan organisasi tersebut berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014b).

Tipologi desa dibedakan berdasarkan aspek topografi atau kondisi geografis dan berdasarkan aspek kegiatan ekonomi. Tipologi desa tersebut akan berkaitan erat dengan bagaimana karakter, budaya, pola hidup bermasyarakat dan juga pola ekonomi. Masyarakat yang tinggal di tepi pantai tentu akan memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat di pertanian lahan subur dan pertanian lahan kering atau pegunungan. Sehingga kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Berdasarkan geografis desa dibedakan menjadi (1) Desa daerah pegunungan/lahan kering, (2) Desa pertanian lahan basah dan (3) Desa pesisir pantai

1. Desa pegunungan/lahan kering, umumnya desa lahan kering merupakan wilayah desa dengan curah hujan rendah dan sumber simpanan air yang tidak terlalu banyak. Pada desa lahan kering ini, produksi pertanian khususnya tanaman pangan sangat terpengaruh oleh musim karena sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Selain musim penghujan, produksi yang ditanam masyarakat adalah palawija, ketela atau jagung yang tidak membutuhkan banyak air. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di lahan kering kurang begitu makmur apabila hanya mengandalkan hasil pertanian, sehingga

harus diberikan pola peningkatan ekonomi yang berbeda tidak hanya mengandalkan hasil pertanian

2. Desa lahan persawahan merupakan daerah pertanian lahan basah di mana air sangat mudah diperoleh untuk mengairi areal sawah, kondisi ini menyebabkan panen bisa dua atau bahkan tiga kali setahun. Salah satu ciri lahan pertanian basah adalah adanya sistem irigasi yang bagus. Kondisi ekonomi penduduk di pertanian lahan basah biasanya lebih sejahtera karena panennya bisa lebih berhasil.
3. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan.

Kondisi desa yang berbeda tetap membutuhkan peraturan perundangan yang mampu memayungi semua kebutuhan dan kepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan. Landasan pemikiran pengaturan mengenai desa dari waktu ke waktu menyesuaikan kondisi kawasan, antara lain:

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa,
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus

masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman,

4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa,
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Lima prinsip di atas, mengarahkan bahwa desa, dalam menjalankan kegiatannya memiliki beberapa kewenangan meliputi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam fokus kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, tiga hal yang disebut terakhir, yakni: prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa itu akan memperkuat pondasi 2 otonomi desa.

Titik penting dalam pengelolaan pembangunan desa adalah aspek pendanaan.

Pemerintah melalui PP no 60 tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan (Republik Indonesia, 2014a)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk untuk melaksanakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa memberi dasar bagi cara pandang dan pendekatan baru tentang desa, mengedepankan prinsip keberagaman, azas rekognisi dan subsidiaritas itu serta menguatkannya dalam jenis-jenis kewenangan desa. Pasal 4 Undang-Undang Desa menguraikan tujuan pengaturan desa sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) juga menetapkan Indeks Desa Membangun. IDM berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, dan dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 - 2019

dan koordinasi K/L dalam pembangunan desa. IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa).

UU tentang desa mengamanatkan kemandirian desa, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Kemandirian desa mensyaratkan adanya pendanaan yang diperoleh oleh desa itu sendiri. Pendapatan desa berdasarkan UU no 6 tahun 2014 tentang Dana Desa terdiri atas:

- a. hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah

Dana desa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa dianggarkan setiap tahun melalui APBN. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa akan ditransfer pemerintah pusat pada kabupaten/kota selanjutnya ditransfer pada masing-masing desa.

Dana desa dialokasikan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota
- d. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Indeks kemahalan konstruksi ini menjadi hasil pengali, sehingga perhitungannya adalah:

Pagu Dana desa nasional x (30% x persentase jumlah penduduk kab/kota terhadap total penduduk nasional + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin nasional) untuk mendapatkan setiap kabupaten/ kota.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:

- a) Ketersediaan pelayanan dasar
- b) Kondisi infrastruktur
- c) Transportasi
- d) Komunikasi desa ke kabupaten/kota

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa setelah melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan nasional dan menteri teknis/ pimpinan lembaga pemerintahan dan non kementerian.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi desa menjadi lima status, yakni Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Status Desa Tertinggal misalnya dibagi menjadi dua status, yakni Desa Sangat

Tertinggal dan Desa Tertinggal. Asumsi yang ingin dibangun, afirmasi kebijakan untuk Desa Sangat Tertinggal tentu berbeda dengan Desa Tertinggal. Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti guncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi status Desa Berkembang turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara, apabila Desa Berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Hasil pendataan dengan menggunakan indeks tersebut diperoleh hasil penilaian tahun 2015 dan 2018 sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Hasil Penilaian IDM tahun 2014 dan 2018

Tahun	Jumlah Desa	Sangat Tertinggal		Tertinggal		Berkembang		Maju		Mandiri	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
2015	72.383	13.504	18.66	32.636	45.09	22.506	31.09	3.530	4.88	207	0.29
2018	66.504	5.790	8.71	27.101	40.75	28.791	43.29	4.568	6.87	254	0.38

Sumber : Kemendes PDT 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa ternyata terjadi perubahan yang cukup bagus untuk Desa Sangat Tertinggal

yang menurun dari 18,66% menjadi 8,71%. Kemudian untuk Desa Tertinggal mengalami penurunan dari 45,09% menjadi 40,75%, sedangkan Desa Berkembang meningkat dari 31,09% menjadi 43,29%. Peningkatan juga terjadi di desa maju dan mandiri meskipun jumlahnya relatif rendah.

Pembangunan desa dilakukan melalui perpaduan sistem *bottom up* dan *top down*, dengan menekankan pada partisipasi seluruh masyarakat desa namun dengan arahan pemerintah. Upaya pembangunan salah satunya adalah dengan didukung oleh adanya dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka diperlukan adanya penelitian mengenai bagaimana pemanfaatan dana desa yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan bagaimana inovasi yang direkomendasikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana desa.

B. Tujuan Dan Sasaran

Penelitian ini dimaksudkan untuk penyusunan data dan informasi tentang pemanfaatan dana desa, terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM, kesejahteraan masyarakat, dan inovasi dalam pemanfaatan.

Penelitian ini mempunyai tujuan

1. Menganalisis data dan informasi dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM)
2. Menganalisis data dan informasi dampak pemanfaatan dana desa terkait dengan status perkembangan desa, kesejahteraan masyarakat, dan lembaga ekonomi desa
3. Menganalisis inovasi desa dalam meningkatkan pemanfaatan dana desa

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah menyusun rekomendasi penggunaan inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana desa.

Sasaran Kegiatan

Sasaran penelitian manfaat dana desa ini terdiri atas

1. Masyarakat desa yang tinggal di desa tersebut
2. Pemerintahan dan perangkat desa
3. Pemeritahan pada level di atasnya

C. Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kemanfaatan secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah: hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran bagaimana dinamika pembangunan yang dihasilkan dengan pemanfaatan yang dianalisis berdasarkan perubahan IDM dan komponennya sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun prioritas dana desa.
2. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan akan menambah keberagaman dalam pemanfaatan dana desa dan inovasi yang dihasilkan bisa direplikasikan ke desa lain.
3. Bagi dunia pendidikan: hasil penelitian diharapkan akan memberikan tambahan wacana dalam teori dan praktik sehingga bisa menjadi model dalam ekonomi pembangunan dan ekonomi kelembagaan.

D. Tinjauan Pustaka

D.1. Indeks Desa Membangun

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan perdesaan harus mengikutsertakan peran serta seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Indeks Desa Membangun dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada pertengahan 2015.

Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:

1. Indeks Ketahanan Sosial yang terdiri atas:
 - a. Modal sosial, terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - (i) Memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator: (a) Kebiasaan gotong royong di desa; (b) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar; (c) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan (d) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.
 - (ii) Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator: (a) Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis; (b) Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan (c) Terdapat keragaman agama di desa.
 - (iii) Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator: (a) Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan; (b) Partisipasi warga mengadakan siskamling; (c) Tingkat kriminalitas yang terjadi di desa; (d) Tingkat konflik yang terjadi di desa; dan (e) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di desa.
 - (iv) Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator: (a) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa; (b) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan (c) Terdapat penduduk yang bunuh diri

- b. Kesehatan,
 - (i) Pelayanan kesehatan, memiliki indikator (a) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; (b) Tersedia tenaga kesehatan bidan; (c) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan (d) Tersedia tenaga kesehatan lain.
 - (ii) Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator: (a) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan (b) Tingkat aktivitas posyandu; (c) Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS
- c. Pendidikan terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - (i) Akses ke pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri dari indikator: (a) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer; (b) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan (c) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer
 - (ii) Akses ke pendidikan non formal, yang terdiri dari indikator: (a) Kegiatan pemberantasan buta aksara; (b) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini; (c) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC; dan (d) Akses ke pusat keterampilan/ kursus
 - (iii) Akses ke pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa

- d. Permukiman, perangkat indikator sebagai berikut:
 - (i) Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator: (a) Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak; dan (b) Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - (ii) Akses ke sanitasi, yang terdiri dari indikator: (a) Mayoritas penduduk desa memiliki jamban; dan (b) Terdapat tempat pembuangan sampah, (c) Akses ke listrik yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
 - (iii) Akses ke informasi dan komunikasi, yang terdiri dari indikator: (a) Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat; (b) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan (c) Terdapat akses internet
 - (iv) Dimensi ekonomi terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
2. Indeks Ketahanan Ekonomi, terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.

- b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator: (i) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen); (ii) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan (iii) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
 - c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik
 - d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator: (i) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta); (ii) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan (iii) Akses penduduk ke kredit.
 - e. Lembaga ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
 - f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator: (i) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); (ii) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan (iii) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
3. Indeks Ketahanan Ekologi juga terdiri atas dimensi ekologi terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator: (i) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan (ii) Terdapat sungai yang terkena limbah.
- b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator: (i) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan (ii) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Indeks merupakan penilaian dari 54 indikator. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 - 0,92 Indeks Desa Membangun.

Indeks komposit tersebut kemudian dihitung dengan pembobotan dan akan dibedakan menjadi lima jenis desa menurut hasil penghitungan Indeks Desa Membangun, yaitu:

1. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai desa adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Nilai Indeks Kompositnya > 0,815
2. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan

menanggulangi kemiskinan. Nilai Indeks Kompositnya $> 0,707$ dan $< 0,815$

3. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nilai indeks kompositnya $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Nilai Indeks kompositnya $> 0,491$ dan $< 0,599$
5. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Nilai Indeks kompositnya adalah $< 0,491$

Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan

sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Desa Tertinggal.

D.2. Dana desa

Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena merupakan unit terendah dalam tataran pemerintahan. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perdesaan membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada masing-masing desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pemberian dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa

- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Pemanfaatan dana desa dilakukan dengan mengacu pada prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Dana desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 menyatakan bahwa prioritas kabupaten/kota digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya mencakup:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;

3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. Kelompok perempuan;
 - c. Kelompok tani;
 - d. Kelompok masyarakat miskin;
 - e. Kelompok nelayan;
 - f. Kelompok pengrajin;
 - g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. Kelompok pemuda;
 - i. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

(Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2015)

Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal

desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 menyatakan bahwa prioritas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016). Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi, antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat;
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat

desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi, antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d. Pengembangan sistem informasi desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;

- j. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit polindes 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit embung dalam periode 2015-2016.

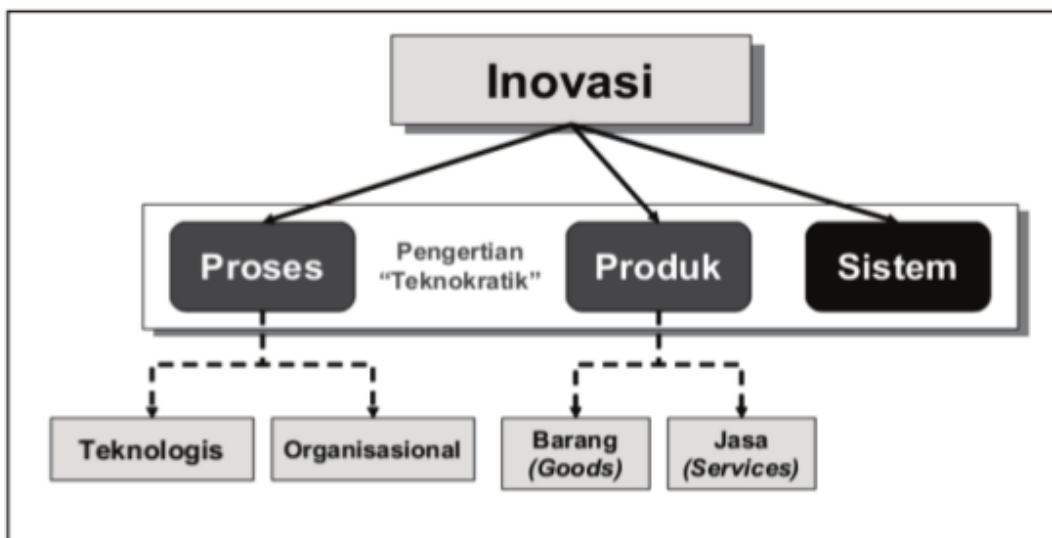
Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan,

antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan dana desa yang baik.

D.3. Inovasi

Inovasi mengandung pengertian proses gagasan bagi produk, proses baik barang atau jasa yang baru atau dilakukan perbaikan dikembangkan dan dikomersialisasikan di pasar. Definisi yang luas berarti proses perbaikan yang mengedepankan inovasi teknologi namun tidak terbatas pada proses atau hasil akhir saja. Inovasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses inovasi

Inovasi tidak dipandang hanya sebagai proses namun juga merupakan sistem yang mengaitkan banyak pihak atau *stakeholder*. Sistem inovasi mencakup basis iptek (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan rekayasa).

Basis produksi meliputi aktivitas nilai tambah bagi pemenuhi kebutuhan bisnis dan non bisnis dan masyarakat umum. Berdasarkan pemahaman tersebut maka secara detail sistem inovasi diartikan sebagai sehimpunan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, interaksi, proses produktif dan kebijakan yang memengaruhi arah pengembangan, kecepatan dan difusi inovasi serta proses pembelajaran.

Leo Sleuwaegen dan Priscilla Boiardi menyatakan, bahwa masing-masing daerah arah pertumbuhan yang bervariasi di mana konsentrasi sumber daya di suatu wilayah tidak lagi cukup untuk pertumbuhan jangka panjang, namun mempertimbangkan juga bagaimana investasi yang dilakukan, sumber daya apa yang dieksploitasi dan kinerja pertumbuhan yang menyangkutkan banyak pihak yang bersinergi. Daerah akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memobilisasi asetnya ke arah pertumbuhan yang lebih baik (Sleuwaegen & Boiardi, 2014).

Konsep sistem inovasi daerah atau dikenal sebagai *Regional Innovation System* (RIS) diterapkan untuk memperhitungkan keberhasilan pengembangan banyak daerah berkinerja tinggi atau inovatif dibandingkan dengan yang baru berkembang. Penelitian-penelitian baru yang dilakukan memberikan kritik

terhadap perspektif lokal dan mengarahkan pada penekanan terhadap kebutuhan dan analisis peran jaringan ekstra regional sebagai mekanisme pembangkitan pengetahuan dan sirkulasi di samping proses dan institusi di dalam daerah tersebut. Sistem inovasi daerah disarankan menggunakan pendekatan dimensi interaksi lintas regional atau internasional interaksi antara lokal dan non lokal melalui komunitas, jaringan intra perusahaan dan antar perusahaan, pemerintah dan akademisi (Chen, 2015) *regional innovation systems* (RIS). Konsep tersebut kemudian dikembangkan dalam level yang lebih rendah, yaitu desa.

Sistem inovasi dimaknai dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Penekanan inovasi adalah proses pembelajaran yang berarti perubahan teknologi tidak banyak dipertimbangkan sebagai pengembangan material, namun lebih pada rekombinasi dari pengetahuan atau penciptaan kombinasi-kombinasi baru. Proses pembelajaran bergantung pada keterlibatan banyak aktor yang mempertukarkan pengetahuan. Pemangku kepentingan tersebut meliputi masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.
2. Penekanan pada peranan lembaga sebagai ketentuan regulasi dan pengaturan peran masing-masing pemangku kepentingan. Lembaga merupakan penggerak penting dalam inovasi.

3. Sistem inovasi menekankan hubungan antar aktor dan lembaga atau adanya gagasan tentang suatu sistem. Perspektif sistem menunjukkan adanya pendekatan holistik yang mengandung pengertian bahwa sistem inovasi tidak bekerja secara linier namun merupakan kerja simultan antara banyak unsur di dalamnya.
4. Sistem inovasi menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan di antara banyak proses, yakni semua proses ini berjalan paralel satu sama lain melalui mekanis umpan balik positif yang tidak bisa diabaikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

E. Metode Penelitian

E.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang dana desa ini menggunakan *sequential mixed method*, yaitu perpaduan antara metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara berurutan. Penelitian ini mengambil lokus Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi Kabupaten Jepara. Pemilihan Kabupaten Jepara karena merupakan kabupaten dengan kriteria desa yang lengkap mulai dari Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, maupun Sangat Tertinggal. Masing-masing kategori diwakili oleh Desa Gemulung, Desa Pancur, Desa Karimunjawa, Desa Tanjung, dan Desa Kelet.

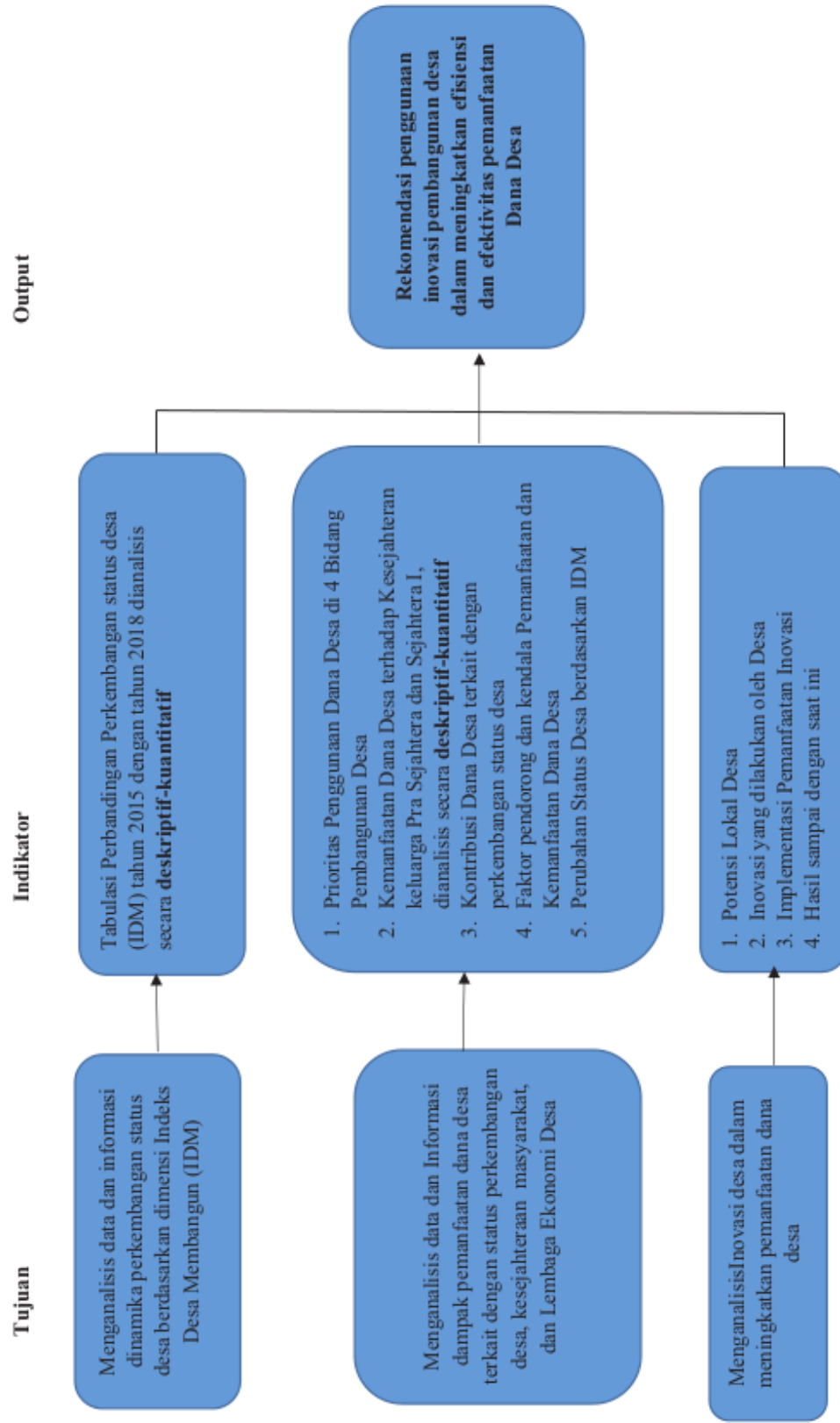
E.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dipilahkan menjadi dua, yaitu:

- a. Data-data sekunder yang diperoleh terdiri atas data dalam lingkup nasional dan data dalam lingkup provinsi, berupa dana Indeks Desa Membangun, Dana Desa, Penggunaan Dana Desa. Data diperoleh dari Kementerian Desa PDTT, data kabupaten dan kecamatan yang akan digunakan untuk menganalisis secara kuantitatif
- b. Data-data primer, yaitu data yang diperoleh dari unsur pemerintah baik kabupaten, kecamatan maupun desa dan masyarakat yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi langsung, maupun *Focus Group Discussion*. Data akan digunakan untuk pengolahan secara kualitatif

Pembahasan akan dilakukan berdasarkan tujuan secara berturut-turut sehingga akan membentuk *roadmap* dengan sistem *fishbone* sebagai berikut:

Gambar 1.2. Roadmap Penelitian

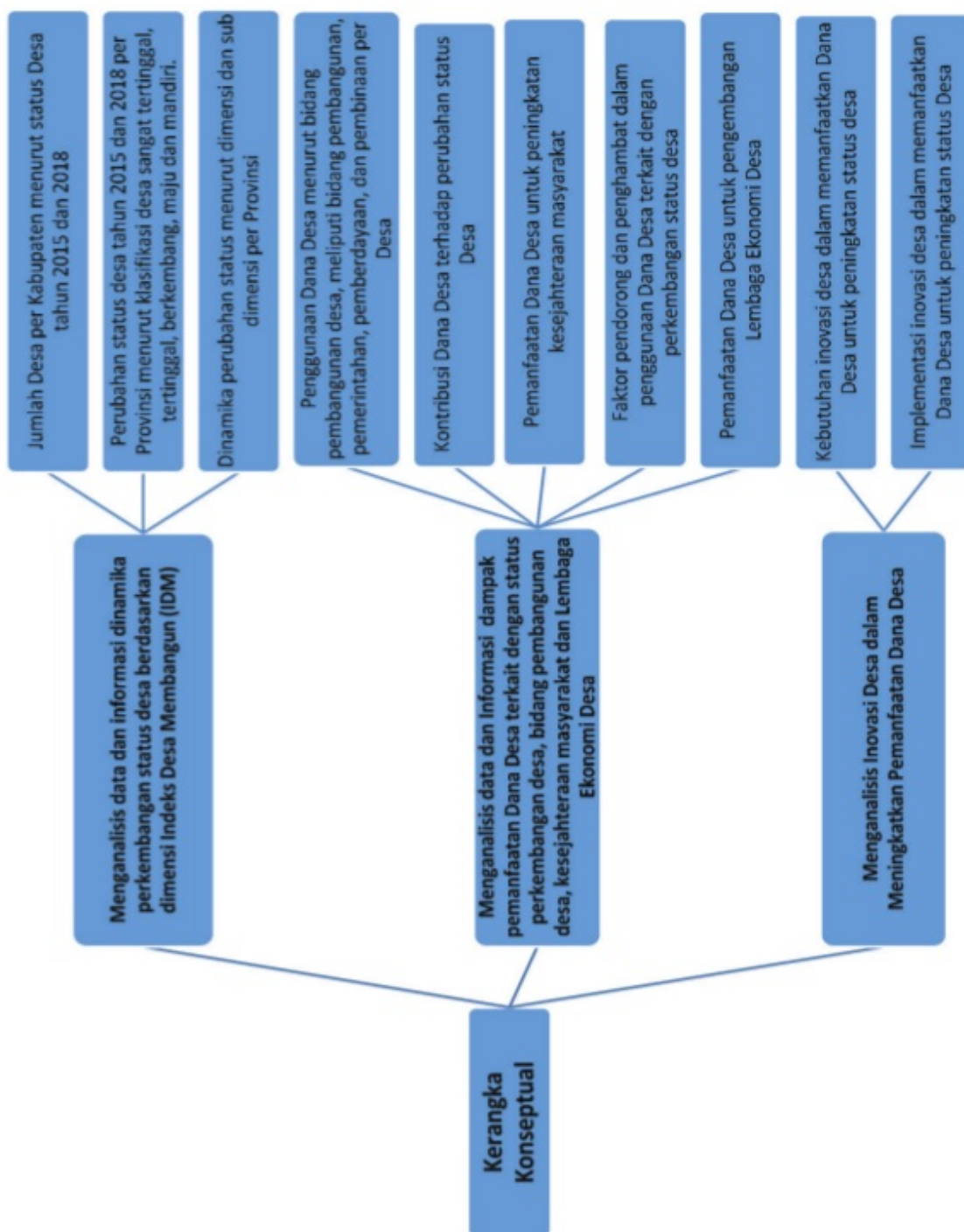


E.3. Kerangka konseptual

Roadmap yang merupakan peta jalan akan digunakan untuk menyelesaikan pembahasan penelitian berdasarkan tujuan dan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Secara lebih detail masing-masing indikator akan diturunkan ke dalam variabel operasional sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Roadmap dan kerangka konseptual secara bersama-sama akan menuntun pembahasan masalah dengan lampiran dan data-data yang telah disiapkan. Secara detail kerangka konseptual bisa ditunjukkan dalam Gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3. Kerangka Konseptual



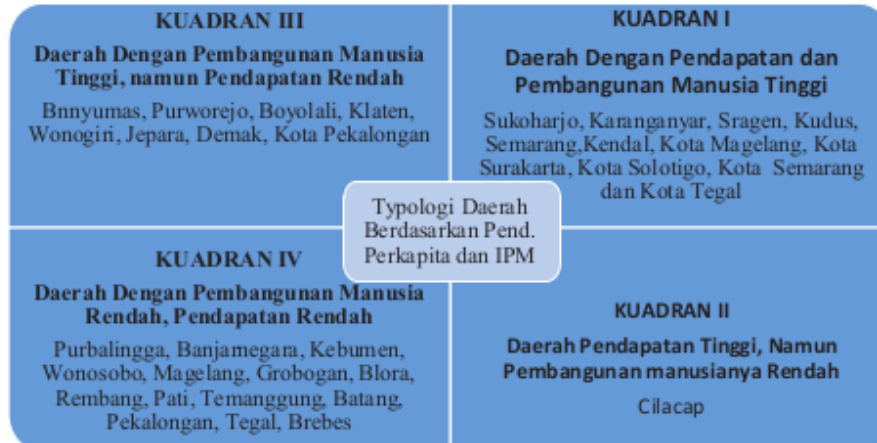
BAB II PERKEMBANGAN STATUS DESA

A. Perubahan Status Desa 2015-2018

A.1. Perubahan Status Level Provinsi

Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten kota dengan status perkembangan yang berbeda. Berdasarkan pengelompokan Tipologi Klassen dengan data pertumbuhan dan PDRN tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 2.1. Tipologi Perkembangan Daerah Berdasarkan Pendapatan dan Pembangunan Manusia



Sumber: Data diolah, 2017

Data tersebut menunjukkan, ternyata jumlah kabupaten di Jawa Tengah yang berada di kuadran IV masih cukup banyak. Hampir semua pemerintah daerah yang berada pada kuadran IV adalah kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten (yang sebagian besar terdiri atas perdesaan) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan.

Perkembangan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan IDM 2015 dan 2018

Perdesaan merupakan salah satu sentral pembangunan, khususnya dalam mengurangi disparitas antar daerah dan antar wilayah. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten kota dengan kondisi perdesaan yang berada pada wilayah pesisir, pergunungan dan dataran rendah yang tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda sesuai dengan kearifan lokal pada masing-masing wilayah. Jumlah desa yang berada pada posisi desa sesuai dengan IDM tahun 2014 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1. IDM Desa di Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2018

TAHUN	Sangat Tertinggal		Tertinggal		Berkembang		Maju		Mandiri		Jumlah
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
2015	50	0,64%	2.535	32,46%	4.335	55,51%	868	11,12%	21	0,27%	7.809
2018	52	0,67%	1.371	17,97%	5.106	66,93%	1.030	13,50%	70	0,92%	7.629

Sumber : Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Catatan : Data lengkap pada lampiran 1 dan lampiran 2

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi perubahan paling banyak pada desa tertinggal dan berkembang. Desa tertinggal menurun signifikan dari 32,46% pada tahun 2015 menjadi 17,97% tahun 2018. Sementara desa berkembang meningkat dari 55,51% menjadi 66,93%. Desa yang maju juga mengalami peningkatan pesat dari sebesar 868 desa menjadi 1030 desa pada tahun 2018. Perubahan yang cukup besar tersebut sangat menggembirakan khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab peningkatan tersebut diindikasikan karena alokasi dana desa telah berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini akan mengambil satu sampel kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah karena peningkatan dalam Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Ekonomi, sedangkan Indeks Ketahanan Lingkungan mengalami penurunan tipis. Secara detail perubahan status IDM di Provinsi Jawa Tengah akan ditunjukkan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2. Perubahan IDM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018

No.	Dimensi	Rata-Rata Skor Indikator IDM Provinsi	
		Tahun 2015	Tahun 2018
1.	Ketahanan Sosial	0,66	0,7225
	Sarana Kesehatan	3,35	4,7276
	Sarana Pendidikan	3,2	3,0884
	Modal Sosial	3,23	3,8367
	Permukiman	3,81	4,3858
2.	Ketahanan Ekonomi	0,55	0,5819
	Keragaman Produksi	3,54	3,6958
	Pusat layanan perdagangan	2,16	2,9628
	Akses distribusi logistik	0,39	0,0000
	Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	1,57	1,2099
	Lembaga ekonomi	2,02	2,7362
	Keterbukaan wilayah	3,73	4,1367
3.	Ketahanan Ekologi	0,66	0,6527
	Kualitas Lingkungan	0,77	4,5367
	Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana	0,59	2,6272

Sumber : Data tahun 2015-2018 diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa perubahan terbesar adalah dalam IKS yang secara umum mengalami peningkatan, kecuali sarana pendidikan yang justru mengalami penurunan. Sarana kesehatan yang mengalami peningkatan tinggi, yaitu mencapai 1,3. IKE juga mengalami peningkatan dengan kenaikan tertinggi pada pusat layanan perdagangan. Peningkatan lainnya

adalah pada keterbukaan wilayah, akses terhadap lembaga ekonomi, dan keragaman produksi. Sedangkan akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan menurun. Akses distribusi logistik pada tahun 2018 tidak terdapat data sehingga memiliki nilai nol. Indeks Ketahanan Lingkungan menurun tipis hal ini disebabkan oleh potensi rawan bencana dan tanggap bencana di Jawa Tengah cukup tinggi, khususnya di beberapa daerah pesisir yang rawan gempa dan daerah pegunungan yang rawan longsor. Secara detail perubahan masing-masing kabupaten terlampir.

Kabupaten yang terpilih sebagai sampel adalah Jepara. Kabupaten yang terpilih sebagai sampel analisis kemanfaatan dana desa di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Jepara. Alasan pemilihan Jepara sebagai salah satu sampel karena Jepara memiliki lima kriteria IDM sehingga bisa dilakukan perbandingan antar desa dengan kriteria yang berbeda. Selain itu secara geografis Jepara terdiri atas pegunungan, pesisir dan dataran rendah sehingga bisa mewakili semua aspek bisa terwakili.

A.2. Perubahan Status Desa di Kabupaten Sampel

Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Secara geografis, kabupaten Jepara terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat $110^{\circ}9'48,02''$ - $110^{\circ}58'37,40''$ BT dan $5^{\circ}43'20,67''$ - $6^{\circ}47'25,83''$ LS, dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Barat : Laut Jawa

- Utara : Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Pati dan Kudus
- Selatan : Kabupaten Demak.

Kabupaten Jepara memiliki luas 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,13 Km² terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan, serta 995 RW dan 4.686 RT. Jarak terdekat dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan, yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa, yaitu 90 km. Secara detail kecamatan dan desa/kelurahan di Jepara adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bangsri, terdiri atas 12 desa/kelurahan Bangsri, Banjar Agung, Banjaran, Bondo, Guyangan, Jerukwangi, Kedungleper, Kepuk, Papasan, Srikandang, Tengguli, dan Wedelan.
2. Kecamatan Batealit terdiri atas 11 desa/kelurahan, yaitu Bantrung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Mindahan, Mindahan Kidul, Ngasem, Pekalongan, Raguklampitan, dan Somosari.
3. Kecamatan Donorojo terdiri atas 8 desa/kelurahan, yaitu Bandungharjo, Banyumanis, Blingoh, Clering, Jugo, Sumber Rejo, Tulakan, dan Ujungwatu.
4. Kecamatan Jepara yang terdiri atas 16 desa/kelurahan, yaitu Karangkebagusan, Panggang, Potroyudan, Bapangan, Saripan, Pengkol, Jobokuto, Ujungbatu, Kauman, Bulu, Deman, Kuwasen, Mulyoharjo, Wonorejo, Bandengan, dan Kedungcino.

5. Kecamatan Kalinyamatan terdiri atas 12 kelurahan/desa, yaitu Bakalan, Bandungrejo, Banyuputih, Batukali, Damarjati, Kriyan, Manyargading, Margoyoso, Pendosawalan, Purwogondo, Robayan, dan Sendang.
6. Kecamatan Karimunjava terdiri 3 kelurahan/desa Karimunjava, Kemojan, dan Parang.
7. Kecamatan Kedung terdiri atas 18 kelurahan/desa, yaitu Bugel, Bulakbaru, Dongos, Jondang, Kalianyar, Karangaji, Kedungmalang, Kerso, Menganti, Panggung, Rau, Sowan Kidul, Sowan Lor, Sukosono, Surodadi Tanggultlare, Tedunan, dan Wanusobo.
8. Kecamatan Keling terdiri atas 12 desa/kelurahan Bumiharjo, Damarwulan, Gelang, Jlegong, Kaligarang, Kelet, Keling, Klepu, Kunir, Tempur, Tunahan, dan Watuaji.
9. Kecamatan Kembang terdiri atas 11 kelurahan/desa, yaitu Balong, Bucu, Cepogo, Dermolo, Dudakawu, Jinggotan, Kaliaman, Kancilan, Pendem, Sumanding, dan Tubanan.
10. Kecamatan Mayong terdiri atas 18 kelurahan/desa, yaitu Bandung, Buaran, Bungu, Datar, Jebol, Kuanyar, Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pancur, Paren, Pelang, Pelemkerep, Pule, Rajekwesi, Sengonbugel, Singorojo, dan Tigajuru.
11. Kecamatan Mlonggo terdiri atas 8 kelurahan/desa, yaitu Jambu, Jambu Timur, Karanggondang, Mororejo, Sekuro, Sinanggul, Srobyong, dan Suwawal.

12. Kecamatan Nalumsari yang terdiri atas 15 kelurahan/desa, yaitu Bategede, Bendanpete, Blimbingrejo, Daren, Dorang, Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Jatisari, Karangnongko, Muryolobo, Nalumsari, Ngetuk, Pringtulis, Tritis, dan Tunggulpandean.
13. Kecamatan Pakis Aji yang terdiri atas 8 kelurahan/desa, yaitu Bulungan, Kawak, Lebak, Mambak, Plajan, Slagi, Suwawal Timur, dan Tanjung.
14. Kecamatan Pecangaan terdiri atas 12 kelurahan/desa, yaitu Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak, Lebuawu, Ngeling, Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging, dan Troso.
15. Kecamatan Tahunan terdiri atas 15 desa/kelurahan, yaitu Krapyak, Mantingan, Demangan, Mangunan, Petekeyan, Platar, Semat, Langon, Sukodono, Senenan, Tegalsambi, Telukawur, Ngabul, Kecapi, dan Tahunan.
16. Kecamatan Welahan yang terdiri atas 16 kelurahan/desa, yaitu Brantaksekarjati, Bugo, Gedangan, Gidangelo, Guwosobokerto, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, Karanganyar, Kedungsarimulyo, Kendengsidialit, Ketilengsingolelo, Sidigede, Telukwetan, Ujungpandan, dan Welahan.

Desa yang berjumlah 184 tersebut mempunyai kriteria desa menurut Indeks Desa Membangun sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kriteria IDM Kabupaten Jepara tahun 2015 – 2018

Tahun	Sangat Tertinggal		Tertinggal		Berkembang		Maju		Mandiri		Jumlah
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
2015	4	0,05%	31	16,85%	114	61,96%	34	18,48%	1	0,54%	184
2018	2	0,03%	27	14,67%	131	71,20%	23	12,50%	1	0,54%	184

Sumber : Kementerian Desa dan PDT, 2014 dan 2018

Catatan : Data Lengkap Terlampir

Data tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam data tahun 2015 dan 2018. Desa sangat tertinggal dan tertinggal menurun sementara desa berkembang meningkat hampir 10%, namun terdapat sedikit anomali, yaitu penurunan jumlah status desa maju sebesar 6%, sementara tidak ada penambahan dalam desa mandiri sehingga perlu adanya penelitian secara lebih detail mengapa terjadi penurunan seperti itu. Bahkan ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata terdapat beberapa penurunan status pada desa yang berkembang menjadi tertinggal meskipun terjadi juga perubahan pada desa yang tertinggal menjadi berkembang. Perubahan status IDM tersebut terlampir dan akan ditandai dengan warna berbeda. Secara detail perubahan IDM di Kabupaten Jepara akan ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4. Perubahan Status IDM Kabupaten Jepara

No.	Dimensi	Rata-Rata Skor Indikator IDM Kabupaten	
		Tahun 2015	Tahun 2018
1.	Ketahanan Sosial	0,70161	0,6304
2.	Ketahanan Ekonomi	0,58606	0,6033
3.	Ketahanan Ekologi	0,66957	0,7157

Sumber : Data Kabupaten 2015-2018 diolah

Perubahan status IDM di Kabupaten Jepara secara total disebabkan oleh peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan namun terjadi penurunan pada Indeks Ketahanan Sosial.

A.3. Perubahan Status di Desa Sasaran

Pada penelitian ini akan dipilih 5 desa sesuai dengan kriteria IDM. Pemilihan Sampel Desa berdasarkan pada status desa sesuai dengan Indeks Desa Membangun. Desa yang dijadikan sebagai sampel dalam kegiatan kajian kemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan
2. Desa Tertinggal Desa Pancur Kecamatan Mayong
3. Desa Berkembang Desa Krimunjawa Kecamatan Karimunjawa
4. Desa Maju Desa Tanjung Kecamatan Pakis Saji
5. Desa Mandiri Desa Kelet Kecamatan Keling

Data tahun 2015 dan 2018 menunjukkan terjadinya perubahan status pada desa sampel antara tahun 2015 dan tahun 2018, terdapat dua desa dengan status naik, satu desa dengan status tetap dan dua desa dengan status menurun. Perubahan status IDM menurun indeks gabungan kelima desa tersebut sebagaimana Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perubahan status IDM lima desa sampel

No.	Dimensi	Rata-Rata Skor Indikator IDM Desa Sampel	
		Tahun 2015	Tahun 2018
1.	Ketahanan Sosial	0,7200	0,7246
	Sarana Kesehatan	3,5750	4,3600
	Sarana Pendidikan	3,7750	2,9429
	Modal Sosial	3,5000	4,0667
	Permukiman	3,8000	4,4500
2.	Ketahanan Ekonomi	0,617s7	0,6567
	Keragaman Produksi	3,8000	4,2000
	Pusat layanan perdagangan	2,4500	3,4000
	Akses distribusi logistik	1,3000	1,6000
	Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	2,1000	2,1000
	Lembaga ekonomi	3,6000	3,5000
	Keterbukaan wilayah	3,5200	3,1330
3.	Ketahanan Ekologi	0,6533	0,6667
	Kualitas Lingkungan	0,7143	4,0000
	Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana	0,4727	2,6000

Sumber : Data IDM Desa Sampel 2015-2018

Data tersebut menunjukkan bahwa semua Indeks mengalami peningkatan meskipun tipis. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan status dua desa, yaitu Desa Gemulung dan Desa Pancur, namun ternyata kenaikan status desa yang lain, yaitu Desa Tanjung dan Desa Kelet mampu menarik skor. IDM pada desa sampel secara keseluruhan.

Indeks sangat variatif untuk masing-masing desa, Desa Kelet menunjukkan peningkatan yang sempurna untuk indeks ketahanan ekonomi, namun indeks ketahanan sosial mengalami penurunan. Desa Tanjung mengalami peningkatan pada semua indeks meskipun peningkatannya tipis, namun menyebabkan kenaikan status dari berkembang menjadi maju. Karimunjawa mengalami peningkatan untuk IKL dan IKE namun IKS menurun sehingga menyebabkannya tetap pada status berkembang. Pancir mengalami peningkatan pada IKL namun penurunan pada IKE dan IKS. Sementara Desa Gemulung mengalami penurunan pada IKL sangat tajam dan IKE, sementara IKS meningkat tipis sehingga menyebabkan terjadinya penurunan sampai dua tingkat.

Perubahan indikator dan status pada masing-masing desa sampel secara detail bisa ditunjukkan pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6. Perubahan Status Indeks Desa Membangun pada Desa sampel

DESA	TAHUN 2015						TAHUN 2018					
	IKL	IKE	IKS	IDM	STATUS	IKL	IKE	IKS	IDM	STATUS		
Kelet	0,6667	0,8481	0,7923	0,7690	Maju	0,8343	1,0000	0,6667	0,8337	Mandiri		
Tanjung	0,6667	0,5570	0,7315	0,6517	Berkembang	0,7200	0,6000	0,8667	0,7289	Maju		
Karimunjawa	0,6667	0,5823	0,7500	0,6663	Berkembang	0,6800	0,7500	0,6667	0,6989	Berkembang		
Pancur	0,6000	0,5823	0,6696	0,6173	Berkembang	0,6686	0,4333	0,6667	0,5895	Tertinggal		
Gemulung	0,6667	0,5190	0,6568	0,6142	Berkembang	0,2000	0,5000	0,7200	0,4733	Sangat Tertinggal		

Sumber : *Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018*

B. Dinamika Perubahan Status Desa

B.1. Dinamika Perubahan Secara Umum

Perubahan status desa dalam IDM di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan data perubahan status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah Desa Maju dengan status tetap berjumlah 0,52%; Desa Maju dengan status telah meningkat menjadi 0,52%; Desa Berkembang dengan status tetap 43,23%. Desa Berkembang 8,17%, Desa Tertinggal dengan status tetap sebanyak 10,50%, Desa Tertinggal dengan status meningkat berkembang/maju sebesar 23,05%. Desa Tertinggal dengan status tetap 0,03%, Desa Sangat Tertinggal dengan status meningkat menjadi Desa Tertinggal atau berkembang sebesar 0,62%.

Dinamika menunjukkan, ternyata perubahan yang terjadi pada masing-masing desa sangat dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing desa. Selain itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain kebijakan pemerintah lain yang seharusnya berjalan seiring namun belum bisa disinergikan dengan dana desa. Kebijakan dan program kerja pemerintah daerah melalui organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU dan lainnya belum berjalan sinkron dengan prioritas pembangunan di desa.

Survei menunjukkan bahwa perubahan status desa, baik peningkatan status maupun penurunan status terhadap lima desa dengan karakteristik yang berbeda-beda, namun memiliki beberapa hasil yang bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan status indeks ketahanan sosial disebabkan oleh:
 - a. Kebijakan pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan, yaitu BPJS, pemerataan fasilitas kebutuhan dasar, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan. Peningkatan aksesibilitas, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih aman dan nyaman. Beberapa desa menggunakan dana infrastruktur untuk membangun lapangan selain bisa digunakan sebagai ruang publik juga bisa digunakan sebagai bagian dari usaha BUMDes dengan menyewakan gedung olah raga yang sudah dibangun untuk digunakan kepentingan masyarakat.
 - b. Pembangunan perpustakaan dengan segala kelengkapannya ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat dan juga peningkatan pendidikan baik secara formal maupun informal. Fasilitas ini pada beberapa desa diikuti dengan fasilitas digital dan multimedia sehingga mendorong masyarakat untuk berpikir dan bertindak inovatif
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memiliki margin tertentu, pada masyarakat dengan tingkat

kesejahteraan atau ekonomi yang lebih baik maka modal sosial akan bertambah karena kesadaran akan gotong royong meningkat. Sedangkan pada masyarakat yang tingkat ekonominya relatif rendah, maka kenaikan ekonomi justru mengurangi kesadaran akan kerja sama dan gotong royong.

- d. Kearifan lokal masyarakat akan mendorong upaya peningkatan efektifitas pemanfaatan dana desa sebagai contoh di Desa Tanjung, terjadi peningkatan pengerjaan jalan yang direncanakan 600 m dengan dana desa ternyata menjadi 800 m karena adanya gotong royong dan swadaya masyarakat.
 - e. Karakteristik masyarakat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Pada masyarakat pesisir, tingkat partisipasi nelayan cenderung rendah dibandingkan dengan masyarakat pegunungan.
2. Perubahan indeks ketahanan ekonomi disebabkan oleh:
- a. Peningkatan infrastruktur yang dibangun dengan dana desa meningkatkan akses dan pembukaan jalan bagi desa terpencil (*remote area*) menyebabkan waktu tempuh lebih singkat, memudahkan menjangkau lokasi dan jalur distribusi sehingga mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok.
 - b. Perubahan struktur ekonomi, peningkatan aksesibilitas akan menyebabkan berkembangnya peluang potensi baru di daerah perdesaan untuk dikembangkan.

Desa yang semula hanya mengandalkan ekonomi dari bahan mentah akan mempunyai kesempatan mengembangkannya menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi yang akan mempunyai nilai ekonomi tinggi melalui agroindustri dan agrobisnis.

- c. Peningkatan fasilitas informasi dan komunikasi, akan membuka wawasan bagi masyarakat desa, khususnya dalam pengembangan inovasi-inovasi baru dengan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi)
- d. Jejaring kerja sama dari aspek i) Peningkatan kualitas produk melalui pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat; ii) Permodalan dengan pengembangan jejaring kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan non bank; iii) Pengembangan pemasaran

Perubahan status lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

1. Kondisi alam yang menyebabkan terjadinya kerawanan bencana alam, langkah yang telah dilakukan adalah pembangunan talud dan penahan longsor sehingga mengurangi dampak kerawanan bencana, peningkatan kebersihan lingkungan khususnya sungai untuk mengurangi dampak banjir ketika musim hujan tiba.
2. Polusi merupakan salah satu masalah utama dalam lingkungan, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Yakni: a) Faktor eksternal misalnya dengan

adanya pabrik-pabrik yang mulai masuk ke daerah perdesaaan dan membawa dampak polusi lingkungan, peran pemerintah khususnya dalam perizinan, pengecekan ambang batas dan mitigasi menjadi sangat penting. b) Faktor internal disebabkan karena usaha yang dilakukan oleh masyarakat khususnya *home industry*, kesadaran masyarakat akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih rendah dan kurangnya fasilitas MCK. Penanganan kasus internal ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna, pengembangan pusat pengelolaan limbah masyarakat. Kasus ini terjadi di Desa Gemulung yang menyebabkan penurunan aspek lingkungan.

B.2. Perubahan Status Tiap Desa Sampel

Perubahan status tersebut mengundang pertanyaan tentang bagaimana pemanfaatan dana desa selama tiga tahun ini mengapa justru menyebabkan terjadinya penurunan status, bahkan pada Desa Gemulung penurunan status dua tingkat. Sub bab dinamika perubahan status ini akan membahas beberapa alasan terjadinya perubahan yang signifikan pada masing-masing desa sampel secara terinci.

B.2.1. Desa Gemulung

Desa Gemulung berada di Kecamatan Pecangaan Jepara, dengan luas wilayah 239,45 km². Jumlah total penduduk 3.908 dengan penduduk laki-laki 1947 jiwa dan penduduk perempuan 1961 jiwa. Secara administratif, Desa Gemulung berbatasan langsung dengan Desa Damarjati di sebelah timur, Desa Banyuputih di sebelah selatan, Desa Lebuawu di barat daya, Desa Pulodarat di sebelah barat, dan Desa Rengging di sebelah utara, yang kesemuanya termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Mata pencaharian utama adalah pada sektor pertanian dengan jumlah petani laki-laki sebanyak 112 dan petani perempuan 75, sedangkan buruh tani laki-laki sebanyak 255 dan buruh tani perempuan sebanyak 103 jiwa. Mata pencaharian utama yang kedua adalah pada sektor industri dengan jumlah buruh pabrik laki-laki sebanyak 152 jiwa dan buruh perempuan sebanyak 372 jiwa. Selanjutnya jumlah PNS adalah 24 orang baik laki-laki maupun perempuan, pegawai swasta adalah sebanyak 44 orang dan wirausaha sebanyak 54 jiwa terdiri atas 18 laki-laki dan 36 perempuan. Pekerja lainnya sebanyak 102 jiwa.

Desa Gemulung tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian masyarakatnya. Berbagai macam Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) telah banyak berkembang di desa yang terkenal akan produksi gula merah dan pertanian tebu ini, khususnya di wilayah Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Sektor pertanian tetap menjadi sektor penting

bagi sebagian besar masyarakat Desa Gemulung, namun adanya berbagai macam UKM ini tidak dapat dipungkiri telah berhasil menggeliatkan kembali roda perekonomian masyarakat Desa Gemulung, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertanian tebu yang panen hanya sekali dalam satu tahun.

Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) pengrajin perhiasan monel, pembuatan kerudung muslimah, peternak ayam dan ikan lele, serta pembuat makanan ringan tradisional, seperti rengginang dan kerupuk singkong merupakan beberapa macam UKM yang tengah berkembang di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ini.

Desa Gemulung mempunyai potensi desa berupa desa wisata Waduk Punden/Sendang Kamulyan. Waduk Punden Gemulung Jepara adalah bendungan yang semula digunakan untuk mengairi sawah di Desa Gemulung dan sekitarnya. Di waduk ini, udaranya cukup sejuk, karena dikelilingi oleh banyak pohon besar dan rindang. Selain disebut Waduk Punden, juga dinamakan Sendang Kamulyan, karena dengan adanya bendungan tersebut, petani di sekitar waduk ini bisa merasakan kemulyaan dengan adanya irigasi ke sawah mereka. Bendungan irigasi ini dibangun sekitar tahun 1955, awalnya hanya sebatas muara kecil, hingga pada tahun 1971 dapat alokasi inpres sebesar 2,5 juta lalu dibuat permanen dengan pintu air. Waduk permanen Gemulung ini masuk dalam harta benda Pemerintah Desa Gemulung yang pengelolaanya ditangani oleh Karang Taruna.



Gambar 2.2. Potensi Wisata Desa Gemulung

Perkembangan desa dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang bagus, namun untuk Desa Gemulung kondisinya justru menunjukkan penurunan, IDM yang semula berada pada Desa Berkembang menurun dua tingkat berada pada posisi Sangat Tertinggal. Secara detail kondisi penurunan di Desa Gemulung ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 IDM Gemulung 2015 - 2018

Desa Gemulung	2015	2018
Indeks Ketahanan Sosial	0,6568	0,7200
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,5190	0,5000
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6667	0,2000
Indeks Desa Membangun	0,6142	0,4733
STATUS	Berkembang	Sangat Tertinggal

Sumber : Data Dinsos Permales Jepara, 2018

Penurunan yang terjadi pada dua indeks, yaitu ketahanan lingkungan dan ketahanan ekonomi dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketahanan sosial yang terdiri atas sarana kesehatan, sarana pendidikan, modal sosial dan permukiman mengalami peningkatan.

- a. Sarana kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dan jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan waktu tempuh ke prasarana kesehatan karena akses jalan menuju lokasi sudah mulai rusak, sehingga sedikit menghambat perjalanan, tenaga kesehatan, khususnya medis perlu ada tambahan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat yang terdiri atas akses ke poskesdes dan polindes, akses ke posyandu dan tingkat aktivitas posyandu cukup baik dan sarana prasarana memadai sehingga meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan. Jaminan kesehatan meningkat ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota BPJS.
- b. Sarana pendidikan terdiri atas akses ke sarana pendidikan dasar dan menengah dan akses ke taman bacaan. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan akses karena sedang terjadi perbaikan di infrastruktur jalan sehingga sedikit menghambat akses menuju sekolah. Akses pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan PKBM meningkat karena pemerintah menyediakan fasilitas untuk kejar paket dan pelatihan. Taman bacaan sebagai sarana menuju pengetahuan juga meningkat.
- c. Modal sosial yang terdiri atas solidaritas sosial dan kesejahteraan sosial meningkat karena kebiasaan masyarakat untuk melakukan gotong royong,

keberadaan ruang publik terbuka yang tidak berbayar meningkat, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga sudah dibangun lapangan sehingga meningkatkan modal sosial, terdapat kelompok kegiatan olahraga, keberagaman etnis masyarakat meningkat, namun sebagian warga masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, partisipasi masyarakat dan tingkat terjadinya konflik juga tetap. Kesadaran warga akan keamanan yang ditunjukkan dengan pembangunan pos kamling dan aktivitas ronda sehari-hari. Tingkat konflik yang terjadi di desa dan upaya penilaiannya tetap.

d. Sarana permukiman

Sarana permukiman yang terdiri atas akses ke air bersih, dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses informasi dan komunikasi.

Kondisi di Desa Gemulung menunjukkan bahwa semua kondisi sudah bagus, hanya untuk kebersihan lingkungan khususnya pembuangan sampah dan limbah mengalami penurunan.

2. Ketahanan ekonomi

- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk menunjukkan bahwa Gemulung kegiatan ekonominya masih terbatas tidak mengalami perubahan sehingga memiliki nilai yang menurun, dibutuhkan adanya kreativitas masyarakat untuk meningkatkan keragaman ekonomi.

- b. Indikator kedua, yaitu tersedianya pusat pelayanan perdagangan menunjukkan bahwa (i) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) masih kurang karena infrastruktur jalan dan jaraknya yang relatif jauh dengan beberapa dusun; (ii) Indikator sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha berupa warung kelontong di beberapa titik; dan (iii) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan terdapat dukungan pemerintah untuk mengembangkan usaha kuliner.
- c. Akses distribusi/logistik belum dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak banyak ditemui.
- d. Di Desa Gemulung kebutuhan untuk sarana keuangan seperti bank BPR dan lembaga keuangan lainnya belum begitu dibutuhkan sehingga indikator ini tidak memiliki nilai yang tinggi.
- e. Terdapat lembaga ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) di Desa Gemulung yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
- f. Kondisi di Desa Gemulung menunjukkan bahwa keterbukaan wilayah, yang ditunjukkan dengan indikator: (i) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); menunjukkan peningkatan (ii) namun untuk jalan yang menghubungkan antar desa

sudah mulai mengalami kerusakan karena aspal yang ada mulai menipis.

3. Indeks Ketahanan Ekologi juga terdiri atas dimensi ekologi dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Desa Gemulung dalam masalah kualitas lingkungan mengalami penurunan karena terdapat limbah yang mencemari sungai
 - b. Di Desa Gemulung Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator: (i) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan (ii) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) ditanggapi dengan pembangunan talud penahan longsor.

Hasil Tinjauan Lapangan

Desa Gemulung mempunyai letak yang sangat strategis dekat dengan kota Kabupaten Jepara, akses yang dimiliki oleh desa sudah baik di mana jalan-jalan desa yang sudah dalam bentuk cor sehingga memudahkan aksesibilitas masyarakat. Akses menuju sarana kesehatan dan pendidikan pun relatif sudah mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada Desa Gemulung mulai tumbuh beberapa industri besar salah satunya adalah pabrik sepatu Adidas yang juga mendukung perekonomian masyarakat dan juga secara sosial masyarakat desa masih terus membudayakan gotong royong dalam membangun desa.

Namun Status IDM Desa Gemulung menurun drastis, setelah dilakukan pengecekan lapangan ternyata penurunan utama adalah pada indikator sosial. Secara umum IDM Desa Gemulung menurun dari tahun 2015 sebesar 0,6142 kemudian menjadi 0,4733 pada tahun 2018. Penurunan status indeks adalah IKE menurun tipis dari 0,5190 menjadi 0,500, IKE meningkat dari 0,6568 menjadi 0,7200. IKL justru menunjukkan penurunan yang drastis dari 0,6667 menjadi 0,2000, sehingga membuat terjadinya penurunan IDM tersebut.

Penyebab turunnya IDM adalah penurunan pada Indeks Ketahanan Lingkungan kemudian pada Indeks Ketahanan Ekonomi baru Indeks Ketahanan Sosial yang mengalami peningkatan. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi dari pertanian menjadi industri yang disebabkan oleh muncul pabrik Adidas di Gemulung. Permasalahan yang teramati di lapangan tentang penyebab menurunnya IDM adalah sebagai berikut

- a. Pengelolaan limbah pabrik yang kurang baik, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan lahan maupun sawah warga di sekitar pabrik tersebut menjadi rusak dan menyebabkan kerusakan pada tanaman berada di sekitar pabrik dan menyebabkan hasil panen tidak maksimal, ada juga yang menyebabkan gagal panen.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam budaya hidup sehat dan bersih. Masih banyak warga yang buang air besar sembarangan.

- c. Limbah ternak warga yang masih dibuang sembarangan dan belum bisa mengolahnya/membuangnya dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap desanya sendiri, hubungan warga dan pemerintah yang kurang baik, sehingga menyebabkan warga tidak mempunyai kesempatan dalam berinovasi.
- e. Tidak terbukanya pemerintah desa dengan masyarakat sekitar mengenai penggunaan dana desa. Sehingga banyak masyarakat kurang tahu dana desa tersebut digunakan tidak.
- f. SDM masyarakat yang rata-rata memperoleh pendidikan hanya sampai SLTP dan SLTA. Hal tersebut menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat kurang sehingga sulit melakukan inovasi-inovasi baru untuk memajukan masyarakat desa.

B.2.2. Desa Pancur

Desa Pancur berada di sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Jepara. Desa Pancur merupakan salah satu desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 12 km, dan ke ibu kota kabupaten 20 km/mil laut, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 30 menit. Desa ini berbatasan dengan Desa Raguklampitan dan Desa Rajekwesi di sebelah barat, disebelah utara berbatasan dengan Desa Sumosari sebelah selatan dengan Desa Datar dan Desa Ngroto dan di

sebelah timur dengan Desa Bungu dan Desa Bandung. Luas wilayah daratan Desa Pancur adalah 1.088 Ha (10,88 Km²). Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Secara administratif, wilayah Desa Pancur terdiri dari 56 RT, dan 11 RW, meliputi 5 dukuh. Secara topografi, Desa Pancur dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah daratan rendah di bagian selatan, wilayah dataran tinggi di bagian utara.

Menurut data administrasi Pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 11.245 jiwa tahun 2015 meningkat menjadi 11.292 di tahun 2016. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.468 jiwa di tahun 2015, meningkat menjadi 5.587 jiwa di tahun 2016. Sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 5.777 jiwa di tahun 2015, meningkat menjadi 5.705 jiwa di tahun 2015.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Pancur ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani, PNS/TNI/ Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak.

Desa Pancur berpotensi sebagai “Desa Wisata” karena Desa Pancur memiliki pemandangan yang indah, pemandangan hutan, persawahan, dan hawanya sejuk. Apabila warga Pancur bersama-sama Pemerintah Desa Pancur berswadaya membangun

pendukung sebagai desa wisata di antaranya gardu pandang, gazebo, outbound, agrowisata kebun buah, kebun binatang mini/taman safari mini, dll. Wisata Alam yang ada di Desa Pancur, di antaranya Sendang Pancuran yang letaknya ada di dukuh Tamansari. Wisata Religi yang ada di Desa Pancur, di antaranya Masjid Wali Kenduren di dukuh tamansari, Makam Mbah Abdul Ghonidi Dukuh Tamansari, Makam Mbah Merto di dukuh Sukorejo, Makam Mbah Ronggo Jiwo di dukuh Sukorejo, Makam Syeh Baladah di Dukuh Tamansari, Makam Mbah Haji Hasan Kafrawi di Dukuh Tamansari, Petilasan Empu Supo di dukuh Tamansari. Sedangkan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pancur untuk mendukung pariwisata, antara lain perayaan *adus cendol* (mandi cendol), setiap musim kemarau panjang warga Desa Pancur mengadakan upacara Adus Cendol di daerah kali Randobango Pancur, agar pada musim kemarau diberi hujan. Dalam perjalanan spiritual berikutnya adalah mengingat bahwa hanya kepada Allah tempat kita mohon perlindungan, pertolongan dan tempat kembali, Kirab Budaya Sedekah Bumi, Festival 1 Syawal, Grebek Suro (Mandi Suci Sendang Pancuran).



Gambar 2.3. Potensi Wisata Desa Gemulung

Perkembangan utama saat ini diarahkan pada desa, sehingga diharapkan akan menunjukkan peningkatan, namun kondisi di Desa Pancur justru mengalami penurunan satu derajat sehingga pada tahun 2015 berada di posisi berkembang, tahun 2018 berada pada posisi tertinggal. Secara detail kondisi penurunan di Desa Pancur ditunjukkan pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Perubahan status IDM desa Pancur 2015-2018

Kriteria	2015	2018
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6000	0,6686
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,5823	0,4333
Indeks Ketahanan Sosial	0,6696	0,6667
IDM	0,6173	0,5895
Status	Berkembang	Tertinggal

Sumber : Data Bapermades Kabupaten Jepara

Penurunan disebabkan oleh Indeks Ketahanan Ekonomi, yaitu menurun hampir 0,15, Indeks Ketahanan Lingkungan naik tipis sebesar 0,06 sedangkan Indeks Ketahanan Sosial menurun tipis 0,002. Penurunan Desa Pancur bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketahanan sosial yang terdiri atas sarana kesehatan, sarana pendidikan, modal sosial dan permukiman mengalami peningkatan.
 - a. Sarana kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dan jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan waktu tempuh ke prasarana kesehatan karena akses jalan menuju lokasi yang sudah mulai rusak, sehingga sedikit menghambat perjalanan, tenaga kesehatan khususnya medis terdapat tambahan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat yang terdiri atas akses ke poskesdes dan polindes, akses ke posyandu dan tingkat aktivitas posyandu cukup baik dan sarana prasarana memadai sehingga meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan. Jaminan kesehatan belum banyak dimengerti oleh masyarakat sehingga kepesertaannya masih rendah
 - b. Sarana pendidikan terdiri atas akses ke sarana pendidikan dasar dan menengah dan akses ke taman bacaan. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan akses karena

sedang terjadi perbaikan di infrastruktur jalan sehingga sedikit menghambat akses menuju sekolah. Akses pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan PKBM meningkat karena pemerintah menyediakan fasilitas untuk kejar paket dan pelatihan. Taman bacaan sebagai sarana menuju pengetahuan juga meningkat.

- c. Modal sosial yang terdiri atas solidaritas sosial dan kesejahteraan sosial meningkat karena kebiasaan masyarakat untuk melakukan gotong royong, adanya dana desa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan mendorong masyarakat untuk lebih meningkat dalam akses pertemuan dan kerja samanya. Pembangunan taman cerdas yang juga merupakan swadaya masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat. Taman bacaan ini juga menjadi salah satu pendukung keberadaan ruang publik terbuka yang tidak berbayar meningkat, ketersediaan fasilitas atau lapangan olah raga sudah dibangun lapangan sehingga meningkatkan modal sosial, terdapat kelompok kegiatan olahraga, keberagaman etnis masyarakat meningkat, namun sebagian warga masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, partisipasi masyarakat dan tingkat terjadinya konflik juga tetap. Kesadaran warga akan keamanan yang ditunjukkan dengan pembangunan pos kamling dan aktivitas ronda sehari-hari. Tingkat konflik yang terjadi di desa dan upaya penilaiannya tetap. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lain

ditunjukkan dengan adanya pembangunan sekolah luar biasa sehingga memberikan akses pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.

d. Sarana permukiman

Sarana permukiman yang terdiri atas akses ke air bersih, dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik serta akses informasi dan komunikasi

Kondisi di Desa Pancur menunjukkan bahwa terjadi sedikit kekurangan air karena sumber air terbatas sementara jumlah penduduk meningkat. Fasilitas komunikasi juga sudah baik.

2. Ketahanan Ekonomi

- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk menunjukkan bahwa Desa Pancur kegiatan ekonominya masih terbatas tidak mengalami perubahan sehingga memiliki nilai yang menurun, dibutuhkan adanya kreativitas masyarakat untuk meningkatkan keragaman ekonomi.
- b. Indikator kedua, yaitu tersedianya pusat pelayanan perdagangan menunjukkan adanya gangguan karena infrastruktur jalan yang masih dalam proses pembangunan bahwa (i) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) masih kurang karena infrastruktur jalan dan jaraknya yang relatif jauh dengan beberapa dusun; (ii)

Indikator sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha berupa warung kelonting di beberapa titik ; dan (iii) Di Desa Pancur tidak terdapat restoran, hotel dan penginapan karena tidak ada orang yang datang berkunjung.

- c. Akses distribusi/logistik belum dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak banyak ditemui.
- d. Di Desa Pancur kebutuhan untuk sarana keuangan seperti bank, BPR dan lembaga keuangan lainnya belum begitu dibutuhkan sehingga indikator ini tidak memiliki nilai yang tinggi. Dalam kredit yang menggunakan dana desa terdapat penurunan karena dana difokuskan pada pendirian BUMDes.
- e. Terdapat lembaga ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) di Desa Pancur yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
- f. Kondisi di Desa Pancur menunjukkan bahwa keterbukaan wilayah, yang ditunjukkan dengan indikator: (i) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); menunjukkan peningkatan (ii) namun untuk jalan yang menghubungkan antar desa saat ini sedang terdapat kendala karena pembangunan sehingga aksesnya menjadi terbatas.

3. Indeks Ketahanan Ekologi juga terdiri atas dimensi ekologi terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Desa Pancur mengalami sedikit masalah dengan kualitas lingkungan khususnya ketersediaan air bersih karena terjadi kontaminasi dengan tanah sehingga mengalami perubahan warna.
 - b. Di Desa Pancur mempunyai potensi rawan bencana khususnya longsor, dan beberapa kejadian bencana alam lain (banjir, kebakaran hutan). dan (ii) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) ditanggapi dengan pembangunan talud penahan longsor.

Hasil Pengamatan Lapangan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dalam rangka

memajukan pendidikan, Desa Pancur akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Jepara.

Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW. Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa, antara lain:

- a. Perawatan jalan protokol desa yang sudah beraspal sepanjang 16 km.
- b. Jalan tembus antara Dukuh Bomo dengan dukuh Tamansari dan Jembatan kali putu
- c. Pengaspalan jalan dan pembangunan rabat beton jalan gang kurang lebih 12,6 km
- d. Jembatan Kedung Lenteng dan Jalan penghubung antara Desa Pancur Kecamatan Mayong dengan Desa Bategede Kecamatan Nalumsari.
- e. Jalan tembus antara Desa Pancur Kecamatan Mayong dengan Desa Mosari Kecamatan Batealit
- f. Perawatan dan pembuatan irigasi dan saluran.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di Desa Pancur, telah tersedia pasar desa. Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas Desa Pancur. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Pancur dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Pancur.

Di samping itu, kondisi keberagaman penduduk Desa Pancur mengalami kemajuan. Hal itu dipengaruhi adanya beberapa pemuka agama yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam dan selalu *memelopori* jenis-jenis kegiatan yang dapat mensyiarkan agama Islam. Di samping itu, sarana prasarana peribadatan di Desa Pancur sudah sangat memadai dengan adanya banyak bangunan peribadatan yang berdiri megah dan kokoh sehingga dapat digunakan oleh warga dengan maksimal

B.2.3. Desa Karimunjawa

Desa Karimunjawa terletak di Jepara kepulauan dan merupakan titik terjauh dari ibu kota kabupaten, yaitu sekitar 90 km. Akses menuju kota Jepara dibatasi oleh lautan sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk sampai ke pulau Jawa. Karimunjawa memiliki luas kawasan wilayah sebesar 111.625 ha yang dibagi menjadi tiga kawasan wilayah. Kawasan

wilayah Karimunjawa didominasi oleh perairan. Hampir sembilan puluh sembilan persen kawasan Karimunjawa adalah perairan. Perairan Karimunjawa memiliki potensi berupa keindahan alam dan sumberdaya perikanan. Luas daratan hanya sekitar satu persen dari total kawasan daratan Karimunjawa sebagian besar merupakan hutan mangrove dan tanah merah yang kurang subur. Pulau Karimunjawa dan Kemujan adalah pulau yang memiliki kawasan daratan paling luas dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Karimunjawa. Pulau Karimunjawa dan Kemujan menjadi pulau yang paling banyak dihuni oleh masyarakat.

Karimunjawa mempunyai empat desa, yang berada di sekitar kawasan, yaitu Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang, dan Nyamuk. Berdasarkan data sensus penduduk di Kecamatan Karimunjawa tahun 2016, di Sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa terdapat 9.379 jiwa penduduk. Masyarakat Karimunjawa menjadikan tiga pulau besar di Karimunjawa sebagai tempat tinggal. Pulau Karimunjawa dan Kemujan menjadi pulau yang paling banyak dihuni oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh Pulau Karimunjawa dan Kamujan memiliki luas daratan yang paling luas dibandingkan dengan Pulau Parang yang memungkinkan masyarakat untuk menghuni pulau tersebut. Desa Karimunjawa adalah pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Pulau Karimunjawa. Kondisi ini yang mendukung Desa Karimunjawa menjadi desa yang paling banyak dihuni oleh penduduk Karimunjawa.

Mata pencaharian masyarakat Karimunjawa sangat beragam. Mayoritas masyarakat Karimunjawa bekerja sebagai Nelayan dan pembudidaya ikan. Pekerjaan yang menduduki posisi kedua sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Karimunjawa adalah sebagai petani. Profesi sebagai pegawai negeri dan buruh tani menduduki posisi ketiga dan keempat sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Karimunjawa. Sumber mata pencaharian yang paling sedikit dilakukan oleh masyarakat Karimunjawa adalah dokter.

Taman Nasional Laut Karimunjawa merupakan salah satu kawasan wisata unggulan di tingkat regional maupun internasional. Kawasan wisata ini memiliki keindahan alam bawah laut yang alami/perawan dan sangat menakjubkan dengan aneka jenis terumbu karang yang paling lengkap didunia, biota laut, ikan, karang beraneka warna dan hamparan pasir putih disetiap pulau dari 27 pulau yang ada menjadikan Karimunjawa laksana surga bagi wisatawan yang berkunjung baik manca negara maupun domestik.

Kekayaan flora dan fauna kepulauan Karimunjawa menjadikan kawasan wisata ini begitu mempesona. Terdapat lima kelompok ekosistem flora yang terdiri atas ekosistem terumbu karang, hutan mangrove (adang lamun, hutan pantai, dan hutan dataran rendah). Di sisi lain fauna yang ada di Karimunjawa bervariasi, seperti rusa dan kera ekor panjang maupun fauna akuatik yang terdiratas 242 jenis ikan hias dan 133 *genera akuatik* serta 2 jenis penyu yang hidup dalam ekosistem Taman Laut Nasional Karimunjawa. Di antara

obyek-obyek wisata di Kepulauan Karimunjawa yang memiliki keindahan alam dan kehidupan bawah laut yang menakjubkan adalah sebagai berikut:

1. Pulau Menjangan Besar

Pulau Menjangan Besar merupakan salah satu anak pulau yang letaknya paling dekat dengan pulau Karimunjawa. Di pulau ini terdapat penangkaran Ikan Hiu dan Ikan Baracuda selalu menjadi perhatian para pengunjung yang datang. Konon yang menjadikan Ikan Hiu mendapat perhatian adalah bagian ujung siripnya yang berwarna putih, karena dipercaya pada bagian ini dapat dijadikan sebagai obat kuat atau penambah vitalitas bagi kaum pria. Oleh sebab itu harga seekor Ikan Hiu bisa mencapai jutaan rupiah. Demikian juga dengan Ikan Baracuda, dengan rahangnya yang kuat ikan ini merupakan pemangsa yang menakutkan seperti halnya Ikan Hiu.

Di dekat penangkaran Ikan Hiu dan Baracuda ini terdapat Wisma Apung disediakan bagi mereka yang ingin menginap dan bermalam di atas laut. Tidur, makan, mandi, karaoke semua dilakukan di atas laut karena wisma ini dibangun di atas permukaan laut yang dangkal.

2. Pulau Menjangan Kecil karang yang

Dinamakan Pulau Menjangan Kecil karena letak pulau ini yang berdampingan dengan Pulau Menjangan Besar. Hanya saja ukuran pulau ini lebih kecil daripada

Pulau Menjangan Besar sehingga dinamakan Pulau Menjangan Kecil. Pulau Menjangan Kecil memiliki hamparan pasir putih sangat luas dengan pantai yang dangkal dan barisan pohon kelapa yang melambai-lambai di tepian pantainya. Di sekitar pulau ini juga terdapat terumbu berwarna-warni merupakan surga bagi beraneka jenis binatang laut yang hidup di sana.

4. Pantai Tanjung Gelam

Tanjung Gelam adalah bagian Pulau Karimunjawa tepatnya di bagian sebelah barat, tapi daerah ini lebih mudah dicapai lewat laut daripada lewat darat. Selain memiliki pantai berpasir putih, Tanjung Gelam juga merupakan zona pengembangan Elang Jawa. Di samping karena wilayahnya yang masih asri dan alami, kekayaan ikan laut yang dimiliki sangat mampu menopang kelangsungan hidup Elang.

5. Pulau Menyawakan

Pulau ini terletak di sebelah barat Pulau Karimunjawa berdampingan dengan Pulau Cemara. Pulau Menyawakan ini merupakan tempat penangkaran Kura-Kura atau yang sering disebut Kura-Kura Resort. Di pulau ini juga terdapat *Water Sport Activity* dengan kolam renang yang berukuran cukup besar.

6. Pulau Cemara

Letak Pulau Cemara berada tepat di sebelah barat Pulau Karimunjawa dan di sebelah timur Pulau Menyawakan. Jadi jika pengunjung dari Pulau

Karimunjawa akan menyeberang ke Pulau Menyawakan maka akan melewati Pulau Cemara terlebih dahulu. Di sekitar Pulau Cemara ini terdapat dua pulau kecil yang letaknya berdampingan, yaitu Pulau Taka Bimbang dan Pulau Gosong. Di Pulau Cemara ini terdapat hamparan pasir putih sangat luas dengan pantai yang dangkal.

7. Pantai Kohim

Pantai Kohim terletak di Pulau Kemojan bagian timur, sebelum Bandara Dewadaru Karimunjawa. Pantai ini dapat dijangkau lewat darat maupun lewat laut, akan tetapi lebih mudah dijangkau lewat laut. Di sini kita dapat berenang sepuasnya karena pantainya yang dangkal sampai menjorok ke tengah laut.

Di seberang pantai ini kita dapat melihat gugusan pulau kecil berpasir putih dengan barisan pohon kelapanya. Pulau tersebut oleh penduduk sekitar dinamakan Pulau Cilik. Bagi wisatawan yang datang lewat darat juga dapat mengunjungi pulau ini dengan menggunakan perahu kayu yang disewakan para nelayan di Pantai Kohim.

8. Perkampungan Suku Bugis

Perkampungan Suku Bugis ini terletak di bagian ujung utara Pulau Kemojan, yaitu sesudah Bandara Dewadaru Karimunjawa. Di desa ini pengunjung dapat menemukan bangunan rumah adat Suku Bugis lengkap dengan aksesorisnya.

9. *Trail* Wisata Legon Lele

Merupakan jalur *hiking* di lereng sebelah timur perbukitan Pulau Karimunjawa, memiliki panjang jalur 4.470 meter yang dimulai dari Kampung Jatikerep menuju Pancuran Belakang melalui kawasan hutan dengan waktu tempuh \pm 5 jam. Dari sini wisatawan dapat melihat indahnya pantai dan batu karang yang terhampar mengelilingi Pulau Karimunjawa. Di ujung jalur *hiking* Legon Lele telah didirikan *camping ground* seluas 1 hektar bagi mereka yang hoby ber-*camping*.



Gambar 2.3. Potensi Wisata Karimunjawa

Sebagai desa dengan mata pencaharian nelayan, Desa Karimunjawa cukup bagus karena memiliki pembangunan yang terus meningkat ditunjukkan dengan IDM yang berada pada status berkembang. Desa Karimunjawa mempunyai status yang tetap sama dari tahun 2015 dan tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9 Indeks Desa Membangun di Desa Karimunjawa

Kriteria	2015	2018
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6667	0,6800
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,5823	0,7500
Indeks Ketahanan Sosial	0,7500	0,6667
IDM	0,6663	0,6989
Status	Berkembang	Berkembang

Sumber : Data Bapermades Kabupaten Jepara

Status Desa Karimunjawa tetap karena terjadi penurunan sekaligus peningkatan di beberapa indeks, yaitu disebabkan oleh Indeks Ketahanan Lingkungan meningkat tipis sebesar 0,03, Indeks Ketahanan Ekonomi meningkat tajam, yaitu 0,17, sedangkan indeks ketahanan sosial menurun sebesar 0,09. Secara detail status ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketahanan sosial yang terdiri atas sarana kesehatan, sarana pendidikan, modal sosial dan permukiman mengalami peningkatan.
 - a. Sarana kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan, keberadaan masyarakat untuk kesehatan, dan

jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan waktu tempuh ke prasarana kesehatan karena akses jalan menuju lokasi mulai rusak, sehingga sedikit menghambat perjalanan tenaga kesehatan khususnya medis perlu tambahan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat yang terdiri atas akses ke poskesdes dan polindes, akses ke posyandu dan tingkat aktivitas posyandu cukup baik dan sarana prasarana memadai sehingga meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan. Jaminan kesehatan sudah mengalami peningkatan dengan bertambahnya kepesertaan BPJS.

- b. Sarana pendidikan terdiri atas akses ke sarana pendidikan dasar dan menengah, juga akses ke taman bacaan. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan akses karena sedang terjadi perbaikan infrastruktur jalan sehingga sedikit menghambat akses menuju sekolah. Akses pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan PKBM justru mengalami penurunan karena sebagian masyarakat sudah mendapatkan pendidikan. Taman bacaan sebagai sarana menuju pengetahuan juga meningkat.
- c. Modal sosial yang terdiri atas solidaritas sosial dan kesejahteraan sosial meningkat karena kebiasaan masyarakat untuk melakukan gotong royong, adanya dana desa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan

mendorong masyarakat untuk lebih meningkat dalam akses pertemuan dan kerjasamanya. Pembangunan tempat olahraga karena kegemaran masyarakat untuk berolahraga bisa menjadi salah satu upaya peningkatan keterbukaan rumah publik bagi masyarakat dan meningkatkan modal sosial. Terdapat kelompok kegiatan olahraga, keberagaman etnis masyarakat meningkat, namun sebagian warga masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, partisipasi masyarakat dan tingkat terjadinya konflik juga tetap. Kesadaran warga akan keamanan yang ditunjukkan dengan pembangunan pos kamling dan aktivitas ronda sehari-hari. Tingkat konflik yang terjadi di desa dan upaya penilaiannya tetap. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lain ditunjukkan dengan adanya pembangunan sekolah luar biasa sehingga memberikan akses pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.

d. Sarana permukiman

Sarana permukiman yang terdiri atas akses ke air bersih, dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik serta akses informasi dan komunikasi

Kondisi di Desa Karimunjawa menunjukkan ketersediaan fasilitas air karena sumber air peningkatan fasilitas listrik sehingga bisa 24 jam, namun fasilitas komunikasi masih belum membaik.

2. Ketahanan Ekonomi

- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri atas indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk menunjukkan bahwa Desa Karimunjawa, kegiatan ekonominya masih terbatas karena keterjangkauan akses transportasi. Kondisi ini membutuhkan adanya kreativitas masyarakat untuk meningkatkan keragaman ekonomi.
- b. Indikator kedua, yaitu tersedianya pusat pelayanan perdagangan menunjukkan adanya gangguan karena infrastruktur jalan yang masih dalam proses pembangunan bahwa (i) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) masih kurang karena infrastruktur jalan dan jaraknya yang relatif jauh dengan beberapa dusun; (ii) Indikator sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha berupa warung kelontong di beberapa titik; dan (iii) Di Desa Karimunjawa banyak terdapat restoran, hotel dan penginapan karena merupakan salah satu pariwisata yang sedang berkembang.
- c. Akses distribusi/logistik banyak dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak banyak ditemui
- d. Di Desa Karimunjawa kebutuhan untuk sarana keuangan, seperti bank, BPR, dan lembaga keuangan lainnya belum begitu dibutuhkan sehingga indikator

ini tidak memiliki nilai yang tinggi. Dalam kredit yang menggunakan dana desa terdapat penurunan karena dana difokuskan pada pendirian BUMDes.

- e. Terdapat lembaga ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) di Desa Karimunjawa yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
 - f. Kondisi di Desa Karimunjawa menunjukkan bahwa keterbukaan wilayah, yang ditunjukkan dengan indikator: (i) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); menunjukkan peningkatan (ii) namun untuk jalan yang menghubungkan antar desa saat ini sedang terjadi kendala karena pembangunan sehingga aksesnya menjadi terbatas.
3. Indeks Ketahanan Ekologi terdiri atas perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Desa Karimunjawa mengalami sedikit masalah dengan kualitas lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih karena terjadi kontaminasi dengan tanah sehingga mengalami perubahan warna.
 - b. Di Desa Karimunjawa mempunyai potensi rawan bencana khususnya longsor, dan beberapa kejadian bencana alam lain (banjir, gelombang tinggi). dan (ii) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan

ketersediaan peralatan penanganan bencana) ditanggapi dengan pembangunan talud penahan longsor.

Hasil Pengamatan Lapangan

Wilayah Karimunjawa yang terdiri atas perairan dan daratan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Wilayah perairan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Wilayah daratan Karimunjawa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Jumlah pegawai negeri yang tinggi di Karimunjawa karena merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian. Di Desa Karimunjawa terdapat kantor kecamatan sekaligus kantor desa. Penduduk Karimunjawa sangat beragam, terdiri atas berbagai etnis (suku). Karimunjawa tidak memiliki suku asli. Suku-suku di Karimunjawa berasal dari berbagai suku yang datang ke Pulau Karimunjawa untuk menangkap ikan yang kemudian menetap di Karimunjawa. Keberagaman suku ini tercermin dari masih banyaknya rumah-rumah penduduk yang masih tradisional sesuai dengan tempat asal mereka. Di dalamnya terdapat penduduk dari suku Jawa, Bugis, Makassar, dan Madura. Sedangkan masyarakat Jawa banyak tinggal di Dukuh Karimunjawajawa, Dukuh Legon Lele, Dukuh Nyamplungan, dan Dukuh Marican.

Tingkat pendidikan di Karimunjawa dapat dikatakan masih rendah. Penduduk Karimunjawa sebagian besar merupakan lulusan SD/ sederajat. Hampir setengah dari masyarakat Desa

Karimunjawa merupakan lulusan SD. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel belum ada masyarakat Desa Karimunjawa yang menjadi sarjana. Tingkat pendidikan di Karimunjawa yang rendah karena masih minimnya fasilitas pendidikan di Karimunjawa. Di Desa Karimunjawa belum ada perguruan tinggi. Lulusan SMA di Karimunjawa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi harus pergi ke Jepara atau Semarang. Mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala bagi masyarakat dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Mayoritas masyarakat Karimunjawa bekerja sebagai nelayan sehingga tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Setiap anak di Karimunjawa sudah terbiasa ikut menangkap ikan dengan orang tuanya sehingga tidak dibutuhkan sekolah lebih tinggi untuk menjadi nelayan.

Karimunjawa merupakan wilayah sangat maju untuk pariwisata karena kondisi geografis dan potensi alamnya sangat bagus, terutama untuk *snorkeling* dan potensi pantai. Kondisi ini perlu ditingkatkan secara optimal. Pengembangan yang dilakukan dengan memperhatikan *What to See, What to Do, What to Buy, What to Stay, What to Arrived*. Potensi kepariwisataan dikembangkan dengan langkah-langkah yang baik, antara lain dari aspek promosi melalui media yang murah namun bisa dikembangkan, dan berbagai fasilitas umum di tempat-tempat wisata.

B.2.4. Desa Tanjung

Desa Tanjung secara topografi berada di ketinggian antara 600m sampai 700 DPL, merupakan desa dengan wilayah terluas di Kabupaten Jepara. Luas wilayah desa 17,3 km² dengan kondisi yang bergunung-gunung, dengan jumlah penduduk 6.907 jiwa. Mata pencaharian penduduk terbanyak di sektor pertanian sebanyak 2.844 jiwa, sebagai buruh sebanyak 2.720, wirausaha sebanyak 454 orang.

Desa Tanjung memiliki letak geografis di bagian paling timur di wilayah Kecamatan Pakis Aji, dan luas wilayahnya kurang lebih 17.000 Ha. Kondisi jalan masih banyak yang belum beraspal sehingga perlu kerja keras untuk menyelesaikan pembangunan dengan anggaran yang ada. Namun dengan adanya Dana Desa, banyak membantu pembangunan di Tanjung minimal dalam 2 tahun terakhir 30% dari panjang jalan yang ada sudah tersentuh pembangunan. Maka apresiasi buat pemerintah pusat atas terbinya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 dan semangat masyarakat dalam membangun desa, pemerintahan yang amanah, masyarakat mendukung dan melestarikan sikap gotong royong.

Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung mempunyai mata pencaharian sebagai petani sebanyak 2.351 orang, industri sebanyak 1.495 orang, listrik sebanyak 4 orang, konstruksi sebanyak 49 orang, dan di sektor perdagangan sebanyak 251 orang. Lahan yang di miliki Desa Tanjung sendiri untuk sawah dengan luas 280.937 Ha, dan untuk lahan kering dengan luas

1.450.093 Ha. Sedangkan untuk potensi sumber daya alam meliputi aspek kehutanan, pertanian, perkebunan, dan wisata alam (air terjun dan pemandangan alam).

Desa Tanjung memiliki potensi paling besar di bidang wisata antara lain air terjun Jurang Nganten, air terjun Kalen Wates, dan Kedung Plumpang. Selain potensi tersebut masyarakat sekitar juga memulai untuk pengolahan gula aren, keripik gadung yang nantinya diharapkan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Pembangunan di Desa Tanjung meningkat dari Berkembang menjadi Maju. Secara detail perubahan IDM ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10. Perubahan IDM tahun 2015 dan 2018 di Desa Tanjung

Kriteria	2015	2018
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6667	0,7200
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,5570	0,6000
Indeks Ketahanan Sosial	0,7315	0,8667
IDM	0,6517	0,7289
Status	Berkembang	Maju

Sumber : Data Bapermades Kabupaten Jepara

Status Desa Tanjung mempunyai peningkatan dari desa Berkembang menjadi Maju disebabkan peningkatan di semua indeks. IKL menunjukkan peningkatan sebesar 0,06, IKE menunjukkan peningkatan sebesar 0,03 dan IKS meningkat sebesar 0,13.

Secara detail status ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketahanan sosial yang terdiri atas sarana kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman mengalami peningkatan.
 - a. Sarana kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dan jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan waktu tempuh ke prasarana kesehatan karena akses jalan menuju lokasi mulai rusak, sehingga sedikit menghambat perjalanan, tenaga kesehatan khususnya medis perlu tambahan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat yang terdiri atas akses ke poskesdes dan polindes, akses ke posyandu dan tingkat aktivitas posyandu cukup baik dan sarana prasarana memadai sehingga meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan. Jaminan kesehatan sudah mengalami peningkatan dengan bertambahnya kepesertaan BPJS.
 - b. Sarana pendidikan terdiri atas akses ke sarana pendidikan dasar, menengah, dan akses ke taman bacaan. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan akses karena sedang terjadi perbaikan infrastruktur jalan sehingga sedikit menghambat akses menuju sekolah. Akses pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan PKBM justru mengalami penurunan karena sebagian masyarakat sudah mendapatkan pendidikan.

Taman bacaan sebagai sarana menuju pengetahuan juga meningkat.

- c. Modal sosial yang terdiri atas solidaritas sosial dan kesejahteraan sosial meningkat karena kebiasaan masyarakat untuk melakukan gotong royong. Adanya dana desa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan mendorong masyarakat untuk lebih meningkat dalam akses pertemuan dan kerjasamanya. Pembangunan tempat olahraga karena kegemaran masyarakat untuk berolahraga bisa menjadi salah satu upaya peningkatan keterbukaan rumah publik bagi masyarakat dan meningkatkan modal sosial. Terdapat kelompok kegiatan olahraga, keberagaman etnis masyarakat meningkat, namun sebagian warga masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, partisipasi masyarakat dan tingkat terjadinya konflik juga tetap. Kesadaran warga akan keamanan yang ditunjukkan dengan pembangunan pos kamling dan aktivitas ronda sehari-hari. Tingkat konflik yang terjadi di desa dan upaya penilaiannya tetap. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lain ditunjukkan dengan adanya pembangunan sekolah luar biasa sehingga memberikan akses pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.

- d. Sarana permukiman

Sarana permukiman yang terdiri atas akses ke air bersih, air minum layak, sanitasi, listrik, serta akses informasi dan komunikasi.

Kondisi di Desa Tanjung menunjukkan ketersediaan fasilitas air karena peningkatan fasilitas listrik bisa 24 jam, namun fasilitas komunikasi masih belum membaik.

2. Ketahanan Ekonomi

- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri atas indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk menunjukkan bahwa Desa Tanjung, kegiatan ekonominya masih terbatas karena keterjangkauan akses transportasi. Kondisi ini membutuhkan adanya kreativitas masyarakat untuk meningkatkan keragaman ekonomi.
- b. Indikator kedua, yaitu tersedianya pusat pelayanan perdagangan menunjukkan adanya gangguan karena infrastruktur jalan yang masih dalam proses pembangunan bahwa (i) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) masih kurang karena infrastruktur jalan dan jaraknya yang relatif jauh dengan beberapa dusun; (ii) Indikator sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha berupa warung kelontong di beberapa titik ; dan (iii) Di Desa Tanjung tidak terdapat restoran, hotel, dan penginapan karena merupakan wilayah yang bukan tujuan wisata.
- c. Akses distribusi/logistik banyak dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak banyak ditemui.

- d. Di Desa Tanjung, kebutuhan untuk sarana keuangan, seperti bank, BPR, dan lembaga keuangan lainnya belum begitu dibutuhkan sehingga indikator ini tidak memiliki nilai yang tinggi. Dalam kredit yang menggunakan dana desa terdapat penurunan karena dana difokuskan pada pendirian BUMDes.
 - e. Terdapat lembaga ekonomi, yang terdiri atas indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) di Desa Tanjung yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
 - f. Kondisi di Desa Tanjung menunjukkan bahwa keterbukaan wilayah, yang ditunjukkan dengan indikator: (i) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); menunjukkan peningkatan (ii) namun untuk jalan yang menghubungkan antar desa saat ini ada hambatan karena pembangunan sehingga aksesnya menjadi terbatas.
3. Indeks Ketahanan Ekologi terdiri atas perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Desa Tanjung mengalami sedikit masalah dengan kualitas lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih karena terjadi kontaminasi dengan tanah yang menyebabkan perubahan warna.
 - b. Di Desa Tanjung memiliki potensi rawan bencana, khususnya longsor dan beberapa kejadian bencana alam

lain (banjir, longsor). dan (ii) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) diantisipasi dengan pembangunan talud penahan longsor.

Hasil Pengamatan Lapangan

Daerah Tanjung merupakan daerah pegunungan dengan luas wilayah mencapai 17 km², kondisi ini menyebabkan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung sangat besar. Panjang jalan yang masih dibutuhkan sepanjang 21 km, karena masih banyak wilayah di Desa Tanjung yang belum terjangkau akses transportasi. Perbaikan jalan di Desa Tanjung menyebabkan terjadinya penurunan waktu tempuh dari satu dusun ke dusun lain.

Kearifan lokal yang terjadi di Desa Tanjung adalah gotong royong dalam pembangunan sehingga menurunkan biaya tenaga kerja dan dialihkan menjadi bahan atau material bangunan. Pembangunan jalan meningkat signifikan. Salah satu keunggulan Desa Tanjung adalah petinggi yang kreatif dan menjadikan dana desa sebagai sektor pengungkit dalam pencarian dana untuk pembangunan infrastruktur. Berikut ini merupakan beberapa rangkaian kegiatan pembangunan:



Jalan Rabat beton RT. 17 - 2017



Jalan Aspal RT. 35 - 2017



Senderan RT. 26 – Tahun 2017



Talud Goron-gorong RT. 11 - 2017



Jembatan RT. 02 – On Proses



Jembatan RT. 02 - 100%



PTKD- Pembangunan Jalan Baru Dukuh Celong Desa Tanjung

Gambar 2.4 Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Tanjung

Desa Tanjung merupakan daerah pertanian dan perkebunan dengan sumber daya alam yang sangat bagus, antara lain pohon aren yang diolah menjadi gula aren, kopi, dan wisata air terjun. Semua potensi alam tersebut perlu diolah dengan optimal agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung ada beberapa permasalahan yang menghambat, antara lain:

- Administrasi penyusunan SPJ yang rumit dan sangat banyak.
- Regulasi atau aturan yang terkait dengan desa cukup banyak dan berubah-ubah, khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa secara aturan harus menalangi pendanaan kegiatan terlebih dahulu sehingga memberatkan pemerintah desa.
- Biaya operasional untuk TPK tidak ada, tidak diperbolehkan jadi satu dalam anggaran kegiatan.
- Pencairan dana desa tahun anggaran 2018 sebaiknya pada tahap pertama persentasenya lebih besar dibandingkan tahap III, karena tahap III yang besar (40%) pencairannya terlambat, juga waktunya yang mendekati tahun anggaran.
- Konsep padat karya tunai dapat mengurangi kuantitas dan kualitas kegiatan, karena banyak dana terserap untuk HOK dan tenaga kerja kurang terampil.

B.2.5. Desa Kelet

Desa Kelet merupakan satu-satunya desa yang sudah memiliki status Mandiri di Kabupaten Jepara, dan mengalami peningkatan dari Desa Maju menjadi Mandiri. Luas wilayah Desa Kelet adalah 4,25 m² dengan jumlah penduduk 10.254. Jarak menuju kecamatan berjarak 1,70 km. Mata pencaharian utama penduduk di Desa Kelet adalah petani sebanyak 1594 orang, buruh tani dan buruh nelayan 1.245 jiwa, buruh pabrik sebanyak 466 orang, pegawai swasta sebanyak 969 orang, wirausaha sebanyak 1.112 orang.

Di Desa Kelet terdapat potensi wisata yang baru dirintis oleh Karang Taruna Desa Kelet yang terdiri atas beberapa sub organisasinya, di antaranya Program Sadar Wisata (PRODARWIS). Ada beberapa konsep yang diprogramkan di antaranya dari segi kuliner, wisata, olahraga, dan lain-lain. Sementara yang sudah dibangun, yaitu dari segi kuliner. Ada menu khas perdesaan, yaitu arem, gorengan, kopi. Yang lebih khasnya, yaitu Kopi Tempur dan Es Rolet. Asal nama ROLET sendiri arena rolet berada di perbatasan di antara dua desa, yaitu Desa Klero dan Desa Kele, makanya dinamakan ROLET.



Gambar 2.5. Potensi wisata Desa Kelet

Perubahan status yang terjadi di Desa Kelet pada hampir semua indeks mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi di IKE bahkan memiliki nilai sempurna 1. IKL juga mengalami peningkatan, demikian juga IKS. Secara detail perubahan masing-masing indeks tahun 2015 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Perubahan Indeks Desa Membangun Desa Kelet tahun 2015 - 2018

Kriteria	2015	2018
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6667	0,8343
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,8481	1,0000
Indeks Ketahanan Sosial	0,7923	0,6667
IDM	0,7690	0,8337
Status	Maju	Mandiri

Sumber : Data Bapermades Kabupaten Jepara

Secara detail perubahan Indeks Desa Membangun dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketahanan sosial yang terdiri atas sarana kesehatan, sarana pendidikan, modal sosial dan permukiman mengalami peningkatan:
 - a. Sarana kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan, di Desa Kelet terdapat rumah sakit milik provinsi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan berobat. Ketersediaan dokter, perawat, bidan, dan fasilitas kesehatan membuat nilai indeks kesehatan sangat tinggi. Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dan jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan menunjukkan terjadi penurunan waktu tempuh ke prasarana kesehatan karena akses jalan menuju lokasi yang sudah mulai rusak, sehingga sedikit menghambat perjalanan, tenaga kesehatan, khususnya medis terdapat tambahan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat yang terdiri

atas akses ke poskesdes dan polindes, akses ke posyandu dan tingkat aktivitas posyandu cukup baik dan sarana prasarana memadai sehingga meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan. Jaminan kesehatan sudah mengalami peningkatan dengan bertambahnya kepesertaan BPJS.

- b. Sarana pendidikan sudah cukup maju, yakni terdiri atas akses ke sarana pendidikan dasar dan menengah dan akses ke taman bacaan. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan akses karena sedang terjadi perbaikan di infrastruktur jalan sehingga sedikit menghambat akses menuju sekolah. Akses pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan PKBM juga berkembang dengan bagus. Taman bacaan sebagai sarana menuju pengetahuan juga meningkat.
- c. Modal sosial yang terdiri atas solidaritas sosial dan kesejahteraan sosial meningkat karena kebiasaan masyarakat untuk melakukan gotong royong, adanya dana desa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan mendorong masyarakat untuk lebih meningkat dalam akses pertemuan dan kerja samanya. Pembangunan tempat olahraga karena kegemaran masyarakat untuk berolahraga bisa menjadi salah satu upaya peningkatan keterbukaan rumah publik bagi masyarakat dan meningkatkan modal sosial. BUMDes juga berkembang bagus di Desa Kelet dan mendapatkan banyak dukungan

dari masyarakat. Terdapat kelompok kegiatan olahraga, keberagaman etnis masyarakat meningkat, namun sebagian warga masih menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, partisipasi masyarakat dan tingkat terjadinya konflik juga tetap. Kesadaran warga akan keamanan yang ditunjukkan dengan pembangunan pos kamling dan aktivitas ronda sehari-hari. Tingkat konflik yang terjadi di desa dan upaya penilaiannya tetap. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lain ditunjukkan dengan adanya pembangunan sekolah luar biasa sehingga memberikan akses pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.

d. Sarana permukiman

Sarana permukiman yang terdiri atas akses ke air bersih, dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik serta akses informasi dan komunikasi kondisi di Desa Kelet menunjukkan ketersediaan fasilitas sangat bagus sehingga mendorong kenyamanan masyarakat yang tinggal di sana dengan akses yang mudah.

2. Ketahanan Ekonomi

- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri atas indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk menunjukkan bahwa Desa Kelet merupakan desa yang mandiri dan tingkat ekonomi masyarakat yang bagus. Keberagaman tingkat ekonomi mendorong ekonomi masyarakat berkembang dengan baik.

- b. Indikator kedua, yaitu tersedianya pusat pelayanan perdagangan menunjukkan adanya gangguan karena infrastruktur jalan yang masih dalam proses pembangunan bahwa (i) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) masih kurang karena infrastruktur jalan dan jaraknya yang relatif jauh dengan beberapa dusun; (ii) Indikator sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha berupa warung kelontong di beberapa titik; dan (iii)
- c. Akses distribusi/logistik banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak ditemui di Desa Kelet.
- d. Di Desa Kelet, kebutuhan untuk sarana keuangan, seperti Bank BPR dan lembaga keuangan lainnya banyak ditemui karena berada di jalan provinsi.
- e. Terdapat lembaga ekonomi, yang terdiri atas indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) di atas yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
- f. Kondisi di Desa Kelet menunjukkan bahwa keterbukaan wilayah, yang ditunjukkan dengan indikator: (i) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); menunjukkan peningkatan (ii) namun untuk jalan yang menghubungkan antar desa saat ini sedang ada kendala karena pembangunan sehingga aksesnya menjadi terbatas.

3. Indeks Ketahanan Ekologi juga terdiri atas perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Desa Kelet mengalami sedikit masalah dengan kualitas lingkungan, khususnya karena sampah yang banyak dibuang di sungai.
- b. Di Desa Kelet memiliki potensi rawan bencana khususnya longsor, dan beberapa kejadian bencana alam lain karena berada di lereng Gunung Muria. dan (ii) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) diantisipasi dengan pembangunan talud penahan longsor.

Hasil Pengamatan Lapangan

Kearifan lokal yang terjadi di Desa Kelet adalah dengan gotong royong dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan meningkat signifikan dan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana olahraga maupun gedung serbaguna dan pembentukan BUMDes. Terdapat lembaga ekonomi yang dibentuk dana desa di Keling, yaitu untuk pembiayaan Bumdes, UP2PKK, UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam). Melalui BUMDes saat ini Desa Kelet bisa mendirikan unit-unit badan usaha, mulai dari usaha jasa, simpan pinjam, sewa gedung dan perlengkapan hajatan yang semuanya digunakan semaksimal mungkin oleh warga desa sehingga bisa menampung kebutuhannya dengan

keuntungan dan manfaat oleh masyarakat, serta lembaga ekonomi desa.

Namun dalam pengembangan pembangunan desa terdapat permasalahan, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat, antara lain yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat desa, kades, dan perangkat desa mengenai lembaga ekonomi desa (BUMDes/Badan Usaha Milik Desa) masih sangat kurang.
- b. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu lembaga ekonomi desa (BUMDes/Badan Usaha Milik Desa) yang seharusnya dikomunikasikan.
- c. Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes, seperti KUD, BUUD, dan berbagai program lainnya yang gagal dan tak tentu rimbanya itu membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa melalui BUMDes.
- d. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai
- e. BUMDes sendiri tidak cukup menarik bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Ini yang membuat anak muda belum banyak berkiprah di BUMDes, akibatnya pengetahuan usaha yang dibangun sebagian besar BUMDes masih dijalankan dengan

model konvensional. Juga BUMDes dijalankan anggota masyarakat yang relatif sudah berumur sehingga kurang banyak melakukan perombakan pola menjadi lebih modern

- f. Kondisi ini diperparah dengan gencarnya kampanye yang menciptakan citra bahwa BUMDes harus menghasilkan keuntungan besar secara profit (rupiah). Ini sangat tampak dari ukuran keberhasilan BUMDes sering diukur dari laba yang disetorkan ke kas desa.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA

A. Penggunaan Dana Desa

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana desa (DD) yang merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia**.

DD merupakan pendapatan utama yang bisa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas telah disepakati dan ditetapkan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan DD secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di desa, khususnya warga miskin, dan penyediaan sarana dan prasarana dasar desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi. Prioritas penggunaan

DD setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Untuk menyamakan prioritas penggunaan DD, maka Musrenbang Desa tentang RKP Desa sebaiknya diselenggarakan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut, sehingga penyusunan dan penyepakatan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan menggunakan Dana Desa dapat disesuaikan.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 tahun 2017 menyatakan bahwa prioritas pemanfaatan dana desa sebagaimana pasal 4 Peraturan menteri tersebut adalah Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program lintas bidang tersebut, antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Pembangunan sarana olahraga desa sebagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017).

A.1. Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi dana desa yang cukup besar untuk masing-masing kabupaten. Total dana desa yang dilaokasikan ke Jawa Tengah mencapai Rp 6.354.442.058,- pada tahun 2017 dan meningkat sebesar 6% menjadi Rp 6.737.083.091,- pada tahun 2018. Kabupaten yang memiliki dana alokasi terbesar adalah Kabupaten Purworejo sebesar Rp355.968.664,- namun jumlah tersebut menurun sebesar -8,53% pada tahun 2018. Kabupaten yang mendapatkan alokasi terendah adalah Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebesar Rp 123.576.433, meski pada tahun 2018 naik sebesar 2,77%. Kabupaten dengan peningkatan alokasi terbesar adalah Kabupaten Pemalang yang naik sebesar 30% dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Secara rinci dana desa yang dialokasikan pada masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Dana Desa per Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018

NO	NAMA KAB	2017	2018	%
	Provinsi Jawa Tengah	6.354.442.058	6.737.083.091	6,02%
1	Kab. Banjarnegara	214.470.940	221.842.482	3,44%
2	Kab. Banyumas	255.734.553	298.545.418	16,74%
3	Kab. Batang	190.962.224	167.511.013	-12,28%
4	Kab. Blora	214.102.011	229.074.481	6,99%
5	Kab. Boyolali	207.823.645	192.935.985	-7,16%
6	Kab. Brebes	270.922.338	343.915.727	26,94%
7	Kab. Cilacap	232.084.054	243.267.268	4,82%

8	Kab. Demak	211.595.493	229.662.643	8,54%
9	Kab. Grobogan	229.625.434	246.285.582	7,26%
10	Kab. Jepara	158.765.096	191.881.485	20,86%
11	Kab. Karanganyar	133.065.748	139.229.018	4,63%
12	Kab. Kebumen	359.998.061	350.115.647	-2,75%
13	Kab. Kendal	212.767.778	216.593.703	1,80%
14	Kab. Klaten	311.087.447	321.520.294	3,35%
15	Kab. Kudus	103.687.281	119.227.194	14,99%
16	Kab. Magelang	289.613.899	329.260.677	13,69%
17	Kab. Pati	317.453.410	362.612.350	14,23%
18	Kab. Pekalongan	222.535.590	222.592.756	0,03%
19	Kab. Pemalang	191.002.083	248.799.035	30,26%
20	Kab. Purbalingga	191.224.910	199.651.735	4,41%
21	Kab. Purworejo	355.968.664	325.602.817	-8,53%
22	Kab. Rembang	228.013.715	228.728.361	0,31%
23	Kab. Semarang	165.688.573	158.450.698	-4,37%
24	Kab. Sragen	160.952.196	146.610.871	-8,91%
25	Kab. Sukoharjo	123.576.433	127.001.352	2,77%
26	Kab. Tegal	234.026.299	281.896.357	20,45%
27	Kab. Temanggung	207.451.723	211.615.329	2,01%
28	Kab. Wonogiri	198.745.821	198.552.505	-0,10%
29	Kab. Wonosobo	191.496.626	184.100.308	-3,86%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

A.2. Dana Desa di Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara sebagai daerah sampel memiliki dana alokasi desa sebesar Rp 158.765.096 pada tahun 2017 kemudian naik sebesar 20,86% menjadi Rp 191.881.485 pada tahun 2018. Hal ini diharapkan akan menyebabkan terjadinya kenaikan yang

cukup signifikan dalam posisi IDM di Kabupaten Jepara. Secara detail data dan alokasi dana desa yang diperoleh Kabupaten Jepara menurut desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah DD 2018
1	Kedung	16.961.476.000
2	Pecangaan	11.388.158.000
3	Welahan	13.765.405.000
4	Mayong	18.109.516.000
5	Batealit	12.722.030.000
6	Jepara	4.668.446.000
7	Mlonggo	9.193.604.000
8	Bangsri	14.554.947.000
9	Keling	14.700.622.000
10	Karimunjawa	3.639.282.000
11	Tahunan	14.338.670.000
12	Nalumsari	14.604.319.000
13	Kalinyamatan	10.572.591.000
14	Kembang	12.272.907.000
15	Pakis Aji	8.988.075.000
16	Donorojo	9.793.376.000
JUMLAH		190.273.424.000

Sumber : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Jepara

**) Data pada masing-masing desa terlampir*

Tabel 3.2 tersebut menunjukkan bahwa masing-masing desa pada tiap kecamatan mendapatkan alokasi dana desa dan dana desa yang berbeda. Dana desa memiliki besaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi dana desa. Penelitian ini akan membahas kemanfaatan dana desa terhadap pembangunan desa dengan menggunakan indikator Indeks Desa Membangun.

A.3. Dana Desa di Lima Desa Sampel

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kemanfaatan dana desa yang ditunjukkan dengan penggunaan dana desa, pemanfaatan dan *impact* atau dampak yang diperoleh. Analisis lebih lanjut dengan menggunakan lima desa sampel sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Data menunjukkan bahwa kelima desa sampel tersebut mendapatkan alokasi dana desa dan dana desa yang bervariasi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

No	Desa	Jumlah DD 2018	STATUS IDM
1	Gemulung	909.974.000	Sangat Tertinggal
2	Pancur	1.522.632.000	Tertinggal
3	Karimunjawa	1.122.681.000	Berkembang
4	Tanjung	1.487.863.000	Maju
5	Kelet	1.200.780.000	Mandiri

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018

Prioritas pemanfaatan dana desa menggunakan peraturan menteri yang ditetapkan setiap tahun, sehingga bisa menjadi arahan dalam pemanfaatan dana desa. Penggunaan dana desa harus mengikuti acuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Desa PDTT yang ditetapkan setiap tahun. Penggunaan dana desa terbagi dalam empat penggunaan utama, yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, pembinaan sosial dan pemerintahan. Penggunaan dana desa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penggunaan Dana Desa di Daerah Sampel

NO	URAIAN	ANGGARAN				2018			
		2015		2016		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemerintahan	45.250.000	2,92%	18.750.000	0,53%	-	0,00%	50.622.500	0,88%
2	Pembangunan Infrastruktur	1.383.896.000	89,45%	3.267.723.000	92,42%	4.382.835.000	97,37%	5.058.016.345	87,92%
3	Pembinaan sosial	42.500.000	2,75%	19.500.000	0,55%	-	0,00%	548.253.555	9,53%
4	Pemberdayaan Masyarakat	75.500.000	4,88%	229.797.000	6,50%	118.462.000	2,63%	96.400.000	1,68%
Total		1.547.146.000	100,00%	3.535.770.000	100,00%	4.501.297.000	100,00%	5.753.292.400	100,00%

Sumber : Bapermades Jepara

Secara detail penggunaan dana desa akan dipilahkan ke dalam penggunaan menurut prioritas Peraturan Menteri Desa PDTT

B. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa desa dipilahkan menurut kondisi geografis sebagai daerah pegunungan dan dataran tinggi, daerah pesisir, daerah dataran rendah dan pinggiran yang dekat dengan perkotaan. Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur juga dipengaruhi oleh kondisi daerah tersebut. Pada daerah pegunungan dan *remote area* maka penggunaan dana desa menjadi bagian penting karena akan membuka aksesibilitas daerah-daerah terpencil agar bisa memiliki waktu tempuh yang lebih cepat. Berdasarkan survei data diperoleh bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan bisa ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

Tahun	Pembangunan Infrastruktur
2015	89,45%
2016	92,42%
2017	97,37%
2018	87,92%
Rerata	91,79%

Sumber : Bidang Permades berbagai tahun diolah

Penggunaan dana untuk pembangunan terdiri atas penggunaan pembangunan jembatan, drainase, talud dan senderan penahan longsor, pembangunan fasilitas air bersih, pembangunan sarana sanitasi pembangunan fasilitas pendukung pendidikan dan pembangunan untuk fasiltasi ruang publik. Secara detail penggunaan dana desa menurut infrasruktur yang terbangun pada tahun 2018 bisa ditunjukkan dalam Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6. Infrastruktur yang terbangun dengan menggunakan Dana Desa 2018

Infrastruktur yang terbangun	%
Jembatan	2,53%
Talud/ Drainase	12,43%
Saluran air bersih	5,71%
Taman / Ruang publik	0,39%
Jalan	68,20%
Pendidikan	7,61%
Jambanisasi	3,12%

Sumber : Data Bafermades 2018 diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang terbangun dengan adanya dana desa bukan hanya untuk pembangunan jalan namun juga untuk fasilitas yang lain. Pembangunan jalan sebagai fasilitas utama mencapai 68,20%. Pada desa dengan kondisi geografis pegunungan pembangunan jalan terbukti membuka akses bagi daerah yang berada di

wilayah pergunungan dan sulit dijangkau. Pembangunan jalan ini mempunyai keuntungan, antara lain:

- a. Membuka akses jalan bagi peningkatan pendidikan, karena mengurangi waktu tempuh, sehingga jarak sepanjang 2 km yang semula harus ditempuh dengan melingkar karena tidak ada akses jalan, maka akan bisa ditempuh dengan langsung dan mendekatkan siswa dengan sekolahnya
- b. Membuka akses jalan bagi peningkatan ekonomi, khususnya bagi produk yang semula berharga mahal karena kesulitan akses, maka sekarang memangkas biaya sehingga menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang sampai pada level dusun paling jauh
- c. Membuka jalan juga membuka peluang perekonomian tumbuh karena barang-barang potensi dan sumber daya alam yang semula tidak bernilai karena biaya transportasinya tinggi sekarang mempunyai daya saing.

Pembangunan infrastruktur lainnya adalah jembatan yang mencapai 2,3%. Pembangunan jembatan ini memiliki nilai strategis karena bisa menyatukan daerah-daerah yang semula terpisah oleh sungai atau lainnya, menjadi mempermudah akses antar daerah. Pembangunan saluran drainase, talud dan senderan penahan longsor mencapai 12,43% akan mampu memperbaiki kualitas lingkungan karena mengurangi kerawanan bencana yang selama ini ada. Bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, berkurang potensinya dan meningkatkan keamanan

masyarakat. Pembangunan sarana pendidikan mencapai 7,62% merupakan langkah untuk meningkatkan akses terhadap pemerataan pendidikan, khususnya bagi pendidikan untuk anak usia dini. Selain itu pembangunan fasilitas pendidikan non formal dan sarana usaha seperti PKBM dan bangunan BUMDes juga ikut berperan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infratraktur yang tidak kalah penting dalam peningkatan ketahanan lingkungan adalah jambanisasi sebagai upaya peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat. Pembangunan jambanisasi ini akan mengurangi polusi dan limbah rumah tangga yang selama ini mengganggu lingkungan.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka sebenarnya pembangunan bukan hanya memiliki efek terhadap fasilitas saja, namun juga mempunyai dampak yang bagus terhadap kondisi indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, juga ketahanan lingkungan.

C. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi merupakan salah satu indeks yang penting dalam IDM karena menunjukkan bagaimana kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. IKE yang tinggi akan menunjukkan bahwa secara ekonomi masyarakat di desa tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan lebih sejahtera. Pemanfaatan Dana Desa untuk IKE bisa secara

langsung maupun tidak langsung yang akan dijelaskan secara detail sebagai berikut:

1. Secara langsung adalah ketika dana desa secara langsung digunakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya digunakan untuk pelatihan peningkatan potensi ekonomi, usaha simpan pinjam yang melibatkan masyarakat miskin, pembinaan dan pendampingan pada gabungan kelompok tani pada daerah perdesaan, pembukaan dan pengembangan usaha BUMDes, promosi potensi desa yang dilakukan secara rutin dan mendorong inovasi desa yang telah mulai dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa di daerah sampel selama empat tahun ini bisa ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Tahun	Pemberdayaan Masyarakat
2015	4,88%
2016	6,50%
2017	2,63%
2018	1,68%
Rerata	3,92%

Sumber : Bapermades diolah

Tabel tersebut menunjukkan, sudah mulai ada penggunaan dana desa yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, arahnya pada pengembangan ekonomi atau IKE. Dampak secara ekonomi memang belum bisa diukur apakah merupakan kontribusi dari dana desa atautkah yang lain karena proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang relatif panjang sebelum kelihatan hasilnya.

2. Secara tidak langsung, yaitu merupakan efek karambol dari penggunaan dana desa untuk kepentingan yang lain, misalnya penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan akan membuka peluang peningkatan ekonomi. Efek secara tidak langsung akan kelihatan dalam jangka waktu yang panjang, karena adanya mekanisme transmisi yang lebih bertahap.

D. Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur secara lebih detail bukan hanya dari aspek ekonomi namun juga aspek pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagaimana IKE, maka kesejahteraan masyarakat bisa dilihat secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam pemanfaatan dana desa, yaitu:

1. Pemanfaatan secara langsung, dana desa untuk pembinaan kesejahteraan sosial digunakan membantu

posyandu, baik anak maupun lansia. Pembangunan fasilitas publik yang bisa digunakan untuk meningkatkan ruang terbuka publik misalnya pembuatan taman kota, pengembangan perpustakaan atau taman baca, membuka kesempatan usaha melalui pembukaan fasilitas umum lainnya. Secara persentase pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk pembinaan kesejahteraan masih relatif sedikit.

Tabel 3.8. Dana Desa untuk Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Tahun	Pembinaan Kesejahteraan Sosial
2015	2,75%
2016	0,55%
2017	0,00%
2018	9,53%
Rerata	3,21%

Sumber : Bidang Bafermades 2018

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sudah terjadi peningkatan penggunaan dana desa untuk pembinaan kesejahteraan sosial dengan nilai yang cukup besar. Pada desa status Maju dan Mandiri dengan tingkat kesulitan geografis yang rendah, maka pembangunan infrastruktur harus mulai dialihkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kesejahteraan sosial.

2. Pemanfaatan tidak langsung adalah ketika dana desa digunakan untuk membangun fasilitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, dan kesehatan. Beberapa desa menggunakan dana untuk membangun fasilitas PUD, perpustakaan, pembentukan forum kesehatan, pembangunan sanitasi, pembangunan saluran air bersih yang muaranya pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. Kontribusi Dana Desa Terhadap Perubahan Status Desa

Dana desa sudah berlangsung selama empat tahun, yaitu 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dari tahun ke tahun jumlah dana yang digulirkan semakin bertambah, sehingga secara kuantitatif seharusnya memberikan efek pada perubahan status desa dengan peningkatan. Namun ternyata tidak semua kondisi menunjukkan hal tersebut. Beberapa hal yang diduga menjadi sebab dalam penurunan status desa ini adalah:

1. Kurang akuratnya data yang diambil pada tahun 2015 ketika awal pelaksanaan penghitungan indeks desa membangun, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya nilai yang sama antar desa untuk indeks tertentu.
2. Masa empat tahun sudah terjadi perubahan dalam kondisi daerah sehingga ukuran atau acuan dalam indeks perlu mendapatkan penyesuaian.

3. Adanya faktor eksternal menyebabkan penurunan indeks desa yang tidak bisa secara langsung ditangani dengan menggunakan dana desa tersebut.
4. Adanya indikasi beberapa daerah yang memilih untuk tetap berada di posisi atau status tertinggal bahkan sangat tertinggal karena salah satu ukuran penerimaan dana desa adalah kemiskinan.

Sedangkan beberapa hal yang diduga menjadi penyebab peningkatan status desa adalah:

1. Pembangunan infrastruktur secara nyata menyebabkan terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
2. Penggunaan dana desa untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat desa, khususnya dalam fasilitasi pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Penggunaan dana untuk pengembangan lembaga ekonomi akan meningkatkan upaya masyarakat dalam Indeks Ketahanan Ekonomi.
4. Upaya yang dilakukan dengan mendorong inovasi melalui fasilitas TIK akan menyebabkan masyarakat terbuka dan bisa lebih berkembang dengan baik.

F. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pemanfaatan Dana Desa

Penggunaan dan pemanfaatan dana desa seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun selama ini tidak semua perwakilan masyarakat dilibatkan dalam pembahasan penggunaan dana desa. Kondisi ini menyebabkan adanya faktor pendorong dan pemanfaatan dana desa. Faktor tersebut terdapat pada semua lini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Secara lebih detail faktor penghambat dan pendorong dalam pemanfaatan dana desa akan ditunjukkan sebagai berikut:

F.1. Perencanaan

Perencanaan dana desa diatur dengan prioritas berdasarkan peraturan menteri desa yang ditetapkan setiap tahun. Prioritas tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan yang disusun melalui Musrenbangdes. Pendorong keberhasilan pemanfaatan dana desa, antara lain:

- a. Musrenbangdes dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat sehingga meliputi semua elemen masyarakat.
- b. Musrenbangdes dilakukan dengan mendasarkan *baselines* yang sudah ada pada tahun sebelumnya.
- c. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat akan mendorong pemerataan dalam pengalokasian kegiatan dana desa.

Faktor penghambat dalam perencanaan adalah:

- a. Terbatasnya dana desa yang ditetapkan untuk masing-masing desa. Bagi desa yang memiliki kondisi geografis yang luas, maka harus mempertimbangkan kepentingan yang paling utama terlebih dahulu untuk masing-masing desa.
- b. Proses perencanaan terkadang hanya melibatkan tokoh tertentu sebagai penentu akhir kegiatan yang akan dilakukan sehingga menyebabkan adanya rasa ketidakadilan.
- c. Usulan masyarakat yang belum dilaksanakan akan menimbulkan keirian yang akan menghambat pembangunan.

F.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatan dana desa yang ideal adalah dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat untuk saling mendukung kegiatan tersebut, apakah sesuai dengan usulannya ataukah tidak namun terdapat beberapa faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Faktor pendorong:

- a. Kearifan lokal, pada masyarakat dengan karakteristik perdesaan, gotong royong merupakan modal utama yang dimiliki sehingga akan mendorong kegiatan menjadi lebih guyup. Gotong royong ini biasanya diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga (swakarya) dan bantuan

dana (swadana). Kearifan lokal telah terbukti menjadi daya dorong utama dalam pemanfaatan dana desa

- b. Masyarakat yang memiliki kelebihan, baik dalam *softskill*, *hardskill* maupun harta benda yang lain itu serta dalam membantu keberhasilan pelaksanaan program. Misalnya untuk membukakan jalan baru, maka harus melewati tanah warga, banyak warga yang secara sukarela mengizinkan tanahnya untuk digunakan sebagai fasilitas umum dalam bentuk wakaf atau pemanfaatan secara langsung. Pada masyarakat yang memiliki keterampilan, baik *softskill* maupun *hardskill*, maka dia rela untuk menyumbangkan kemampuannya bagi peningkatan kesejahteraan khususnya pada pelaksanaan inovasi baru.
- c. Fasilitas teknologi informasi mendorong percepatan dalam penyusunan laporan dan SPJ pemanfaatan dana desa
- d. Penurunan dana dengan pola 20-40-40 menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan dan program penggunaan dana desa, khususnya di awal tahun dan tidak sempurnanya kegiatan di akhir tahun karena terburu-buru

Faktor penghambat, antara lain:

- a. Tidak meratanya dana desa bagi seluruh masyarakat akan menyebabkan apatisme masyarakat terhadap program

- b. Arogansi dan dominasi tokoh masyarakat akan menyebabkan pelaksanaan program menjadi terhambat
- c. Perbedaan pola SPJ antara dana desa dengan anggaran APBDes yang lain menyebabkan kelambatan dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan

F.3. Evaluasi

Ketika pelaksanaan kegiatan sudah selesai, maka dilakukan evaluasi apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan. Evaluasi ini mengandung dua pengertian, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau substansi kegiatan dan evaluasi terhadap penggunaan dan laporan keuangan.

Evaluasi merupakan titik paling krusial terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa. Ukuran dan indikator yang ada terkadang berbeda akibatnya evaluasi pertanggungjawaban keuangan sering mengalami kendala. Beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam evaluasi adalah:

Faktor pendorong

- a. Manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat dirasakan nyata khususnya dalam pembangunan infrastruktur
- b. Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan dan akan terlibat langsung dalam evaluasi untuk perencanaan tahap selanjutnya
- c. Kerja sama dan gotong royong mendorong pencapaian evaluasi akan sama seperti tujuan yang diinginkan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi adalah

- a. Pelaksanaan sering berbeda dengan perencanaan, padahal kekeliruan dalam prosedur dan perencanaan bisa menyebabkan perbedaan dalam pelaporan keuangan
- b. Perubahan harga pada saat perencanaan dengan pelaksanaan akan mengganggu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan
- c. Banyaknya dana yang masuk ke masyarakat desa namun dengan pola yang berbeda sehingga menyebabkan pembuatan laporan keuangan harus berhati-hati

G. Pemanfaatan Dana Desa per Desa Sampel

Secara lebih detail pemanfaatan per desa sampel akan ditunjukkan sebagai berikut:

G.1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Gemulung

G.1.1. Pemanfaatan Infrastruktur

Desa Gemulung merupakan satu-satunya desa sangat tertinggal di Kabupaten Jepara. Posisi indeks ini merupakan penurunan dari status tahun 2015, yaitu Berkembang sehingga menurun sebanyak dua tingkat. Titik utama penurunan ini karena masalah lingkungan yang indeksnya menurun sampai 0,3. Demikian juga indeks ekonomi yang menurun sedikit, sedangkan indeks kesejahteraan sosial meningkat.

Penggunaan dana desa di Desa Gemulung di tahun 2015 - 2018 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9. Pemanfaatan Dana Desa Gemulung tahun 2015 – 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN				ANGGARAN			
		2015		2016		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemerintahan	26.500.000	8,99%	0	0,00%	0	0,00%	8.185.000	0,90%
2	Pembangunan Infrastruktur	258.265.000	87,62%	631.523.000	97,00%	790.186.000	95,33%	834.220.000	91,68%
3	Pembinaan Sosial	0	0,00%	19.500.000	3,00%	0	0,00%	67.569.000	7,43%
4	Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000	3,39%	0	0,00%	38.750.000	4,67%	-	-
Total		294.765.000	100,00%	651.023.000	100,00%	828.936.000	100,00%	909.974.000	100,00%

NO	URAIAN	ANGGARAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		834.220.000
1	Pemb. Rabat Beton Jogging Track P=300 m, L=2 m, T=0.1 m	120.000.000
2	Pembangunan Aspal Jln RT 003 RW 002 P=250m L=3.5m T=0.02m	60.000.000
3	Pembangunan Aspal Jln RT 002 RW 005 P=110m L=3m T=0.02m	22.500.000
4	Rehab Jembatan Lor kali P=8 m L=7 m T=0.15 m, Volume = 8 m	70.000.000
5	Pembangunan Aspal Jln RT 002 RW 005 P=304m L=2.5m T=0.02m	60.000.000
6	Pembangunan Aspal Jln RT 002 RW 005 P=205m L=2.5m T=0.02m	50.000.000
7	Pembangunan Aspal Jln RT 003 RW 005 P=63m L=2.5m T=0.02m	15.000.000
8	Pembangunan Aspal Jln RT 003 RW 004 P=367m L=3.5m T=0.02m	90.000.000
9	Pembangunan Aspal Jln RT 003 RW 004 P=60m L=2.5m T=0.02m	15.000.000
10	Pemb. Aspal Jln RT 002 RW 002 P=165m L=3.5m T=0.02m	40.000.000
11	Rehab/Perbaiki Lapangan Futsal Desa Gemulung	4.000.000
12	Rehab/Perbaiki Lapangan Badminton RT 001 RW 002	2.000.000
13	Menunjang Kegiatan Penerangan Jalan	15.970.000
14	Menunjang Kegiatan Lampu Jalan	1.500.000
15	Pemb. Aspal Jln RT 002 RW 002 P=55 m L=3 m, T= 0.02 m	10.750.000
16	Pembangunan Aspal Jln RT 001 RW 002 P=160m L=3.5m T=0.02m	40.000.000
17	Pemb. Aspal Jln Baru RT 001 RW 002 P=70m L=3m T=0.02m	22.500.000
18	Pemb. Aspal Jln RT 002 RW 001 P=160m L=3.5m T=0.02m	40.000.000
19	Pembangunan Aspal Jln RT 001 RW 001 P=160m L=3.5m T=0.02m	40.000.000
20	Pembangunan Aspal Jln RT 001 RW 001 P=222m L=4m T=0.02m	60.000.000
21	Pembangunan Aspal Jln RT 003 RW 004 P=192m L=3m T=0.02m	55.000.000
PENGEMBANGAN SOFTWARE		8.185.000
1	Menunjang Kegiatan Internet Desa	2000000
2	Operasional Kantor	6000000
3	Menunjang Pelaksanaan SID dan Siskeudes	185000

PEMBINAAN SOSIAL MASYARAKAT	67.569.000
1 Menunjang Keg. Forum Kesehatan Desa (FKD)	22.569.000
2 Menunjang Keg. Pelestarian Budaya Desa/Sedekah Bumi	35.000.000
3 Menunjang Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna	10.000.000
TOTAL	909.974.000

Sumber : APBDes Gemulung 2018

Data tersebut menunjukkan, ternyata pemanfaatan dana di Desa Gemulung masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mencapai 91,7%. Pengembangan *software* 0,9% dan pembinaan sosial masyarakat sebanyak 7,43%. Salah satu pembinaan sosial kesejahteraan yang bisa diangkat sebagai event wisata penting adalah kegiatan pelestarian budaya, yaitu sedekah bumi. Event ini bisa dikembangkan menjadi wisata religi dan wisata *heritage* (sejarah).

G.1.2. Pemanfaatan Kesejahteraan Masyarakat

Dana desa di Desa Gemulung juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Hal ini bisa dilihat dari alokasi pemanfaatan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat yang mengalami fluktuasi naik dan turun. Berdasarkan data, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Desa Gemulung tidak mengalokasikan dana desa untuk program bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tahun berikutnya terjadi peningkatan yang sangat tajam. Berikut adalah alokasi penggunaan dari dana desa untuk pemanfaatan kesejahteraan masyarakat di Desa Gemulung.

Tabel 3.10. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gemulung Tahun 2015-2018

Tahun	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
	%	%	%
2015	0,05%	16,85%	61,96%

Proporsi besarnya dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gemulung sangat kecil terhadap proporsi penerimaan dana desa. Pada tahun 2015, besarnya alokasi dana pemberdayaan masyarakat sebesar 3,39%; sedangkan tahun 2016 tidak ada sama sekali alokasi dari dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar dana desa dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan.

Dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat nantinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gemulung digunakan untuk pemanfaatan air tanah guna kebutuhan sehari-hari dengan layak. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan Posyandu terutama untuk penambahan bahan makanan.

Dana desa di Desa Gemulung dialokasikan khusus untuk keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I dengan melibatkan mereka dalam program padat karya tunai. Di Desa Gemulung, jika tenaga yang digunakan untuk tukang maka mendapatkan upah Rp 100.000 per hari, sedangkan pembantu tukang mendapatkan upah sebesar Rp 85.000 per hari. Ini sangat membantu bagi masyarakat Pra Sejahtera sehingga

daya belinya meningkat. Tenaga ahli juga didatangkan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan padat karya tunai tersebut, sehingga kualitas pekerjaan masih terjaga.

Masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang menerima manfaat dari adanya dana desa memberikan pengharapan mengenai penggunaan dana desa tersebut supaya terdapat tambahan alokasi biaya pada tahun 2019 untuk pelaksanaan program pada kalangan tersebut. Penambahan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Pada tahun 2019, terdapat program untuk peningkatan kesejahteraan yang dimulai dari perbaikan kualitas kesehatan. Oleh karena itu, rencananya pada tahun 2019 akan dibangun poliklinik di dekat kantor desa. Pembangunan poliklinik tersebut berdasarkan kesepakatan dengan Forum Kesehatan Desa (FKD) memberikan perhatian terhadap pelaksanaan posyandu, baik untuk balita, lansia maupun keluarga. Juga direncanakan melakukan pembelian terhadap peralatan laboratorium pengujian/tes kesehatan, misalnya uji kadar gula dalam darah, kolesterol, dan lain-lain.

G.2. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Pancur

Desa Pancur merupakan desa dengan kategori tertinggal yang mengalami penurunan dari yang sebelumnya merupakan desa berkembang. Pemanfaatan dana desa di Pancur secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.11. Dana Desa Menurut Penggunaan

NO	URAIAN	2015				2016				2017				2018			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
ANGGARAN																	
1	Pemerintahan	18.750.000	5,78%	18.750.000	2,48%	0	0,00%	38.637.500	2,54%								
2	Pembangunan Infrastruktur	224.008.000	69,09%	591.006.000	78,05%	963.922.000	100,00%	1.225.670.500	80,50%								
3	Pembinaan sosial	22.450.000	6,92%	0	0,00%	0	0,00%	187.024.000	12,28%								
4	Pemberdayaan Masyarakat	59.000.000	18,20%	147.500.000	19,48%	0	0,00%	71.300.000	4,68%								
Total		324.208.000	100,00%	757.256.000	100,00%	963.922.000	100,00%	1.522.632.000	100,00%	1.522.632.000	100,00%	1.522.632.000	100,00%	1.522.632.000	100,00%		

NO	URAIAN	ANGGARAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		1.225.670.500
	Pembangunan pagar sekolah PAUD TK. Tunas Bangsa RT. 22, RW. 04	10.925.000
	Menunjang kegiatan air bersih Dukuh Randubango II	82.588.000
	Pembangunan jalan RT 42 RW 8 (55 m x 2,3 m x 0,12 m)	24.223.500
	Pembangunan jalan RT 49 RW 10 (120 m x 2,5 m x 0,12 m)	52.325.500
	Pembangunan Senderan RT 18 RW 03 (4 m x 6 m)	43.936.000
	pembangunan Talud di RT 16 RW 03 (p 11,7 m LT 3,5 m)	15.004.000
	Pembangunan Jalan Desa RT 43,44 dan 45 RW 09	220.782.000
	Pembangunan Gorong2 Talud Kali Cilek RT 43 RW 9	36.696.000
	Pembangunan Senderan RT 35 RW 7 (p.15 m T. 4m)	30.008.000
	Pembangunan Jalan rabat beton RT 1 RW 1 (70x2,3x0,10)	25.725.000
	Pembangunan senderan RT 38 RW 8 (P.12 m L 3 m)	20.003.000
	Pemerataan jalan JUT RT 12 RW 2	5.200.000
	Pembangunan Gedung Pos PAUD Mutiara Bunda RT 36 RW 7	80.810.500
	Pembangunan Gedung Balai PKBM	220.291.000
	Pengadaan Pengeras Suara	12.000.000
	Pengadaan Jamban sehat keluarga	87.500.000
	Pembangunan jalan beton RT 2 RW 1 (100 m x 2,3 m x 0,10 m)	34.674.000
	Pembangunan jalan gang RT 17 RW 3 (65 m x 2,2 m x 0,12 m)	28.236.500
	Pembangunan jalan RT 19 RW 4 (60 mx2.5 m x0,12m)	25.747.000
	Pembangunan jalan RT 29 RW 6 (75mX2,3X0,12m)	27.400.500
	Pembangunan jalan RT 30-31 RW 6 Dukuh Bomo (200 m x 2,3 m x 0,12 m)	78.375.000
	Pembangunan jalan RT 36 RW 7 (100 m x 2,3 m x 0,12 m)	40.957.500
	Pembangunan jalan RT 39 RW 8 Tamansari (50 m x 2,3 m x 0,12 m)	22.262.500
PENGEMBANGAN <i>SOFTWARE</i> PENDUKUNG		38.637.500
PEMERINTAHAN DESA		
	Menunjang kinerja pengarsipan	2.300.500
	Menunjang kegiatan sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	23.602.000

Menunjang pengadaan jaringan internet	6.550.000
Menunjang kegiatan SID	1.185.000
Menunjang kegiatan pengelolaan informasi desa	5.000.000
PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	187.024.000
Menunjang kegiatan posyandu, polindes dan posyandu lansia	27.398.000
Menunjang kegiatan BUMDes	56.851.000
Menunjang kegiatan pendidikan	71.775.000
Menunjang kegiatan pelayanan sosial	15.000.000
Menunjang kegiatan Pendidikan PAUD	7.000.000
Menunjang kegiatan keamanan lingkungan	9.000.000
PEMBERDAYAAN EKONOMI	71.300.000
Menunjang Kegiatan Promosi Potensi Desa	15.000.000
Menunjang Kegiatan pengembangan situs budaya lokal	26.300.000
Menunjang Kegiatan Gapoktan dan kelompok Tani	8.000.000
Menunjang kegiatan DMP (Desa mandiri Pangan)	22.000.000
TOTAL	1.522.632.000

G.2.1.Pemanfaatan Kesejahteraan Masyarakat

Dana desa digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pancur. Besaran nilai dana yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pancur proporsinya lebih besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tetapi pada tahun 2017 tidak ada alokasi penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah proporsi Penggunaan dana desa untuk Program Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pancur.

Tabel 3.12. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pancur Tahun 2015-2018

Tahun	Pemberdayaan Masyarakat	Dana Desa	Proporsi (%)
2015	Rp 59,000,000	Rp 324,208,000	18.20
2016	Rp 147,500,000	Rp 757,256,000	19.48
2017	Rp -	Rp 963,922,000	0.00
2018	Rp 239,003,500	Rp 1,592,632,000	15.01

Besarnya proporsi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pancur sebesar 18,20% dengan nilai nominal Rp 59.000.000 dari keseluruhan dana yang diperoleh, yaitu sebesar Rp 324.208.000,-. Proporsi tersebut semakin mengalami peningkatan menjadi sebesar 19,48% dari keseluruhan dana desa. Tetapi sayangnya pada tahun 2017, tidak ada alokasi dana untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian alokasinya mulai meningkat lagi menjadi sebesar 15% dari keseluruhan dana desa yang diperoleh, yaitu sebesar Rp 239.003.500,-

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, diperoleh hasil bahwa dana desa sangat membantu kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Adapun dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa agar menjadi lebih baik. Program pembangunan infrasturktur tersebut mempunyai manfaat penyerapan tenaga kerja saat pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk masyarakat Pra Sejahtera kelompok *stunting* serta digunakan untuk meningkatkan lembaga ekonomi desa dan lain-lain.

Program padat karya tunai sudah mulai diterapkan di Desa Pancur yang sangat membantu bagi kelompok masyarakat dalam kategori Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 untuk mendapatkan penghasilan, sehingga daya beli masyarakat Pra Sejahtera bisa meningkat.

Harapan dari masyarakat kelompok Pra Sejahtera dan Sejahtera I terhadap alokasi dana desa untuk tahun 2019 di Desa Pancur semakin meningkat, karena dapat menyerap tenaga kerja di Desa Pancur dengan jumlah penduduk sebanyak ±12.000 jiwa.

G.3. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Karimunjawa

Desa Karimunjawa merupakan desa yang mampu mempertahankan statusnya, yaitu desa Berkembang dengan tetap Berkembang. Permasalahan yang dialami oleh Desa Karimunjawa karena secara geografis letaknya berada di kepulauan sehingga transportasi dan distribusi barang dan penumpang mengalami hambatan. Salah satu keluhan yang dihadapi di Desa Karimunjawa adalah sering terlambatnya bahan-bahan material yang digunakan untuk pembangunan. Secara detail penggunaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Karimunjawa sebagai berikut:

Tabel 3.13. Penggunaan Dana Desa Karimunjawa tahun 2015 - 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN							
		2015		2016		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemerintahan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.800.000	0,38%
2	Pembangunan Infrastruktur	302.750.000	98,36%	650.050.000	88,76%	920.182.000	98,70%	965.146.400	97,68%
3	Pembinaan sosial	5.050.000	1,64%	0	0,00%	0	0,00%	11.625.000	1,18%
4	Pemberdayaan Masyarakat	0	0,00%	82.297.000	11,24%	12.090.000	1,30%	7.450.000	0,75%
Total		307.800.000	100,00%	732.347.000	100,00%	932.272.000	100,00%	988.021.400	100,00%

G.3.1. Pemanfaatan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Karimunjawa merupakan salah satu desa yang terletak di Pulau Karimunjawa. Untuk mencapai lokasi desa tersebut bisa menggunakan akses melalui udara atau laut. Beberapa kendala yang ditemui dari penggunaan dana desa di Karimunjawa umumnya terletak pada saat pertanggungjawabannya, yaitu pelaporan SPJ. Kendala tersebut berupa manajemen waktu pembelanjaan barang-barang yang digunakan untuk pengembangan pembangunan fisik di Karimunjawa. Tidak tepatnya waktu pengiriman barang atau material dari Jepara karena kendala cuaca menyulitkan SPJ untuk diselesaikan tepat waktu, sehingga berdampak pada telatnya pencairan dana desa.

Dana desa yang dialokasikan untuk pemanfaatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I bisa dilihat dari besaran dana yang dikeluarkan untuk program peningkatan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah proporsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Karimunjawa tahun 2015-2018, di mana digambarkan hanya pada tahun 2016 dan 2017 saja yang diprogramkan masing-masing sebesar 11,24% dan mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 1,30% pada tahun 2017.

Tabel 3.14. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karimunjawa Tahun 2015-2018

Tahun	Pemberdayaan Masyarakat	Dana Desa	Proporsi (%)
2015	-	Rp 307,800,000	0
2016	Rp 82,297,000	Rp 732,347,000	11.24
2017	Rp 12,090,000	Rp 932,272,000	1.30
2018	-	Rp 1,122,681,000	0

Di Desa Karimunjawa, dana desa tidak dipergunakan secara khusus untuk kalangan masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Hal ini didasari karena kelompok masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I sudah didanai oleh program lain, yaitu Perkin. Dana desa semaksimal mungkin digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar kalangan atau kelompok tertentu.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karimun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat digunakan untuk beberapa program melalui PKK, Pokja, pelatihan memasak, membatik, dan kuliner yang boleh diikuti oleh semua kalangan. Pemerintah Desa Karimunjawa menghindari pelaksanaan program-program yang didanai ganda dari berbagai macam sumber. Sedangkan padat karya tunai belum bisa diterapkan di Desa Karimunjawa karena sifat dari masyarakat di sana yang tidak mau menjadi buruh. Mereka hanya bermatapencarian sebagai nelayan, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik harus mendatangkan tenaga tukang dari luar Karimunjawa.

Harapan dari pendudukan Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan didukung oleh pemerintah desa di Karimunjawa adalah jika sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai program yang khusus diperuntukkan untuk masyarakat pra sejahtera dan sejahtera I selain padat karya tunai untuk peningkatan kesejahteraan mereka maka akan sangat membantu.

G.4. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung

Desa Tanjung memiliki wilayah yang sangat luas dan masih banyak daerah yaang memiliki kendala dalam akses jalan, sehingga menyebabkan perekonomian dan kegiatan masyarakat terhambat. Kondisi ini mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan dana desa di Desa Tanjung bisa ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15. Penggunaan Dana Desa Tanjung tahun 2015 - 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN							
		2015		2016		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemerintahan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%
2	Pembangunan Infrasruktur	308.115.000	100,00%	722.310.000	100,00%	890.395.000	96,83%	1.292.567.000	90,27%
3	Pembinaan sosial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	121.668.000	8,50%
4	Pemberdayaan Masyarakat	0	0,00%	0	0,00%	29.122.000	3,17%	17.650.000	1,23%
Total		308.115.000	100,00%	722.310.000	100,00%	919.517.000	100,00%	1.431.885.000	100,00%

G.4.1.Pemanfaatan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang mengalami peningkatan status desa pada tahun 2018. Pemanfaatan dana desa di Desa Tanjung terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari besarnya realisasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Pada pelaksanaan pemberian dana desa pertama kali, sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung. Karena nya hal itu disebabkan luas wilayah Desa Tanjung yang sangat luas, maka berdasarkan kesepakatan Pemerintah Desa Tanjung dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan terlebih dahulu. Selain digunakan untuk pembangunan jalan, maka dana desa digunakan untuk penyediaan air bersih serta serta padat karya tunai yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tersebut sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat pra sejahtera dan sejahtera I mendapatkan manfaat dari pemberian dana desa di Desa Tanjung.

Pada tahun 2016, alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat pun belum ada dan mulai diprogramkan oleh pemerintah desa sejak tahun 2017 dan 2018 dengan persentase yang stabil terhadap realisasi dana desa di Desa Tanjung. Berikut adalah uraian data mengenai besarnya dana desa untuk pemberdayaan masyarakat serta besarnya proporsi terhadap realisasi dana desa di Desa Tanjung.

Tabel 3.16. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Tahun 2015-2018

Tahun	Pemberdayaan Masyarakat	Dana Desa	Proporsi (%)
2015	Rp -	Rp 308,115,000	0.00
2016		Rp 722,310,000	0.00
2017	Rp 29,122,000	Rp 919,517,000	3.17
2018	Rp 56,174,800	Rp 1,487,863,000	3.78

Hasil *indepth interview* dengan perangkat desa di Tanjung memberikan hasil bahwa secara khusus tidak ada dana desa yang dialokasikan bagi masyarakat pra sejahtera, karena wilayah Desa Tanjung yang sangat luas maka dana desa difokuskan untuk pengembangan infrastruktur terlebih dahulu. Selain itu juga digunakan untuk menghindari kecemburuan antara golongan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

Masyarakat pra sejahtera ke depannya ingin mendapatkan porsi dari dana desa, tetapi berdasarkan keputusan bersama sampai dengan saat ini pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan jalan, irigrasi dahulu guna mengurangi kecemburuan sosial sehingga oleh aparat desa dihindari dahulu bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat pra sejahtera. Tetapi ke depannya mereka ingin mendapatkan manfaat yang lebih dari adanya dana desa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, terutama difokuskan pada kegiatan produktif.

G.5. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kelet

Desa Kelet merupakan satu-satunya desa Mandiri di Kabupaten Jepara, memiliki banyak keuntungan karena posisi desa yang berada di pinggiran kota sehingga berbagai macam fasilitas dimiliki. Data menunjukkan penggunaan dana desa di Desa Kelet adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17. Penggunaan Dana Desa di Desa Kelet

NO	URAIAN	ANGGARAN							
		2015		2016		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemerintahan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%
2	Pembangunan Infrasruktur	290.758.000	93,11%	672.834.000	100,00%	818.150.000	95,51%	740.412.445	82,20%
3	Pembinaan sosial	15.000.000	4,80%	0	0,00%	0	0,00%	160.367.555	17,80%
4	Pemberdayaan Masyarakat	6.500.000	2,08%	0	0,00%	38.500.000	4,49%	-	0,00%
Total		312.258.000	100,00%	672.834.000	100,00%	856.650.000	100,00%	900.780.000	100,00%

G.5.1.Pemanfaatan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Kelet merupakan salah satu desa dengan status yang sama, dan dalam pemanfaatan dana Desa, terutama untuk kesejahteraan masyarakat berusaha untuk selalu mengalokasikannya kecuali untuk tahun 2016 karena keseluruhan realisasi dari dana desa tersebut digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan. Berikut disajikan data mengenai besarnya alokasi dana desa yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.18. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kelet Tahun 2015-2018

Tahun	Pemberdayaan Masyarakat	Dana Desa	Proporsi (%)
2015	Rp 6,500,000	Rp 312,258,000	2.08
2016		Rp 672,834,000	0.00
2017	Rp 38,500,000	Rp 856,650,000	4.49
2018	Rp 102,237,000	Rp 1,200,780,000	8.51

Proporsi besarnya dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari besarnya realisasi program pemberdayaan masyarakat semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan besarnya proporsi pada tahun 2018 adalah sebesar 8,51% dari besarnya realisasi dana desa di Desa Kelet.

Dana desa dapat membantu desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang sosial ekonomi,

masyarakat menjadi lebih mudah dalam menjalankan aktifitas sehari-hari baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Dari segi sosial masyarakat sangat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Masyarakat desa secara langsung ikut berperan mengawal, melaksanakan dan merasakan langsung hasil dari pekerjaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui skema padat karya tunai desa.

Sedangkan harapan masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I terhadap dana desa selanjutnya adalah:

- a. Agar dana desa lebih ditingkatkan.
- b. Perbanyak kegiatan di bidang pemberdayaan.
- c. Perbanyak kegiatan pelatihan pengembangan ekonomi untuk masyarakat Pra Sejahtera agar mempercepat pengentasan kemiskinan.
- d. Selalu melibatkan masyarakat miskin dalam pengelolaan kegiatan dana desa.

BAB IV

Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

A. Implementasi Pemanfaatan Dana Desa

Inovasi desa merupakan salah satu tujuan utama dari kemanfaatan dana desa, yaitu bagaimana desa bisa meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya melalui inovasi khas desa. Inovasi desa merupakan poin utama karena mendasarkan pada potensi desa, kearifan lokal, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam rangka mendorong inovasi desa, Kementerian Desa memberikan acuan berupa menu inovasi yang bisa dijalankan oleh desa, meliputi:

A. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. BPJS Desa Mandiri
2. Kelompok Peduli ASI Desa
3. Menumbuhkan Minat Baca di Desa
4. Tanggap Darurat Gizi Buruk
5. Jejaring Untuk layanan Inklusi
6. Keberlanjutan Program Parenting
7. Memaksimalkan Potensi Desa Untuk Pendidikan
8. Revitalisasi PAUD
9. Forum Kesehatan Desa Siaga

10. Optimalisasi Aset Desa Menuju Kemandirian Posyandu
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital
12. Meningkatkan Penerimaan Desa Melalui Pengelolaan Wisata Sejarah
13. Perencanaan Bisnis untuk Merintis Pabrik Tepung Singkong
14. Revitalisasi Budaya dan Ekonomi Desa
15. Revitalisasi Pasar Desa dengan Pasar Tematik
16. Pakan Ternak Fermentasi Pengganti Rumput
17. Penjernihan Air Ramah Lingkungan dan Pelembagaan Tata Kelola Air
18. Menata Kawasan Pertanian Menjadi Taman Edukasi Tematik Desa
19. Revitalisasi Aset Peninggalan Swasta Pengelola Destinasi Wisata
20. Posyandu Lansia

B. Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

1. Memanfaatkan *Solar Cell* Untuk Mengakses Air Bersih
2. Konservasi Bambu Untuk Menjaga Sumber Mata Air dan Debit Air Embung Dalam Mendukung Pertanian dan Ekowisata

3. Kajian Untuk Menentukan Teknologi Sumur dan Ketersediaan Air Desa
4. Merintis Produk Unggulan Desa Melalui Buah Naga
5. Mengamankan Pendapatan Desa Wisata Melalui Penerapan *E-Ticketing*
6. Upaya Desa Menghidupkan Kembali Bumdes Yang Dibekukan
7. Mengubah Limbah Minyak Goreng Menjadi PAD
8. Upaya Pemerintah Desa Menguji Kelayakan Kinerja Bumdes Sebelum Memberikan Modal Kerja
9. Memanfaatkan Aliran Sungai Menjadi Desa Mandiri Energi
10. Pengelolaan Dalam Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Untuk Keberlanjutan Pasokan Listrik Desa
11. Mengubah Sampah Menjadi Tabungan Pendidikan & Kesehatan
12. Pemanfaatan Asap Cair
13. Kerjasama *Shareholding* BUMDesa - Perum Perhutani dalam Pengembangan Hutan Kawasan untuk Destinasi Wisata
14. BUMDes *Mart* Solusi Belanja Hemat
15. Pemanfaatan Drainase Sebagai Tempat Pembudidayaan Ikan Lele
16. Diferensiasi Unit Usaha BUMDesa berbasis Pemetaan Potensi Desa

17. Memanfaatkan Refleksi Air Sungai Sebagai Media Promosi Wisata dan Produk Unggulan Desa
18. Mendaur Ulang Ban Bekas
19. Menyulap Limbah Pohon Pisang menjadi Produk Unggulan Desa

C. Bidang Infratraktur

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Olahraga (Sorga) Multifungsi Untuk Mengembangkan Minat, Bakat, dan Potensi Warga Desa
2. Pengelolaan Sumber Mata Air Melalui Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal Oleh Pemerintah Desa
3. Pengelolaan Sarana Air Bersih Desa
4. Konservasi Biota Laut Melalui Pengembangan Desa Wisata
5. Konservasi DAS Berbasis Penguatan Ekonomi Melalui Program Kemitraan CSR
6. Pembangunan Sorga Desa Berbasis Peta Demografi
7. Integrasi Embung - Ragadesa dan Destinasi Wisata
8. Lahan Kosong untuk "Taman Olah Raga Desa"

4.1. Inovasi Desa yang Dijalankan dan Kebutuhan Inovasi Desa Lebih Lanjut

Jejara mempunyai 61 inovasi desa pada tahun 2018, yang terbagi menjadi 11 inovasi di Bidang Infrastruktur, 19 inovasi di Bidang SDM, dan 29 inovasi di Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan. Kunci dilakukannya inovasi adalah mudah ditiru dan ekonomis, dan ini terlihat dari inovasi yang paling banyak dilakukan di Jejara, yakni pada bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan. Pengembangan inovasi yang dilakukan di suatu daerah bisa dilakukan dengan pemetaan keunggulan serta potensi yang ada pada daerah tersebut. Inovasi yang dilakukan tidak hanya menyangkut perubahan teknologi yang digunakan, namun juga berdasarkan basis sosiologi, yaitu kekuatan masyarakat yang ada pada suatu desa.

Pendekatan yang dilakukan supaya suatu daerah bisa melakukan inovasi adalah dengan sistem ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi). Pembangunan jejaring diperlukan suatu desa guna mendorong untuk melakukan inovasi. Pengembangan jejaring tersebut melibatkan ABCGM, yaitu *Academy* (Akademisi), *Business* (Perusahaan), *Community* (Masyarakat), *Government* (Pemerintahan) dan Media. Media sekarang ini memainkan peranan yang penting dalam pengembangan inovasi di suatu desa, yaitu dengan menciptakan informasi dan penawaran terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah. Penawaran informasi mengenai inovasi yang ada pada suatu desa tersebut akan menciptakan permintaan sehingga

memberikan manfaat bagi pengembangan suatu desa yang berdampak baik untuk pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kunci inovasi lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah adanya ketokohan yang ada pada suatu desa dalam pelaksanaan inovasi. Di Indonesia, masyarakat mau berubah jika melihat orang lain sudah berhasil dengan meminimalkan kerugian yang mereka hadapi. Sehingga tokoh-tokoh ini yang mau terlebih dahulu melakukan perubahan atau inovasi dan akan diikuti oleh masyarakat lainnya jika memberikan manfaat yang positif.

Pengembangan inovasi harus berjalan beriringan antara ketiga bidang tersebut supaya tercipta keseimbangan. Pengembangan infrastruktur yang bagus tidak akan memberikan manfaat yang nyata bagi desa tersebut jika tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas SDM yang ada pada daerah itu. Jika ini terjadi maka akan menguntungkan bagi pihak lain yang bisa menangkap peluang dan dengan kondisi SDM yang lebih maju. Peranan teknologi sangat diperlukan, tetapi yang lebih penting lagi adalah *transfer of knowledge* pada suatu desa, sehingga desa tersebut mempunyai impian yang akan dicapai. Dibutuhkan pengembangan komitmen antar pemangku kepentingan pada saat pengembangan inovasi yang ada di suatu desa.

Berdasarkan acuan inovasi yang ditetapkan oleh Kemendesa tersebut kemudian diimplementasikan oleh kabupaten melalui TIM TPID sehingga diperoleh gambaran inovasi sebagai berikut:

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Menggapai mimpi melalui KUCICA (Aku Cinta Baca) Perpustakaan Berbasis Internet (TPID Donorojo).

Latar belakang didirikan KUCICA ini adalah menyediakan tempat yang khusus untuk mengembangkan minat baca masyarakat sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan ini tidak hanya berbasis buku melainkan juga internet. Sasaran dari program ini adalah pemuda, perempuan, dan pengusaha mikro dengan dana bersumber dari pemerintah desa, hasil advokasi ke pelaku usaha dan “Library supporter”, Hadiah (lomba dan sponsor), hasil usaha dan pameran.

2. Dewan Kesenian dan Kebudayaan Desa Banyumanis (TPID Donorojo)

Inovasi seni dan budaya ini muncul karena untuk memfasilitasi masyarakat di Desa Donorojo dalam mewujudkan potensi dan hobi yang dimiliki masyarakat. Masyarakat yang mempunyai potensi di bidang kesenian dan kebudayaan tersebut dilatih secara baik dan rutin sehingga memberikan peningkatan kemampuan dan pendapatan perekonomiannya.

3. Mengelola perpustakaan berbasis TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (TPID Nalumsari)

Keinginan untuk meningkatkan informasi seiring dengan perkembangan zaman untuk daerah yang jauh dari pusat kota akhirnya bisa untuk penciptaan inovasi di bidang SDM. Skala

cakupan dari perpustakaan berbasis TIK ini semakin meluas dengan menambah penyuluhan kepada remaja sehingga bisa mengurangi tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi masyarakat di desa tersebut serta mengadakan penyuluhan bagi ibu PKK dan ibu rumah tangga.

4. Wisata religi Karimunjawa penjaga garda tradisi lokal (TPID Karimunjawa)

Inovasi yang dilakukan adalah pengenalan wisata religi/ziarah (*Pilgrim Tourism*), yaitu ziarah ke makam Syeikh Amir Hasan (Sunan Nyamplungan), makam Syeikh Maulana Sayyid Kambang Dusun Kemloko Karimunjawa, makam Mbah Danang Joyo Karimunjawa, serta makam Sayyid Abdullah yang berada di Legon Kluwak Desa Kemujawa merupakan alternatif bagi destinasi wisata di Karimunjawa selain wisata baharinya, sehingga para wisatawan dapat mengenal Karimunjawa adalah destinasi wisata yang lengkap, mereka tidak sekadar *refreshing* tetapi juga mempelajari budaya dan sejarah Karimunjawa.

Pendanaan bagi pengembangan inovasi ini bersumber dari dana HPI, dana desa, dan bantuan dari pemerintah desa dan pemerintah provinsi.

5. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman edukasi untuk peningkatan SDM (PDTI Mayong).

Pemerintah Desa Pancur Kecamatan Mayong, Kabupaten

Jejara berinisiatif mengelola perpustakaan desa & taman edukasi menjadi motor penggerak perubahan. Karena letak Desa Pancur yang jauh dari kehidupan kota mengakibatkan masyarakat kurang akan informasi dan perkembangan zaman. Pemerintah Desa Pancur berinovasi dengan mengadakan perpustakaan desa dan mendirikan taman edukasi. Kegiatan ini diharapkan mampu melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

6. Kampung Wisata Tani Karang Gondang (TPID Mlonggo)
Kampung Wisata Tani Karang Gondang adalah sebuah upaya pengembangan potensi kearifan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sarana bercocok tanam. Hasil dari inovasi ini gizi keluarga terpenuhi, pendapatan meningkat, dan masyarakat dari luar daerah yang melihat menjadi termotivasi untuk melakukan pemanfaatan lahan pekarangan.
7. Pantai Blebak: Menuju destinasi wisata (TPID Mlonggo)
Memanfaatkan potensi alam, yaitu pantai dengan pasir putih untuk pengembangan wisata pantai yang indah dan tertata rapi. Inovasi ini terjalin karena adanya komunikasi yang baik antara pemuda, warga masyarakat pantai, dan pemerintah daerah.
8. Pengelolaan bank sampah: Alternatif kebersihan lingkungan Sinanggul (TPID Mlonggo)

Sampah merupakan sesuatu yang menimbulkan masalah dalam lingkungan kehidupan sehat, maka perlu adanya kreativitas dalam menjawab tantangan tersebut, salah satunya dibuatkan wadah untuk menyulap sampah menjadi nilai kreatif dan ekonomis bagi masyarakat. Karenanya perlu ada wadah yang dinamakan dengan bank sampah.

9. Welahan Sehat dengan “Ceting Berkat” (TPID Welahan)

Inovasi ini terobosan penurunan *prevalensi stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga pertumbuhannya terganggu, seorang anak akan terlihat terlalu pendek untuk ukuran seusianya. Pemerintah telah berupaya mempercepat penurunan *prevalensi stunting* melalui program PKGBM namun hanya dilakukan di beberapa daerah dan tidak terintegrasi dengan program atau kegiatan di desa sehingga hasilnya tidak maksimal. Inovasi Program Ceting Berkat (Cegah Stunting Berbasis Masyarakat) merupakan rangkaian rencana strategis percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sumber dana untuk program inovasi ini adalah dana desa dan swadana masyarakat.

10. Digas Kalem: Cara cermat untuk menyimpan dan mengamankan arsip Keluarga dan Lembaga (TPID Tahunan)
Digas Kalem (Digitalisasi Arsip Keluarga dan Lembaga) merupakan salah satu inovasi dalam bidang arsip keluarga atau lembaga dengan mengalikan dalam bentuk *hardfile* menjadi *softfile* atau dalam bentuk digital. Pengarsipan dengan

menggunakan model digital digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan, kerusakan, baik itu terjadi karena faktor alam maupun keteledoran dari warga masyarakat itu sendiri.

11. Penanggulangan sampah plastik melalui *Ekobrick* (TPID Tahunan)

Pemanfaatan sampah plastik dengan menjadikan *Ecobrick*, yaitu memasukkan sampah plastik ke dalam bekas botol air mineral dan dipadatkan sampai botol air tersebut menjadi keras. Untuk *Ecobrick* dengan kemasan 600 ml dihargai Rp 1.000 dan 1.500 ml dihargai Rp 2.000 yang nantinya akan dijadikan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomi, contohnya dekorasi rumah dan furniture dari *Ecobrick*.

12. Bank sampah “Cermat” alternatif solusi kebersihan bernilai ekonomis (TPID Pakis Aji)

Bank sampah yang dikembangkan di sini mempunyai kegiatan rutin setiap minggu, yaitu menjemput sampah di rumah masyarakat dengan memberikan tabungan yang dapat dicairkan setahun sekali dengan pembagian 30% untuk dana sosial dan 70% kembali kepada sang pemilik sampah. Kegiatan ini sangat disambut baik oleh masyarakat karena dapat mengubah kegiatan yang awalnya negatif menjadi kegiatan yang positif bagi masyarakat.

13. Mendayagunakan kader posyandu untuk mengelola bank sampah (TPID Kedung)

Bank sampah yang ada di desa ini dikelola dengan kerja sama Posyandu Mawar karena adanya keprihatinan melihat sampah yang berserakan di mana-mana, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki tempat sampah dan mengelola sampah. Dengan adanya inovasi tersebut menyebabkan peningkatan kesadaran dalam mengelola sampah dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut serta peningkatan perekonomian secara berkelanjutan.

14. Menumbuhkan Literasi pada warga melalui taman baca (TPID Kedung)

Taman Baca Masyarakat adalah suatu bentuk lembaga pendidikan yang menyediakan berbagai bentuk bahan belajar yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu manfaat dari taman baca di Kedung adalah adanya pemerataan membaca dan kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan terpenuhi.

15. Mengangkat budaya lokal Tongtek dengan alat musik dari barang bekas (TPID Kedung)

Tongtek adanya tak terlepas dari budaya Kabupaten Jepara pada bulan Ramadhan untuk membangunkan orang sahur. Kesenian Tongtek adalah salah satu bentuk kesenian rakyat yang berkembang di daerah pesisir pantai utara yang menggunakan peralatan kentongan dan alat lainnya. Di Desa Sukosono, Kecamatan Kedung, Tongtek dikolaborasikan dengan alat musik karawitan/gamelan. Inovasi yang muncul

pada kegiatan ini adalah munculnya kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan barang bekas.

16. Karang Taruna Melangkah, sampah tertangani: strategi Pelibatan Unsur Pemuda (TPID Kalinyamatan)

Inovasi ini melibatkan pemuda di Desa Manyargading untuk mengatasi permasalahan mengenai sampah yang menggunung dan merusak lingkungan di sekitar sungai. Sehingga dilakukan inovasi untuk pengelolaan sampah organik dengan komposter sederhana skala rumah tangga. Hasil dari inovasi ini adalah sudah tertanganinya sampah yang menggunung sekaligus terdapat pemasukan dana ke kas karang taruna untuk membiayai kegiatan lain.

17. Inovasi tanpa batas di lingkungan hijau (TPID Jepara)

Inovasi yang dilakukan adalah dengan menanam pohon serta merawatnya agar tetap terjaga keberadaannya, selain memberikan kesejukan dan keindahan, juga sangat membantu dalam upaya untuk penyerapan air dan mengendalikan dampak pemanasan global. Pembuatan biori juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam meresapkan air, dan akan memperkecil peluang terjadinya aliran air di permukaan tanah.

18. Perlakuan sampah dengan bijak melalui pengelolaan sistem bank sampah

Inovasi mengenai bank sampah perkuatan untuk mengurangi sampah, memilah sampah, mendaur ulang sampah dan menabung sampah. Penguatan kelembagaan untuk

pengelolaan bank sampah untuk membentuk paguyuban sehingga bisa memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa.

19. Dari singkong untuk kesehatan (memanfaatkan singkong menjadi tepung mocaf) TPID Kembang

Singkong merupakan makanan pokok dari sebagian masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman, singkong yang pernah melegenda itu ternyata semakin terpinggirkan. Saat ini jarang sekali ditemui petani yang mau menanam singkong di lahan pertaniannya. Tentu alasan klasiknya adalah harganya yang tidak stabil. Akhirnya singkong tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tepung *mocaf*. Dari tepung *mocaf* dapat digunakan untuk berbagai jenis olahan mulai dari jenis keripik yang rasanya jauh lebih renyah dan lebih irit minyak goreng daripada menggunakan tepung lain juga dapat digunakan untuk jenis-jenis olahan kue-kue kering, bolu, brownies dan lain sebagainya.

20. Pembelajaran metode “Gemes Canda” (TPID Kalinyamatan)

Gerakan Meraih Sehat Cinta Anak (Gemes Canda) merupakan suatu kegiatan di bidang kesehatan khususnya di bidang ibu hamil dan anak.

Bidang Infrastruktur Desa

Bidang Infrastruktur Desa

1. Kuawali Membangun Mimpi dari Umbul Gedogo (TPID Donorojo)

Memanfaatkan kondisi geografis yang dimiliki oleh Desa Jugo dengan adanya sumber mata air, yakni Umbul Gedogo. Umbul Gedogo dipilih untuk memulai langkah meraih mimpi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Umbul ini dikelola oleh pemerintah desa, BUMDes Arga Mulya, Pelaku usaha serta juga melibatkan masyarakat. Dengan adanya Umbul Gedogo tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Jugo.

Semua kegiatan di Umbul Gedogo nantinya dikelola oleh BUMDes Arga Mulya yang didanai dari dana desa sebagai penyertaan modal. Dan juga dana dari pihak ketiga atau pengembang sebagai mitra usaha.

2. Pesona alam Desa Blingoh harapan kesejahteraan bersama (TPID Donorojo)

Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang memiliki kondisi alam yang sangat mempesona. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat Desa Blingoh dengan harapan mampu menjadi wisata alam yang memberikan kepuasan bagi pengunjungnya. Sehingga dengan adanya pengelolaan potensi wisata tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian bagi warga masyarakat Desa Blingoh.

Beberapa pesona alam Desa Blongoh yaitu: Watu Tumpuk Undak Manuk, Air Terjun Jurang Nganten, Gua Tratak dan Air Terjun Undak Manuk.

3. Air bersih BP SPAM “Sumber Urip” (TPID Nalumsari)

Latar belakang didirikan BP SPAM “Sumber Urip” ini adalah kesulitan yang dialami oleh warga masyarakat Desa Tritis dalam mendapatkan air bersih pada musim kemarau, sehingga pemerintah Desa Tritis berinovasi untuk membangun sumber air yang dinamakan BP SPAM “Sumber Urip”. Menanggapi hal tersebut pemerintah dan Badan Pengelola air bersih BP SPAMS Desa Tritis melakukan kajian yang melibatkan tenaga ahli dalam perbaikan sumur yang ada di desa tersebut. Melalui kajian ini, sumber permasalahan macetnya sumur dapat di temukan dengan jelas sehingga penyelesaian untuk perbaikan sumur ini dapat di pecahkan permasalahannya. Hasilnya, kini warga bisa menikmati air bersih tanpa khawatir datangnya bulan kemarau.

Pendanaan inovasi desa ini bersumber dari bantuan PSDA, dan desa serta swadaya masyarakat.

4. Pesona Rolet: dari tiada menjadi berguna (TPID Keling)

Rolet adalah kawasan jembatan yang dikelilingi oleh area persawahan hijau yang juga sebagai jalur penghubung antara Desa Klepu dan Desa Kelet. Pemberdayaan ini digagas oleh para pemuda Desa Kelet yang menginiasi kegiatan pemanfaatan jembatan Rolet sebagai kawasan wisata.

Inovasi tersebut diharapkan mampu menjadikan Rolet sebagai penyokong ekonomi dan ikon desa wisata Kelet. Dan hasilnya perekonomian masyarakat Desa Kelet menjadi tumbuh melalui usaha warung kuliner yang ada di sekitar jembatan Rolet.

5. Gardu Pandang Jehan - Ikon Wisata Baru Bernuansa Eksotis (TPID Keling)

Memanfaatkan potensi alam, yaitu hutan pinus dengan posisi yang berada di ketinggian ± 750 mdpl untuk menjadikan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Inovasi ini berkembang karena adanya Pokdarwis dan dukungan dari pemerintah Desa Kunir. Sumber pendanaan dari inovasi ini diperoleh dari swadaya masyarakat Desa Kunir yang mendukung dibangunnya destinasi wisata ini.

6. Sistem Irigasi Naga Kalialit Berkah Bagi Petani (TPID Welahan)

Inovasi yang dilakukan adalah normalisasi saluran air dengan memanfaatkan kondisi geografis desa yang sejajar dengan kedung sungai SWD 2 dan kolaborasi pasokan air dari sumber utama dipadu dengan persediaan air dari sumur bor sebagai langkah antisipasi kurangnya suplai air. Inovasi ini bertujuan agar sistem irigasi yang baik dan menjamin suplai air pada pola Tanam Tiga Kali di Desa Kendeng Sidi Alit (Naga Kali Alit). Hasil dari pengembangan inovasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan bersih petani.

Pendanaan dari pengembangan inovasi tersebut bersumber dari dana desa dan bantuan khusus provinsi.

7. Sendang Kamulyan peningkatan pengelolaan menjadi Destinasi Wisata yang menarik dan ikonik (TPID Pecangaan)
Sendang Kamulyan merupakan sebuah embung air yang dulunya hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari oleh warga sekitar, namun saat ini tempat tersebut telah dibangun dan menjadi salah satu destinasi wisata yang mulai banyak pengunjungnya. Dengan inovasi yang dilakukan pada Sendang Kamulyan tersebut diharapkan mampu mendatangkan keuntungan secara ekonomis yang bisa meningkatkan PAD Desa Gemulung dan perekonomian masyarakat setempat.

Pendanaan inovasi pada Sendang Kamulyan bersumber dari dana Desa Gemulung, Hasil penjualan tiket serta dari para penanam modal.

8. Revitalisasi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) TPID Kedung

Latar belakang inovasi revitalisasi pasar ini adalah pasar yang terletak di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini sudah sangat memprihatinkan dan kumuh. Inovasi yang dilakukan adalah revitalisasi pasar tradisional dan melengkapinya dengan menambah suguhan pasar dengan pasar tematik yang khusus ikan segar termasuk penguatan organisasi dan sumber daya manusia di dalamnya. Harapan adanya inovasi tersebut adalah setelah adanya revitalisasi

akan mengangkat taraf hidup masyarakat sekitar dan desa memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Sumber dana yang didapatkan untuk inovasi tersebut adalah dari APBDES 2019.

9. Merintis destinasi wisata pantai Jalan Pancasila (TPID Kedung)

Memanfaatkan potensi alam, yaitu pantai yang memiliki keindahan dan keaslian alam yang menarik, juga berbagai peninggalan bersejarah. Inovasi ini berjalan karena adanya komunikasi yang baik antara Petinggi Purwoko, Pokdarwis dan masyarakat serta dihubungkan dengan RJPMDes dan RKP.

Pendanaan dari pengembangan inovasi ini bersumber dari dana desa dan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

10. Destinasi ekowisata Kampung Kali sebagai media penguatan ekonomi (TPID Kedung)

Inovasi yang dilakukan adalah mengembangkan dan mengenalkan ekowisata yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kedung, yaitu DAS Kali Kalianyar. Hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan warga desa tersebut memberikan dampak yang positif bagi desa terutama pada penerimaan PAD dan merangsang tumbuhnya ekonomi kreatif desa. Pendanaan dari inovasi tersebut bersumber dari dana desa dan swadaya masyarakat.

11. Membangun sarana irigasi dengan pralon (TPID Kembang)
Keinginan yang kuat para petani untuk mengolah lahannya akhirnya menciptakan inovasi baru, yaitu dengan membangun sarana irigasi menggunakan pipa paralon sehingga sekarang dapat mengairi lahan yang dulunya hanya mengandalkan dari air hujan. Adanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Gerot, TPK dan tokoh masyarakat serta pemerintah Desa Dudaklawu tersebut mampu meningkatkan lahan pertanian yang dulunya hanya lahan kosong dan meningkatkan hasil pertanian di Desa Dudaklawu. Pembangunan inovasi tersebut dilaksanakan dari dana desa dan dukungan swadaya sebagai wujud gotong royong masyarakat sekitar.

Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

1. Merintis produk unggulan desa melalui UP2K (TPID Donorojo)
Latar belakang dirintisnya produk unggulan desa adalah karena masyarakat di daerah tersebut masih banyak yang menggantungkan hidupnya melalui penghasilan pertanian dan sebagian nelayan. Program tersebut menghasilkan inovasi yang memiliki nilai produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Produk unggulan desa digerakkan oleh PKK yang dikelola oleh satu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Sasaran program ini adalah TP PKK Desa dan anggota masyarakat Desa Bandungharjo.

Pendanaan pemberdayaan masyarakat diperoleh dari dana yang dikembangkan oleh UP2K melalui simpan pinjam.

2. Keuletan kelompok wanita tani (KWT) dalam meraih mimpi (TPID Donorojo)

Program KWT dilaksanakan di Desa Clering Kabupaten Jepara oleh beberapa kelompok tani. Salah satu kelompok bernama kelompok wanita tani “Klompen” memprakarsai kegiatan berserikat, berkumpul dan berkreasi. Seluruh kegiatan yang dijalankan ditanggapi positif seluruh masyarakat dan menghasilkan kemandirian dalam pertaniannya serta taraf ekonomi keluarga di desa tersebut meningkat.

3. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) “Mawar Bersinar” (TPID Donorojo)

Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2013 berupa pemberian modal usaha yang diberikan kepada anggota UP2K untuk mengembangkan pekerjaannya secara mandiri. Unit usaha yang dikembangkan yakni sektor pertanian dan usaha kecil dengan modal awalnya berasal dari iuran ibu-ibu PKK yang berada di Desa Sumberrejo. Selanjutnya produk-produk inovasi yang dibuat telah dipasarkan melalui berbagai pameran dan pertokoan sehingga perekonomian masyarakat dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

4. Usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui UP2K (TPID Donorojo)

Latar belakang program UP2K ini adalah karena keadaan masyarakat Desa Ujungwatu kesulitan mengembangkan

pekerjaan mereka, sehingga dilakukan program peminjaman modal usaha untuk bidang pertanian dan UMKM. Mekanisme program tersebut dengan mengadakan simpanan pokok anggota sebesar Rp20.000/RT dan peraturan pinjaman yang tegas. Hasil yang diperoleh berupa berkembangnya usaha makanan yang bahan dasarnya berasal dari lingkungan sekitar dengan nilai jual lebih tinggi.

5. Meraih mimpi dan rezeki dari Pesona Ombak Mati dan Telaga Sejuta Akar (TPID Bangsri)

Program ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam yang dipadukan dengan religi dan budaya untuk mengembangkan wisatanya. Ide inovasi ini berkembang baik karena hasil komunikasi masyarakat desa, Pokdarwis dan Pokmaswas serta perangkat dan petinggi desa dalam merancang tata kelola dan infrastruktur pendukung wisata. Unit usaha terus berkembang serta menghasilkan peningkatan PAD dalam kurun waktu 4 tahun.

6. Jambu Citra, Jambu Lumut, dan Kopi: Sebuah peluang menuju kesejahteraan (TPID Bangsri)

Latar belakang program ini didasarkan karena banyaknya perkebunan sengon yang hanya dapat dipanen setiap 8-10 tahun dan banyaknya biji kopi yang hanya dijual mentah. Untuk meningkatkan produktivitas lahan dikembangkan pembibitan jambu citra serta perkebunan kopi yang disangrai untuk meningkatkan nilai jual. Produk inovasi tersebut bersama-sama dijalankan oleh Kelompok Usaha Bersama

dan masyarakat sekitar yang hasilnya kini perekonomian masyarakat meningkat, urbanisasi berkurang, harga jual kopi meningkat dan lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

7. Festival Memeden Gadu: Melestarikan tradisi, mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (TPID Bangsri)

Sebagai desa yang berkembang di bidang pertanian, masyarakat Desa Kepuk mengembangkan Festival Memeden Gadu yang diadaptasi dari alat pengusir burung-burung perusak tanaman padi yang dilestarikan menjadi kesenian dan kebudayaan lokal. Usaha tersebut dilakukan agar eksistensi Desa Kepuk diakui keberadaannya dan memanfaatkan waktu luang masyarakat agar lebih produktif. Program pengembangan seni budaya tersebut menghasilkan festival memeden gadu menjadi ikon Desa Kepuk. Selain itu, wisata budaya tersebut menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung sehingga pendapatan Desa Kepuk meningkat.

8. Pandai Besi: Sebuah tantangan antara tradisi dan peluang pengembangan sebagai produk unggulan di tengah modernisasi zaman (TPID Bangsri)

Terdapat desa di Kecamatan Bangsri yang tidak mendukung pengembangan wisata namun memiliki sumber daya manusia dengan keahlian pandai besi. Program ini memfasilitasi Paguyuban “Wesi Aji” dengan memberikan pengarahan dan

pelatihan dari dinas terkait yang selanjutnya menghasilkan ikon baru Desa Wedelan. Koordinasi yang baik antara pemerintah Desa Wedelan dan Anggota Paguyuban “Wesi Aji” menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat dan berkurangnya tingkat pengangguran. Program ini disambut baik masyarakat agar kerajinan tersebut dapat terus dilestarikan.

9. Nikmatnya aroma dan rasa Kopi Tempur: Sebuah peluang menuju keberhasilan (TPID Keling)

Masyarakat Desa Tempur sebagian besar penduduknya adalah petani kopi dengan lahan kurang dari 1 Ha, namun hasil dan nilai produksi kopi masih jauh dari harga standar karena kurangnya kualitas, sehingga program intensifikasi oleh Gapoktan, pemerintah setempat, dan Dinas Kehutanan dilaksanakan dan menghasilkan kuantitas panen lebih tinggi dengan kualitas jauh lebih baik tanpa harus memperluas lahan tanaman. Pemanfaatan limbah dan olah produk turunan kopi turut meningkatkan pendapatan daerah.

Pendanaan program tersebut dibantu bersama-sama oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dana desa, dan swadaya masyarakat.

10. KPA “Didip Farm” beternak ayam jantan berbasis hulu hilir (TPID Keling)

Latar belakang dilaksanakannya program ini adalah untuk mengatasi harga jual daging ayam yang tidak stabil, sehingga

untuk menghindari kerugian atau kelebihan laba Kelompok Peternak Ayam mengadakan bimbingan teknis (bintek) dan pendampingan untuk mengolah daging mentah ayam untuk dimasak dan dipasarkan dalam bentuk produk siap konsumsi. Hasilnya berupa keuntungan KPA meningkat 334 persen dan harga ayam tetap stabil di berbagai musim.

11. Pengolahan ikan segar menjadi kerupuk ikan masyarakat Karimun Jawa (TPID Karimunjawa)

Desa Karimunjawa penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dengan jumlah hasil tangkapan ikan tidak menentu, untuk mengendalikan kelebihan jumlah ikan yang diperoleh, maka ibu-ibu di desa tersebut mengolah ikan tersebut menjadi kerupuk yang mulanya hanya dikeringkan. Hasil yang diperoleh adalah jumlah pembusukan ikan berkurang, pendapatan meningkat dari nilai penjualan produk lebih tinggi, serta tingkat pengangguran ibu-ibu Desa Karimunjawa berkurang.

12. Seruling “Nyamplung” Karimun Jawa (TPID Karimunjawa)

Komunitas Pondok Kreatif Bunga Jabe Karimunjawa Bersama-sama dengan anak-anak dan masyarakat untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui pembuatan seruling dengan memanfaatkan bahan baku alam, yakni buah nyamplung. Selain bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, program ini diadakan agar masyarakat pandai berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hasil kreasi tersebut akan mendongkrak

pendapatan masyarakat di daerah sekitar dan kesenian *Nyamplung* tersebut semakin dikenal luas wisatawan.

13. BUMDes “Bringin Maju Sejahtera” motor penggerak pengembangan ekonomi desa (TPID Batealit)

Latar belakang didirikannya BUMDes tersebut yakni karena minimnya pendapatan asli desa serta banyaknya potensi desa yang perlu dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia di sekitar. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan dana kepada masyarakat melalui BUMDes tersebut agar masyarakat dapat meningkatkan kegiatan perekonomiannya. Kegiatan simpan pinjam tersebut berhasil menggerakkan perekonomian desa dan pembangunan desa berjalan lancar. Hasil yang diperoleh yakni berkembangnya usaha peternakan kambing dan usaha persewaan molen berjalan baik dan kemandirian ekonomi desa dapat tumbuh.

14. BUMDes Menuju Desa Mandiri (TPID Mayong)

Penyatuan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang ada di desa adalah alasan utama didirikannya BUMDes Desa Mandiri. BUMDes ini menjunjung tinggi kemandirian pengelolaan aset ekonomi desa sehingga sangat memperhatikan kemanfaatan program yang dijalankan. Harapan BUMDes tersebut dapat meningkatkan PAD, mengurangi pengangguran, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, hingga jaminan pelayanan sosial yang baik. Harapan tersebut telah terwujud melalui program pengadaan bank sampah, minimarket desa,

pengadaan sumber air bersih, unit simpan dan unit pertanian penyewaan traktor & distribusi pupuk bersubsidi.

15. Kampung “Remitan” geliatkan ekonomi Mayong Lor (TPID Mayong)

Kampung Remitan didirikan bertujuan untuk mempertahankan kebudayaan di Desa Mayong karena penduduk mudanya semakin sedikit yang berminat mengembangkan usaha kerajinan keramik dan gerabah (Remitan). Peran anak muda di daerah tersebut bersama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara membuahkan hasil berupa berkembangnya kembali usaha kerajinan Remitan, selain itu juga meningkatkan perekonomian warga sekitar, warga ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta jaringan ekonomi masyarakat Desa Mayong berkembang luas.

16. Rengginan: Makanan ringan tradisional dongkrak ekonomi masyarakat Desa Jambu Timur (TPID Mlonggo)

Inovasi ini muncul karena adanya minat warga Desa Jambu Timur yang ingin melestarikan kuliner berbasis kearifan lokal, yaitu rengginan. Kurangnya minat generasi muda terhadap warisan kuliner tradisional menyebabkan jenis kuliner tradisional dilupakan oleh generasi muda. Dengan adanya inovasi ini masyarakat Desa Jambu Air berharap dapat menjaga warisan budaya makanan yang dimiliki oleh bangsa sehingga membawa pengaruh terhadap ekonomi kerakyatan.

17.Ukiran patung kuda: Spirit pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi masyarakat (TPID Mlonggo)

Pengrajin patung kuda Desa Jambu berinisiatif untuk melestarikan dan mengenalkan hasil kerajinan ukir kuda dari kayu ke masyarakat luar agar popularitasnya meningkat di tingkat nasional maupun internasional. Produk yang dihasilkan adalah patung kuda jingkrak yang ukuran dan ukirannya mirip seperti aslinya. Para pengrajin kayu ingin menumbuhkan industri kreatif yang berskala nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan warga dan pelestarian profesi ukir kayu. Hasil dari pengembangan inovasi tersebut adalah dapat menyerap tenaga kerja sebagai tukang ukir dan menurunkan angka pengangguran di masyarakat.

18.Menyulap limbah kulit kelapa menjadi sapu akar sabut (TPID Mlonggo)

Pemanfaatan limbah menjadi sapu akar sabut merupakan inovasi yang sangat bagus untuk mengurangi limbah sabut kelapa yang biasanya hanya dibuang atau dibakar. Dengan munculnya ide pembuatan sapu akar sabut yang berbahan dasar limbah kulit kelapa ini, masyarakat Desa Srobyong dapat mengurangi limbah dari kulit kelapa dan para pengrajin sapu akar sabut mendapat tambahan pendapatan bagi keluarganya.

19.Singkong "Suwawal" menjadi "Wingko" (TPID Mlonggo)

Inovasi ini muncul karena ketersediaan singkong di Desa

Suwawal yang melimpah hingga akhirnya memunculkan ide untuk mengolah singkong menjadi wingko. Produk yang dikelola oleh Catering Annida RT 01 RW 03 Desa Suwawal ini memanfaatkan menu makanan yang berbahan baku lebih terjangkau dengan varian makanan baru namun tetap memiliki rasa yang nikmat serta dapat meningkatkan pendapatan perekonomian. Hasilnya masyarakat dapat menikmati makanan yang bergizi dengan harga terjangkau.

20. Strategi Seribu Asap dalam pengembangan ekonomi kreatif (TPID Welahan)

Seribu Asap adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Karanganyar yang bertujuan untuk memecahkan seribu masalah dalam satu atap (Seribu Asap) melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama), sehingga berbagai inovasi maupun kendala dapat dipecahkan secara bersama-sama. Dengan dibangunnya komunikasi yang baik antara KUBE, Pemerintah Desa Karanganyar dan warga Desa Karanganyar menciptakan pengembangan ekonomi warga melalui penciptaan kreasi, inovasi produk yang berasal dari bahan daur ulang mampu meningkatkan sumberdaya ekonomi masyarakat Desa Karanganyar. Hasil dari inovasi tersebut telah memberi dampak yang baik dalam mengembangkan perekonomian desa agar menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Pendanaan pengembangan inovasi ini bersumber dari penyertaan modal dari pemerintah desa melalui BUMDes dan juga dari sumbangan anggota KUBE.

1. PSK sajian khas dan memikatgelorakan pengembangan ekonomi desa (TPID Pecangaan)

PSK (Pasar Sore Karangandu) adalah sebuah upaya pengembangan sektor ekonomi yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Karangandu dengan memanfaatkan pasar tradisional yang menjual berbagai macam makanan tradisional yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil dari inovasi ini adalah terbentuknya satu pasar yang memiliki fungsi sebagai tempat jual beli dan sekaligus sebagai tempat wisata kuliner dengan ciri khas sajian tradisional, PSK menjadi salah satu tempat yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat khususnya dan para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya dan peningkatan PAD Karangandu melalui PSK dapat mendukung dana pembangunan di Desa Karangandu.

2. CPPD "Makaryo Tani" penuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan progam beras murah (TPID Tahunan)

Inovasi yang dilakukan adalah mengadakan program beras murah untuk memenuhi kebutuhan pangan warga masyarakat Desa Mangunan dan sekitarnya, sehingga warga dapat membeli beras dengan harga terjangkau (lebih murah dari harga pasar). Ide dari inovasi tersebut untuk mengendalikan gejolak harga beras yang ada di pasar dan

pihak pengelola tidak ada niat untuk mencari keuntungan. Hasil dari inovasi tersebut mampu menciptakan rasa puas bagi masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang murah dan murah, serta CPPD mendapat kepercayaan dari Provinsi Jawa Tengah untuk menambah stok pangan desa sejumlah Rp 30.000.000.

Pendanaan dari pengembangan inovasi tersebut bersumber dari dana desa, swadaya masyarakat serta bantuan yang diberikan langsung dari provinsi.

3. Batik Tulis “Dewi Kunthi” alternatif geliat ekonomi masyarakat Slagi (TPID Pakis Aji)

Salah satu program inovasi dari Desa Slagi adalah Batik Tulis “Dewi Kunthi”. Langkah awal yang diambil untuk mengembangkan program ini adalah mengenalkan batik kepada para pelajar dan anak-anak sekolah agar mereka memiliki perhatian terhadap batik. Selain itu juga peran Pemkab Jepara dengan mengupayakan pendaftaran hak cipta untuk karya Batik Khas Jepara dan juga mengenalkan Batik Jepara kepada masyarakat luar agar Batik Jepara lebih terkenal lagi.

4. Peningkatan produksi garam dengan teknologi Giomembrane (TPID Kedung)

Pemanfatan plastik sebagai *Giommebrane* yaitu melapisi meja kristalisasi yang digunakan untuk mengkristalkan garam-garam dengan plastik dengan ketebalan 500 mikron. Inovasi

ini meningkatkan hasil pendapatan petani garam menjadi bertambah, membutuhkan waktu yang lebih singkat dibanding dengan cara yang tradisional dan menghasilkan kualitas garam yang bermutu tinggi.

5. Pembuatan terasi sebagai usaha sampingan keluarga (TPID Kedung)

Latar belakang dari inovasi ini adalah muncul ide kreatif dari Bapak Chambali untuk menciptakan makanan yang mampu bertahan lama dan mencoba untuk membuat makanan dari bahan baku yang mulanya kurang bernilai ekonomis menjadi bahan olahan yang bernilai tinggi yaitu dibuat terasi. Hasil dari pengembangan terasi ini mampu membantu ekonomi keluarga Bapak Chambali serta menciptakan rasa terasi yang lebih khas. Pendanaan inovasi ini bersumber dari dan pribadi keluarga Bapak Chambali sendiri.

6. Mebel Kerso pemanfaat limbah kayu (TPID Kedung)

Inovasi ini memanfaatkan limbah kayu yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan baru yang mempunyai unsur estetika yang tinggi dan mempunyai nilai jual yang mahal. Inovasi ini muncul karena banyaknya limbah kayu yang hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar, sehingga para pengrajin kayu di Deso Kerso memiliki ide untuk memanfaatkan limbah kayu tersebut menjadi barang yang bernilai tinggi. Sumber pendanaan untuk inovasi ini masih dari pribadi ataupun kelompok.

7. Industri rumahan keripik singkong (TPID Kedung)

Latar belakang dari industri rumahan ini adalah melimpahnya singkong di Desa Dongos dan harga singkong yang murah, sehingga masyarakat Desa Dongos memanfaatkan kesempatan itu untuk mengolah singkong menjadi keripik yang memiliki harga jual yang lebih mahal dan menghasilkan omset yang begitu besar. Inovasi ini merupakan industri rumahan dengan tenaga kerja anggota keluarga. Hasil dari pengembangan inovasi ini mampu meningkatkan perekonomian keluarga yang dihasilkan dari penjualan keripik singkong.

8. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengolahan ikan asap (TPID Kembang)

Keinginan untuk membangun sebuah usaha pengasapan akhirnya bisa terwujud dengan dibentuknya kelompok usaha pengasapan ikan "Mina Rahayu" Desa Dermolo. Kelompok usaha tersebut juga membentuk manajemen pengelolaan sampai sistem pemasaran agar bisa lebih bersaing dan usaha ikan asap di Desa Dermolo semakin maju dan berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga di Desa Dermolo. Hasil dari pengembangan tersebut menjadikan hasil produksi ikan asap menjadi meningkat dan penghasilan yang meningkat bagi ibu-ibu pelaku pengasapan maupun pelaku pemasaran.

9. Inovasi Pertanian Perkotaan (TPID Kalinyamatan)

Inovasi Pertanian Perkotaan adalah metode pertanian yang hanya membutuhkan bahan baku yang mudah dijumpai dan

sangat ekonomis. Proses dari metode inovasi ini juga sangat mudah dengan memanfaatkan limbah kotoran ayam, kotoran kambing dan limbah rumah tangga ke dalam polybag/pot sebagai medianya. Kemudian ketika tanaman sudah mulai tumbuh bisa dipindahkan media yang lebih besar. Hasil dari metode ini tidak kalah dengan hasil pertanian yang dilakukan di lahan persawahan dan juga lebih efisien.

B. Kebutuhan Inovasi Desa

Capturing tersebut berada dalam level kecamatan. Berdasarkan kondisi geografis dan administrasi maka terdapat kesamaan antara wilayah yang memungkinkan replikasi bagi desa lain. Inovasi bagi desa sebenarnya tidak tergantung kepada status desa, melainkan tergantung kepada kondisi lokal dan kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut. Di sini, desa yang sangat tertinggal karena kualitas lingkungan yang buruk maka disarankan inovasi yang dilakukan digunakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Sedangkan desa-desa yang jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan, maka inovasi yang dilakukan berkaitan dengan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi. Berikut merupakan ringkasan untuk penggambaran inovasi yang terdapat di 5 desa sebagai perwakilan status desa pada Indeks Desa Membangun.

Desa	Status Desa	Implementasi Inovasi Desa	Potensi dan Kebutuhan
1. Desa Gemulung, Kec Pecangaan	Sangat Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi dalam pembuatan lapangan futsal dan pembangunan track jogging yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Gemulung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Gemulung merupakan salah satu desa dengan status sangat tertinggal karena penurunan Indeks Lingkungan. Penurunan indeks lingkungan ini disebabkan karena di Desa Gemulung berkembang kawasan industri, sehingga menyisakan permasalahan mengenai pengelolaan limbah. Limbah yang berasal dari industri/ pabrik-pabrik sudah bisa ditangani oleh tim ahli. Tetapi limbah yang berasal dari rumah tangga yang belum bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu diperlukan replikasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang sudah berhasil di beberapa daerah atau dengan mendatangkan pakar - Kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah perlu ditingkatkan, yang nantinya bisa juga meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Jika sektor industri sudah maju, maka diharapkan terjadi banyak alih fungsi lahan dan banyak penduduk yang tidak lagi menjadi petani sehingga berpengaruh terhadap daya belinya. - Perkembangan ekonomi kreatif mengenai kriya harus ditangkap oleh pemerintah desa guna meningkatkan inovasi, yaitu dengan pengelolaan sampah. Tidak dipungkiri ketika suatu daerah berubah menjadi sentra industri maka akan menarik banyak pendatang ke daerah tersebut dan berdampak pada peningkatan volume sampah. - Maka kebutuhan inovasi yang diperlukan untuk Desa Gemulung dengan status desa sangat tertinggal adalah adanya pelatihan pembentukan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat dengan terus dilakukan penguatan kelembagaan. Hal ini bisa dilakukan dengan studi banding ke daerah lain atau mendatangkan pakar yang mengelola sampah, terutama untuk sampah yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. - Kebutuhan dana : 1. Pelatihan pengelolaan sampah plastik : Rp. 5 juta 2. Pembelian mesin jahit untuk mengolah sampah yang berupa plastic diproses menjadi dompet, tas, dll : 4 juta 3. Pelatihan pengelolaan sampah kertas : Rp. 4 juta 4. Pelatihan pengelolaan sampah kain perca : 4 juta

2. Desa Pancur, Kec Man-yong	Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kemajuan teknologi untuk terus mengupdate mengenai website desa. - Pembinaan anak usia dini dan peningkatan literasi dan budaya baca melalui perpustakaan. - Pengembangan BUMDes MANDIRI SEJAHTERA, yang sudah masuk pada sektor ritail. - Inovasi-inovasi tersebut dilakukan untuk menciptakan akses informasi bagi masyarakat di Desa pancur, sehingga semua kalangan bisa mendapatkan manfaat, baik dari kalangan pelajar, pelaku usaha sampai masyarakat secara umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Pancur mempunyai potensi di sektor pariwisata yang bisa ditingkatkan guna menambah pendapatan masyarakat. Beberapa potensi pariwisata di desa pancur adalah wisata alam, wisata religi, dan wisata budaya. - Untuk pengembangan potensi Desa Pancur menjadi desa wisata maka memerlukan beberapa tahapan dalam pengembangan pariwisatanya baik dari <i>what to see, what to do, what to buy, what to arrived</i> sampai dengan <i>what to stay</i>. Pengembangan tersebut dalam arti, potensi wisata di Desa Pancur tidak hanya berhenti untuk menikmati keindahan alam saja. Tetapi juga harus memunculkan inovasi supaya wisatawan tersebut tertarik untuk masuk ke dalam suatu aktivitas atau atraksi pada paket wisata di Desa Pancur. Pengembangan ekonomi local juga bisa ditingkatkan untuk memproduksi dan menjual produk-produk khas dari Desa pancur atau bekerja sama dengan desa yang ada di sekitarnya. Pemerintah daerah Jepara sudah memperhatikan mengenai pengembangan infrastruktur supaya Desa Pancur mudah untuk diakses. Peningkatan <i>multiplier effect</i> terhadap kesejahteraan masyarakat dari dikembangkannya desa wisata adalah ketika sudah sampai pada tahap <i>what to stay</i>. Kenapa pada wisatawan tersebut sampai bersedia untuk menginap di suatu lokasi wisata. Penyediaan tempat penginapan bisa membangun kerja sama dengan penduduk di Desa Pancur untuk pembuatan homestay. - Kebutuhan untuk pengembangan inovasi di sektor pariwisata adalah dengan mempromosikan Desa Pancur sebagai desa wisata terlebih dahulu sambil dilakukan pemetaan mengenai produk barang yang bisa dijual serta atraksi yang bisa dilakukan. tahap pertama dalam inovasi di Desa Pancur membutuhkan dana untuk kepentingan penyebaran informasi mengenai potensi-potensi pariwisata yang ada di Desa Pancur tersebut, yaitu dengan mengikutsetakan stakeholder dan didukung oleh pemuda-pemuda di Desa Pancur. Berdasarkan penelitian mengenai potensi pariwisata, proporsi terbesar dari wisatawan adalah penduduk dengan kisaran umur 17-20 tahun. Sehingga dengan melibatkan pemuda-pemuda di desa bisa menciptakan paket pariwisata yang kreatif. - Pendanaan bisa dilakukan dengan sinergi antara beberapa instansi, baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
------------------------------	------------	--	---

3. Desa Karimunjaya, Kec Karimunjaya	Berkembang	<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi bidang infrastruktur terutama jalan dan fasilitas umum. - Pembuatan seruling dari nyamplung buah - Pengasapan ikan - Pembuatan kerupuk ikan - Inovasi-inovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk unggulan yang ada di Karimunjaya supaya daya tahan dan margin laba yang diperoleh semakin meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Karimunjawa selain pariwisata juga mempunyai potensi hasil perkebunan, terutama buah mangga dan jambu mete yang belum dimanfaatkan. Tanaman tersebut hanya tumbuh liar di pekarangan warga serta tegalan. Inovasi untuk mengolah buah jambu mete menjadi abon mete diperlukan dan bisa dilakukan dengan mendatangkan tenaga pakar/ praktisi yang sudah bisa mengolah abon jambu mete. Inovasi teknologi yang dibutuhkan juga sederhana, hanya Teknologi Tepat Guna. - Inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat juga diperlukan supaya masyarakat di Karimunjawa semakin kreatif dan tidak hanya menopangkan perekonomiannya dari sektor perikanan saja. - Dibutuhkan peran tokoh masyarakat supaya masyarakat bersedia untuk mulai memanfaatkan beberapa potensi hortikultura yang ada di Ngawi, yaitu potensi buah mangga dan buah jambu mete. - Potensi utama di Karimunjawa adalah hasil perikanan. Selama ini, sektor unggulan tersebut hanya dijual dalam bentuk ikan segar saja. Pengolahan hasil perikanan yang lebih awet, misalkan untuk abon, nugget dan dendeng bisa memperpanjang daya tahan produk perikanan serta meningkatkan margin laba yang diperoleh nelayan. - Kebutuhan untuk inovasi tersebut adalah untuk pembelian Teknologi Tepat Guna serta pendampingan pelatihan bagi ibu-ibu anggota PKK.
4. Desa Tanjung, Kec Pakis Aji	Maju	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun infrastruktur jalan sehingga akses lebih mudah dan perekonomian semakin berkembang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan dana yang digunakan untuk pengembangan inovasi di Karimunjawa adalah sebesar Rp. - Potensi unggulan di Desa Tanjung yang bisa dioptimalkan adalah gula aren. Perlunya branding terhadap produk-produk yang dihasilkan di Desa Tanjung, serta perbaikan pada packagingsnya akan meningkatkan harga jual dari produk tersebut. - Pangsa pasar juga perlu ditingkatkan dengan promosi-promosi baik secara offline maupun online.

		<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk pengembangan usaha gula aren, catering, makanan kecil serta keripik gadung. KUB membuat perekonomian di Desa Tanjung meningkat, karena ada komitmen dari masyarakat disana untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh KUB Desa Tanjung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi produk gula aren dengan rasa tertentu, atau sudah diolah dengan bahan-bahan yang lain perlu terus dilakukan sehingga konsumen tidak merasa bosan dan mempunyai banyak pilihan. - Teknologi tepat guna juga diperlukan untuk mengubah bentuk gula aren dalam bentuk Kristal, sehingga akan lebih mudah untuk dikonsumsi. - Kebutuhan dana yang digunakan untuk pengembangan inovasi di Desa Tanjung adalah sebesar Rp.
5. Desa Kelet, Kec Keling	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - inovasi desa dengan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan Gor yang dapat di gunakan sebagai sarana olahraga maupun gedung serbaguna dan pembentukan BUMDes. Melalui BUMDes saat ini desa Kelet bisa mendirikan unit-unit badan usaha, mulai dari usaha jasa, simpan pinjam, sewa gedung dan perlengkapan hajatan yang semuanya digunakan semaksimal mungkin oleh warga desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi yang bisa dikembangkan di Desa Kelet adalah pengembangan pariwisatanya. Desa tersebut mempunyai topografi berada pada dataran tinggi, sehingga potensi pariwisata yang bisa dijual adalah wisata alam. Menciptakan sustainable tourism sangat diperlukan dengan memperkuat kelembagaan dan jejaring dalam bidang pariwisata. - Karena letaknya yang ada di dataran tinggi, maka perlu dibangun gardu pandang untuk melihat Jepara dari atas. Kebutuhan infrastruktur sangat diperlukan. Sehingga membutuhkan sinergi pendanaan dari berbagai pihak.

B.1. Desa Gemulung

Acuan inovasi yang diberikan oleh Kemendes tersebut menunjukkan bahwa inovasi bisa dilakukan pada bidang apapun dengan tujuan utama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Desa Gemulung memiliki inovasi di bidang sarana peningkatan infrastruktur dan sarana olahraga yaitu pembuatan lapangan futsal dan pembangunan *track jogging* dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan akses/mobilitas.

Proses pengembangan inovasi dilakukan dengan swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja melalui program padat karya tunai. Namun sebenarnya pembangunan infrastruktur belum membuat inovasi yang berarti karena dilakukan tanpa inovasi.

Inovasi lain yang dilakukan adalah dengan keramahan lingkungan, yaitu penerapan pengelolaan limbah oleh masyarakat khususnya limbah rumah tangga. Permasalahannya adalah program ini belum dilaksanakan secara baik sehingga perlu inovasi lebih lanjut dengan melakukan replikasi.

B.1.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Adanya dana desa memacu semangat masyarakat Desa Gemulung untuk membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang dilakukan oleh pemerintah desa tentunya membuat inovasi desa seperti pembangunan infrastruktur

jalan dan sarana olahraga (lapangan futsal dan *jogging track*). Tujuan dari inovasi desa mempunyai nilai yang positif guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan memudahkan akses/mobilitas masyarakat sehingga menambah kesejahteraan masyarakat.

Sarana kesehatan dan pendidikan masyarakat sudah terpenuhi atau mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018 dengan tersedianya tenaga kesehatan bidan, dokter, serta akses ke poskesdes dan polindes yang lebih terjangkau. Selain itu juga tersedianya posyandu untuk meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak balita (AKABA). Sedangkan kesadaran masyarakat untuk pendidikan sudah terpenuhi dengan akses menuju sekolah yang lebih terjangkau dan mulai adanya kegiatan PAUD di desa.

Walau memberikan nilai yang positif dalam pembangunan desa ternyata jika dilihat dari perhitungan skor indeks desa status Desa Gemulung mengalami penurunan dari desa berkembang menjadi desa tertinggal. Namun apabila melihat realita di lapangan ternyata Desa Gemulung terlihat sebagai desa yang maju, dimana infrastruktur jalan yang sudah baik, masyarakat yang sejahtera dan ada beberapa industri besar seperti pabrik sepatu Adidas. Sebaliknya nilai perhitungan indeks lingkungan mengalami penurunan yang mungkin disebabkan belum adanya pengolahan limbah industri dengan

baik sehingga mengganggu lingkungan masyarakat. Selain itu faktor sosial di mana masyarakat kurang memiliki kepedulian terhadap kegiatan masyarakat terutama dengan adanya padat karya tunai.

B.1.2. Potensi, Permasalahan, dan Kebutuhan Inovasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan juga wawancara dengan masyarakat desa yang menjadi responden, sebenarnya terdapat potensi ekonomi yang cukup bagus di Desa Gemulung, namun membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan terkait. Masyarakat bisa meningkatkan potensinya dengan memanfaatkan adanya pabrik di wilayahnya, baik dari aspek penyediaan fasilitas makan, penginapan maupun jasa lainnya.

Permasalahan limbah merupakan masalah yang pelik khususnya pada usaha skala rumah tangga. Pada skala perusahaan, untuk penanganan limbah, masyarakat bersama pemerintah bisa menekan sehingga perusahaan membangun fasilitas pengelolaan limbah agar bisa berada di bawah ambang batas yang ditentukan dan tidak mengganggu lingkungan. Namun pada skala usaha rumah tangga justru kesulitan karena pengelolaan limbah biasanya belum menjadi prioritas utama. Inovasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini

1. Membuat komitmen terhadap pengelolaan bank sampah yang ditemukan oleh desa lain, antara lain menggerakkan karang taruna untuk mengelola bank sampah yang dilakukan oleh TPID Kalinyamatan.

2. Limbah kotoran ayam bisa diatasi dengan mencampur pakan ayam dengan *bioaktivar* yaitu pakan alami yang dicampur dengan minuman untuk ternak ayam. Tambahan makanan ini teruji telah mampu mengurangi bau pada limbah ternak.
3. Kotoran ayam bisa digunakan sebagai pupuk organik yang murah meriah. Sehingga bisa digunakan untuk menciptakan usaha baru yaitu bahan pangan organik, misalnya sayuran yang hanya menggunakan bahan organik. Inovasi ini bisa mempunyai potensi ekonomi yaitu dengan menjual pupuk organik dari kotoran ayam dan menjual sayuran organik.

B.2. Desa Pancur

- a. Desa Pancur merupakan salah satu desa yang memiliki inovasi di bidang teknologi, pendidikan, ekonomi.
- b. Kemajuan teknologi yang diimplementasikan cukup bagus antara lain adalah administrasi pemerintahan yang bagus dengan menggunakan media internet. *Website* desa yang selalu diperbarui.
- c. Pendidikan ditunjukkan dengan komitmen terhadap pelayanan pendidikan, khususnya pada pembinaan anak usia dini dan peningkatan literasi dan budaya baca melalui perpustakaan.

Bidang ekonomi dengan mengembangkan BUMDes Mandiri Sejahtera sebagai lembaga ekonomi. Inovasi yang dilakukan adalah BUMDes saat ini bukan hanya bergerak di bidang simpan pinjam namun juga sudah masuk pada sektor retail.

Langkah yang dilakukan dalam pengembangan inovasi desa adalah dengan menggerakkan karang taruna sebagai ujung tombak, khususnya dalam peningkatan teknologi dan pendidikan.

B.2.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Latar belakang dilakukan inovasi desa di Desa Pancur adalah untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembangunan desa yang berkualitas. Inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat perpustakaan desa dan BUMDes. Proses yang telah dilakukan dalam pengembangan inovasi desa saat ini melalui *capturing* dan replikasi terhadap BUMDes dan perpustakaan desa, di mana didukung dengan peran aktif karang taruna dalam program inovasi desa. Namun saat ini masih ada kendala inovasi desa belum bisa terintegrasi dengan dana desa karena masih merupakan proyek percontohan sehingga belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Secara keseluruhan pemanfaatan dana desa dari tahun 2015-2018 sudah memberikan peningkatan dari berbagai

aspek seperti, kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta sarana prasarana pendukung lainnya. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak beriringan dengan pemerataan sehingga status Desa Pancur saat ini menjadi Desa Tertinggal. Hal tersebut disebabkan karena wilayah Desa Pancur yang ternyata sangat luas sehingga walau selalu dilakukan pembangunan belum bisa merata ke semua daerah di desa sehingga masih menimbulkan ketimpangan.

B.2.2. Potensi, Permasalahan, dan Kebutuhan Inovasi

Desa Pancur memiliki potensi wisata yang sangat bagus terdiri atas wisata alam yang diramu dengan wisata religi dan wisata sejarah. Beberapa potensi wisata di Desa Pancur antara lain:

- Pancuran Empu Supo yaitu murid Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih dikeramatkan. Airnya digunakan untuk mencari keberkahan

- Masjid Kenduren yaitu masjid yang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan sholawatan dan mendekatkan diri kepada Allah (munajat)

- Wisata budaya tersebut mempunyai beberapa persinggungan dengan religi sehingga perlu dikemas agar tidak memunculkan pertentangan namun tetap bisa mengembangkan aspek wisata.

Wisata yang berhasil harus mempunyai beberapa keunggulan yang akan menarik wisatawan yaitu

- a. *What to see*, apa yang akan dilihat di tempat wisata tersebut,
- b. *What to Do*, apa yang akan dikerjakan ditempat wisata tersebut
- c. *What to Buy*, apa yang akan dibeli dari tempat wisata tersebut
- d. *What to Arrived*, bagaimana bisa sampai ke tempat tersebut
- e. *What To Stay*, apa yang menarik wisatawan untuk tinggal

Wisata Pancuran Empu Supo mempunyai dua keunggulan, yang *pertama*, karena adanya daya tarik air pancuran yang dianggap keramat dan masjid yang digunakan untuk bemunajat dan melakukan sholat. *Kedua*, potensi tersebut sudah berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kembalinya orang-orang untuk datang ke sana sepanjang tahun. Namun daya tarik yang *ketiga*, belum dikembangkan secara maksimal Pancur belum memiliki souvenir atau oleh-oleh khas yang akan dibawa pulang oleh wisatawan. Misalnya seperti dodol garut atau jenang kudus. Dalam pengembangan inovasi desa ini maka potensi Desa Pancur perlu untuk ditelisih mana yang paling memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam pengembangan souvenir ini Desa Pancur bisa memanfaatkan BUMDes yang sudah berkembang dengan usaha retailnya sebagai saran produksi dan pemasaran.

Akses jalan menuju Pancuran Empu Supo sudah cukup bagus namun harus terus dipelihara agar bisa lebih tahan lama dan lestari.

Aspek yang pertama dan kedua dalam daya tarik wisata ini telah memungkinkan aspek *kelima*, yaitu *what to say*. Oleh sebab itu maka inovasi yang harus dilakukan oleh pancur adalah bagaimana membangun *homestay* yang layak bagi wisatawan. Konsep *homestay* kembali kepada alam yang saat ini banyak dilakukan cocok untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat.

B.3. Desa Karimunjawa

1. Desa Karimunjawa merupakan desa yang terletak di kepulauan dengan jarak yang terjauh dengan kabupaten Jepara. Potensi Kabupaten Jepara terdiri atas pariwisata, perikanan dan perkebunan. Secara detail dijelaskan sebagai berikut:
2. Kondisi alam Karimunjawa yang sangat indah dengan pantai berpasir putih dan laut yang bening menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kondisi ini ditangkap oleh investor untuk datang dan mengembangkan Karimunjawa, namun sayangnya investor kurang melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata
3. Potensi perikanan. Perikanan tangkap belum didampingi dengan perikanan budidaya secara utuh, sehingga ketika laut mempunyai gelombang tinggi, produksi perikanan di Karimunjawa menurun.

Potensi perkebunan. Tanah di Karimunjawa cocok untuk digunakan sebagai perkebunan mete dan kakao. Namun selama ini mete yang tumbuh di sana masih belum dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik.

Desa Karimunjawa sejauh ini telah menerapkan inovasi yang dilakukan antara lain dalam bidang infrastruktur karena memang jalan dan fasilitas umum yang berada di kawasan Karimunjawa masih sangat rendah. Termasuk karena struktur tanah yang berbukit-bukit, maka pembuatan talud (plengsengan) yang digunakan untuk mencegah tanah longsor sangat diperlukan. Proses inovasi dalam pembangunan jalan ini dilakukan melalui rembug antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, LKMD, dan BPD. Pelaksanaan kegiatan ini disosialisasikan kepada masyarakat dengan melalui pertemuan RW dan RT yang dilakukan setiap bulan. Keterlibatan masyarakat antara lain adalah dengan padat karya tunai sebagai tenaga kerja.

Selain itu inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat seruling dari nyamplung buah, pengasapan ikan dan pembuatan kerupuk ikan agar ikan tidak hanya dijual mentah. Inovasi lain yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah dengan membuat BUMDes yang melayani *snorkeling* dan penyewaan alat-alatnya, namun selama ini belum berjalan dengan baik karena masih kalah bersaing dengan pengusaha swasta.

B.3.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa sebesar 70 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur di mana saat ini memang masih menjadi prioritas utama. Pembangunan yang sudah dilakukan sampai saat ini antara lain pengecoran jalan, plengsengan saluran air untuk mencegah longsor dan membangun saluran air jalan. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah memberikan kelancaran akses/mobilitas masyarakat sehingga transportasi lebih mudah, biaya lebih murah dan efisien dan waktu lebih cepat di tempuh. Hasil dari inovasi desa tersebut memberikan nilai positif terhadap masyarakat dimana meningkatnya kesejahteraan masyarakat Karimunjawa sendiri karena adanya kemudahan akses sehingga juga lebih menarik wisatawan untuk datang.

Status Desa Karimunjawa sendiri memang masih merupakan desa berkembang dimana desa saat ini masih dalam taraf pembangunan untuk menjadi desa yang mandiri. Hal ini juga sudah mulai terlihat dengan adanya sarana kesehatan, pendidikan yang sudah lebih memadai di pusat desa. Akses dan mobilitas menuju Desa Karimunjawa yang sudah lebih banyak dengan adanya bandar udara serta kapal bahari ekspres sehingga membuat wisatawan yang berkunjung selalu meningkat.

B.3.2. Potensi, Permasalahan, dan Kebutuhan Inovasi

Potensi utama Karimunjawa adalah di sektor wisata, perikanan dan perkebunan namun selama ini belum dimaksimalkan oleh pemangku kepentingan yang ada. Sektor pariwisata menghadapi persaingan dari pihak swasta dengan kelebihan dana yang dimilikinya. Pembangunan hotel, *event organizer* oleh pihak swasta belum melibatkan masyarakat. Keunggulan sebagaimana disebutkan di atas yaitu, *what to see, what to do, what to arrived, dan what to stay* dikuasai oleh investor swasta. Sehingga para pemangku kepentingan harus berjuang keras untuk ikut berperan di dalamnya bukan hanya sebagai penonton dalam pengembangan wisata ini. Usulan inovasi yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan *website* dan media sosial sebagai upaya untuk menjaring wisatawan, karena kelemahan utama di Karimunjawa adalah komunikasi yang sulit, maka usaha ini harus dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah atau masyarakat yang berada di Jepara (daratan).
2. Mengembangkan *what to buy* melalui pengembangan pengolahan pasca panen perikanan yaitu dengan membuat abon ikan, ikan asap maupun makanan olahan lain berbahan dasar ikan. Pengolahan produk perkebunan misalnya pengolahan buah mete menjadi manisan buah mete, asinan buah mete atau abon buah mete sebagai produk unggulan.

Pengembangan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang ada.

B.4. Desa Tanjung

B.4.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Desa Tanjung melakukan inovasi desa dengan menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur jalan, dimana dengan perbaikan infrastruktur jalan yang baik akan membuka akses/mobilitas yang mudah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa . Inovasi desa yang dilakukan selain pembangunan infrastruktur juga penyediaan air bersih, pembuatan wc di rumah serta kegiatan padat karya tunai dalam pembukaan jalan desa.

Dana desa digunakan untuk pengembangan lembaga ekonomi di Desa Tanjung, yaitu untuk pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dana desa memberikan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama sebanyak Rp10 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk pengembangan usaha catering, makanan kecil serta keripik gadung. Masih terdapat juga produk unggulan dari Desa Tanjung yang masuk dalam KUB, yaitu gula aren.

Status Desa Tanjung saat ini menjadi desa yang maju dimana penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur telah memberikan kemudahan akses masyarakat terutama masyarakat di Dukuh Salak yang dahulu merupakan

dukuh terpencil saat ini hasil pertaniannya sudah mulai bisa diperjualbelikan untuk menambah ekonomi masyarakat.

B.5. Desa Kelet

B.5.1. Implementasi Inovasi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Desa Kelet melakukan inovasi desa dengan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan GOR yang dapat digunakan sebagai sarana olahraga maupun gedung serbaguna dan pembentukan BUMDes. Melalui BUMDes saat ini Desa Kelet bisa mendirikan unit-unit badan usaha, mulai dari usaha jasa, simpan pinjam, sewa gedung dan perlengkapan hajatan yang semuanya digunakan semaksimal mungkin oleh warga desa sehingga bisa menampung kebutuhan warga desa dengan kenuntungan dan manfaat oleh masyarakat dan lembaga ekonomi desa.

Status Desa Kelet saat ini menjadi desa maju di mana bisa dilihat dengan adanya dana desa saat ini dapat membantu desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang sosial ekonomi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam menjalankan aktifitas sehari-hari baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Dari segi sosial masyarakat sangat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah Desa Maju dengan status tetap berjumlah 0,52%; Desa Maju dengan status telah meningkat menjadi 0,52%; Desa Berkembang dengan status tetap 43,23%. Desa Berkembang 8,17%, Desa Tertinggal dengan status tetap sebanyak 10,50%, Desa Tertinggal dengan status meningkat berkembang/ maju sebesar 23,05%. Desa Tertinggal dengan status tetap 0,03%, Desa Sangat Tertinggal dengan status meningkat menjadi Desa Tertinggal atau Berkembang sebesar 0,62%.
2. Pemanfaatan dana desa mengacu pada prioritas sesuai Menteri Desa PDPT, diperoleh hasil bahwa pemanfaatan dana desa masih paling banyak pada pembangunan infrastruktur, pemerintahan, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Inovasi desa yang dikreasikan berdasarkan pada kearifan lokal, yaitu potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kreasi meliputi aspek manajemen pemerintahan, penyelesaian permasalahan di lingkungan desa, pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya lokal, dan kewirausahaan.

B. Rekomendasi

1. Perubahan status desa dipengaruhi oleh banyak aspek sehingga perlu untuk dilakukan kerjasama antar pemangku kepentingan yang terlibat disebut sebagai ABCGM (*Academic, Business, Community, Government and Media*). Keterlibatan masing-masing aktor para pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi
2. Pemanfaatan dana desa mengikuti kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa desa yang di pelosok dan termasuk dalam *remote area* akan lebih banyak menggunakannya sebagai pembangunan infrastruktur karena akan memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses, khususnya dalam peningkatan ekonomi.
3. Inovasi desa dilakukan dengan pola *bottom up* untuk meningkatkan kreativitas dari masyarakat. Inovasi diarahkan berbasiskan sumber daya lokal sehingga akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, L. C. (2015). Building extra-regional networks for regional innovation systems: Taiwan's machine tool industry in China. *Technological Forecasting and Social Change*, 100, 107-117. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.07.014>
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (2015). Indonesia.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia § (2017). Indonesia. Retrieved from [https://sooko.mojokertokab.go.id/upload/PermenDPDPTT 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas DD Tahun 2018.pdf](https://sooko.mojokertokab.go.id/upload/PermenDPDPTT_19_Tahun_2017_Penetapan_Prioritas_DD_Tahun_2018.pdf)

Kementrian Desa. **Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (2016). Indonesia.**

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (2014). Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). Indonesia. Retrieved from http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com_erundangan&id=404095&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2014

Sleuwaegen, L., & Boiardi, P. (2014). Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions. *Research Policy*, 43(9), 1508-1522. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.03.014>

DATA DAN INFORMASI

MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Evaluasi yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa dana desa telah menjadi salah satu pendorong dalam perubahan status desa menurut Indeks Desa Membangun. Perubahan bisa meningkat maupun menurun, penurunan terutama terjadi karena adanya faktor eksternal yang berpengaruh secara langsung namun tidak bisa diselesaikan hanya oleh desa tersebut. Namun secara umum peningkatan IDM lebih banyak dibandingkan dengan penurunan.

Salah satu faktor penting dalam pemanfaatan dana desa adalah inovasi yang dibangun di desa khususnya secara *bottom up*. Inovasi mengandung tiga tahap utama yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi. Amati mempunyai arti bahwa inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi desa baik dari aspek geografis, demografis maupun potensi-potensi yang ada di dalamnya yang kemudian dengan komitmen akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan data provinsi, komitmen yang terbentuk dalam BID berjumlah 5.514 yang menunjukkan kesadaran dan pemahaman desa akan pentingnya inovasi demi peningkatan pembangunan.

Dengan penelitian ini diharapkan akan mampu memotret secara lebih dalam bagaimana pemanfaatan dana desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa sehingga tujuan perubahan Membangun Desa menjadi Desa Membangun yang mengandung pengertian desa sebagai subyek pembangunan bisa terlaksana dengan baik.

ISBN 978-623-7129-50-9



Buku Dana Desa Bu Izza

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ jetis.ponorogo.go.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off